



LKIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH T.A. 2024



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. LKIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya..

LKIP BNNP DIY berisi informasi tentang: Capaian kinerja, Hambatan pelaksanaan rencana kerja, Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi. LKIP ini merupakan pertanggungjawaban BNNP DIY atas kinerja secara akuntabel baik kepada Kepala BNN maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dan juga sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam menentukan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

BNNP DIY bertanggung jawab atas seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh BNN RI, ditunjukkan dengan keberhasilannya dalam mencapai seluruh target indikator dengan baik.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan oleh BNNP DIY dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian serta masukan dalam peningkatan program P4GN periode selanjutnya.

Yogyakarta, Januari 2025

**Kepala BNN Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta**



The image shows a circular official stamp of the Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. The stamp contains the text "BADAN NARKOTIKA NASIONAL" at the top, "PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" around the bottom edge, and "KEPALA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. A horizontal line extends from the right side of the signature.

Andi Fairan, S.I.K., M.S.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUGAS POKOK & FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI ...	3
a. Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Wewenang	3
b. Struktur Organisasi.....	4
c. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
A. RENCANA PROGRAM KINERJA	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
C. PERJANJIAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	9
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	60
BAB IV PENUTUP.....	62
LAMPIRAN	64
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada tahun 2024. Penetapan Kinerja BNNP DIY tahun 2024 terdiri dari 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan, dengan Indikator Kinerja sebanyak 16 (enam belas) Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Realisasi dan Persentase Indikator Kinerja T.A. 2024
Badan Narkotika Nasional Provinsi DI Yogyakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten/ Kota	100 %
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten/ Kota	100 %
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten/ Kota	100 %
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	87,38 %	128,50 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IMB) yang Operasional	8 Unit	8 Unit	100 %
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerimaan layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,6 Indeks	3,79 Indeks	105,28 %
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	9 Berkas Perkara	19 Berkas Perkara	211,11 %
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100 %
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100 %
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks	99,97 Indeks	113,60 %
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA (Nilai Kinerja Anggaran) mencapai target	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten/ Kota	100 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP DIY	98,19 Indeks	99,93 Indeks	101,77 %
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten/ Kota	100 %
16	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilain Internal	91 Indeks	91,94 Indeks	101,03 %

BNNP DIY telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari total 16 (enam belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya telah mencapai hasil yang maksimal. Disamping itu BNNP DIY berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam pengukuran Indeks P4GN (skala 71,0) yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN RI). Penilaian Indeks P4GN ini didasarkan pada data kinerja yang menggambarkan efektivitas program di setiap level administrasi selama tahun 2024. Dengan hasil skala 71.0, kinerja BNNP DIY dianggap efektif dan diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya guna terciptanya akuntabilitas kinerja organisasi yang lebih baik lagi.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan (Sumber : UU Nomor 35 Th 2009). Bagai dua sisi mata pisau, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat (di bidang kesehatan) dan juga merusak kesehatan jika disalahgunakan. Permasalahan narkoba masih menjadi tantangan yang berat bagi bangsa kita, perkembangannya yang sangat pesat sehingga mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia. Seiring Kemajuan zaman dan teknologi melahirkan produk-produk narkoba jenis baru atau dikenal dengan *New Psychoactive Substance* (NPS). NPS merupakan gabungan dari berbagai jenis zat (*drugs*) yang dibuat untuk menyamarkan jenis narkoba yang sudah dikenal luas seperti ganja, kokain, heroin, shabu, dan ekstasi. Sampai dengan tahun 2024, perkembangan NPS di dunia sebanyak 1.247 jenis, 167 diantaranya sudah terindikasi beredar di Indonesia. (Sumber: <https://bnn.go.id/bnn-id-next-leader-hadir-wujudkan-generasi-muda-bersih-narkoba>, 2024).

Pada Tahun 2023 BNN telah melakukan pengukuran angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, dari hasil pengukuran tersebut diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73% atau setara dengan 3,33 juta orang. Adapun kelompok umur yang cenderung menjadi penyalah guna narkotika adalah kelompok usia produktif 15-49 tahun.

Kejahatan narkotika yang kian meresahkan dan membahayakan masa depan bangsa ini telah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Asta Cita ke-7. Presiden juga menguatkan “Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba” menjadi program prioritas ke-6 dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan visi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba), BNN RI menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan permasalahan narkotika di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan

menyeluruh, yaitu (1) penguatan kolaborasi (2) penguatan intelijen (3) penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara (4) penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, serta (5) tematik dan ikonik.

Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY (BNNP DIY) mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah DIY, upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada tahun 2024 dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya strategi Rehabilitasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan, strategi Pemberantasan, strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan strategi yang dikembangkan melalui Kerjasama.

Sepanjang tahun 2024 BNNP DIY dan BNNK jajarannya telah berhasil menyelesaikan 19 (sembilan belas) berkas kasus narkotika dengan barang bukti narkotika berupa Sabu, Tablet Metamfetamina dan Ganja.

Laporan Kinerja ini sebagai kewajiban BNNP DIY dalam melaporkan Hasil Kinerjanya kepada Kepala BNN sebagai akuntabilitas kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP DIY. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kepala BNN Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS POKOK & FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR

ORGANISASI

a. Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Wewenang

Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi, BNNP DIY menyelenggarakan fungsi antara lain :

- 1) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- 3) pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;

- 4) pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- 6) pelayanan administrasi BNNP; dan
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

b. Struktur Organisasi

BNN telah melakukan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan BNNP dan BNNK sesuai amanat Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Pedoman untuk Struktur Organisasi Kementerian), saat ini Jumlah Pegawai BNNP dan BNNK/Kota wilayah DIY sebanyak 215 orang yang terdiri dari 124 orang Pegawai PNS, 15 orang penugasan Polri, 13 orang PPPK dan 63 orang PPNPN, berikut Struktur Organisasi BNNP DIY :

Gambar 1.
Struktur Organisasi
Badan Narkotika Nasional Provinsi DI Yogyakarta



c. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dan dasar hukum dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dan ruang lingkup BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar rencana program kerja, rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja satuan kerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan pertanggung jawaban anggaran dalam pelaksanaan kinerja satker.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Dokumen Pengukuran Kinerja

BAB II PERJANJIAN KINERJA

BNN sebagai *vocal point* penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerjanya. Sedangkan BNNP DIY sebagai instansi vertikal BNN di daerah, menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi BNN yaitu :

Visi

“Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Misi

“Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.”

A. RENCANA PROGRAM KINERJA

Rencana program kinerja (Renproja) BNNP DIY adalah perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BNN RI. BNNP DIY menyusun Renproja Tahun 2020-2024 berdasarkan pada Renstra BNN dengan menyesuaikan kebutuhan melalui tahapan persiapan, identifikasi permasalahan, penyusunan visi dan misi, penyusunan tujuan dan sasaran strategis, penyusunan arah kebijakan strategis, penyusunan target dan pendanaan, penyusunan kerangka kelembagaan, dan penyusunan program kegiatan, sasaran dan indikator.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran Renproja dalam target capaian tahunan dan merupakan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2024. Rencana Kinerja Tahunan BNNP DIY memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Perjanjian Kinerja berisikan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga / instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja BNNP DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja T.A. 2024
Badan Narkotika Nasional Provinsi DI Yogyakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang

6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IMB) yang Operasional	8 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerimaan layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,6 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	9 Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA (Nilai Kinerja Anggaran) mencapai target	3 Kabupaten /Kota
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP DIY	98,19 Indeks
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten /Kota
16	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilain Internal	91 Indeks

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Perjanjian Kinerja BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 terdiri dari 12 (dua belas) sasaran kegiatan dan 16 (delapan belas) indikator kinerja yang akan dicapai. Dengan melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, seluruh indikator kinerja tercapai targetnya. Berikut pencapaian perjanjian kinerja BNNP DIY tahun 2024 dan penjelasan hasil capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.
Capaian Perjanjian Kinerja T.A. 2024
BNNP DI Yogyakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten /Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten /Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	87,38 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IMB) yang Operasional	8 Unit	8 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerimaan layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,6 Indeks	3,79 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	9 Berkas Perkara	19 Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks	99,97 Indeks
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA (Nilai Kinerja Anggaran) mencapai target	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten /Kota
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP DIY	98,19 Indeks	99,93 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten /Kota	3 Kabupaten /Kota
16	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian Internal	91 Indeks	91,94 Indeks

BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta selalu melakukan evaluasi Capaian Kinerja organisasi atas pelaksanaan program kerja yang telah tertuang dalam Rencana Program kerja jangka menengah periode 5 tahun (Tahun 2020- 2024) yaitu melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi (1) **perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya**, (2) **perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan program kerja organisasi (Renproja)**, (3) **analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**, (4) **analisis efisiensi penggunaan sumber daya** serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja BNNP DIY tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian Kinerja periode tahun sebelumnya, sebagaimana yang ditetapkan pada Rencana Strategis BNN tahun 2020 - 2024.

Adapun analisis capaian sasaran kegiatan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 dijelaskan pada tabel dan narasi, sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	100

Definisi Operasional dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Pengukuran indeks ketahanan diri remaja anti narkoba menggunakan alat ukur yang disebut dengan *Anti Drugs Scale (ADS)* yang meliputi tiga dimensi, yaitu: *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out*. Kemampuan diri untuk mengelola pikiran, impuls, dan emosi agar dapat menampilkan respon perilaku yang berkesesuaian dengan tujuan adalah yang dimaksud dengan *Self Regulation*. Sedangkan kemampuan diri untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu atau menyakiti orang lain adalah yang dimaksud dengan *Assertiveness*. Adapun kemampuan diri untuk dapat meningkatkan aspek positif dengan cara meningkatkan keterhubungan dengan orang lain disebut dengan *Reaching Out*.

BNNP DIY bertugas melaporkan hasil kegiatan dan memfasilitasi proses pengumpulan data kuesioner dari para responden sesuai petunjuk teknis yang telah di tetapkan oleh pembina fungsi, sedangkan penilaian terhadap indeks ketahanan diri remaja ini dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI. Adapun klasifikasi untuk menentukan kategori capaian nilai indeks ketahanan keluarga anti narkoba (Dektara) dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kategori Penilaian Dektari

Interval Nilai	Kategori
$\geq 53,71$	Sangat Tinggi
49,74 – 53,50	Tinggi
25,98 – 29,73	Rendah
$\leq 45,97$	Sangat Rendah

Pada tahun 2024 BNNP DIY dan jajaran telah melaksanakan kegiatan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menunjukkan bahwa BNNP DIY telah memenuhi bahkan melampaui target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 yaitu target 3 (tiga) Kabupaten/Kota. Sedangkan realisasi target capaian indikator kinerja sesuai dengan Renproja yaitu mampu mencapai kategori “Tinggi”. Berdasarkan data kuisisioner yang telah dikumpulkan dari 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) orang responden yang sudah mendapatkan intervensi dari BNN di Wilayah D.I. Yogyakarta, diperoleh hasil bahwa Wilayah D.I. Yogyakarta dapat mencapai target kategori “Tinggi”.

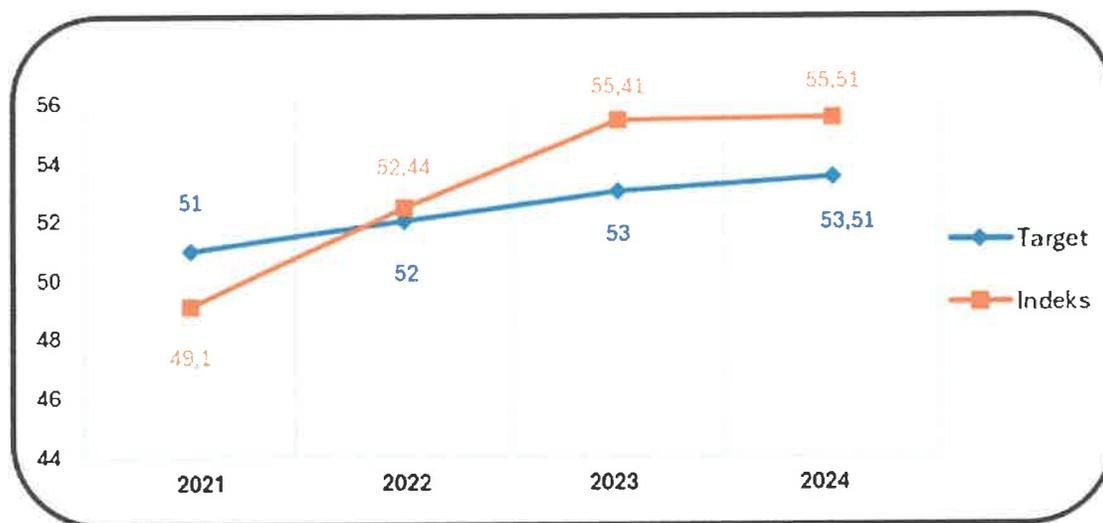
Berdasarkan hasil pengukuran kuesioner indikator ketahanan diri remaja yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, Wilayah DIY pada tahun 2024 memperoleh kategori “Tinggi” dengan nilai rata-rata 53,29 (Lampiran 1). Hasil perhitungan *score* Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) Wilayah DIY Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Score Dektari Wilayah DIY

Satuan Kerja	Score Dektari	Kategori
BNNP DIY	55,51	Sangat Tinggi
BNN Kota Yogyakarta	49,75	Tinggi
BNNK Sleman	52,04	Tinggi
BNNK Bantul	55,86	Sangat Tinggi
Rata-Rata Provinsi DIY	53,29	Tinggi

Hasil nilai indeks ketahanan diri remaja BNNP DIY pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari yang semula pada tahun 2021 memiliki nilai 49,10 kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan nilai 52,44 dan pada tahun 2023 memperoleh nilai 55,41 berkategori “Sangat Tinggi”, serta pada tahun 2024 ini mampu mencapai nilai 55,51. Data dukung indikator ini terdapat pada lampiran 1.

Perbandingan realisasi capaian nilai / score indeks ketahanan diri remaja BNNP DIY dengan target score level nasional dan atau Rencana Program Kerja (Renproja) dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Perbandingan Score Dektari BNNP DIY dengan Target Nasional

Capaian kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba memiliki nomenklatur yang sama mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan nomenklatur yang berbeda, oleh sebab itu tidak dapat dibandingkan dengan capaian atau indeks kinerja saat ini.

Faktor keberhasilan dalam mencapai target kinerja :

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan peningkatan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

- a. Petugas BNNP dan BNNK memiliki persepsi yang sama terkait ketahanan diri remaja mulai dari konsep dasar, standar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan dari BNN Pusat.
- b. Petugas yang kompeten sehingga dapat menjalin komunikasi yang efektif dan persuasif untuk membantu remaja memiliki ketahanan diri dari penyalahgunaan narkoba.

- c. Sinergitas antar instansi atau pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Informasi dan Edukasi P4GN bagi remaja.
- d. Pemanfaatan media elektronik maupun non-elektronik dalam upaya penyebarluasan informasi dan edukasi P4GN bagi remaja agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Upaya Nyata Untuk Menanggulangi Kegagalan Dalam Mencapai Target Kinerja

Tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan telah diminimalisir oleh petugas dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya:

- a. Peningkatan kapabilitas petugas terkait perkembangan narkoba maupun kemampuan dalam menyampaikan materi harus disesuaikan dengan kondisi terkini.
- b. Penyelarasan persepsi terkait standar pelaksanaan prosedur pengukuran sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan dari BNN Pusat.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pembina fungsi BNN, agar nantinya jika terdapat kendala dalam pengisian aplikasi Dektari di BNNKab/ Kota dapat dilakukan upaya mitigasinya.

Kegiatan peningkatan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna narkoba dilaksanakan secara efisien, dengan keterbatasan anggaran (beberapa anggaran diblokir) dan sumber daya manusia yang belum maksimal, BNNP DIY berhasil menyelesaikan seluruh output dan outcome dengan berbagai upaya salah satunya pemanfaatan jejaring dengan para pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja :

Berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun yang sudah berjalan, fungsi pencegahan BNNP DIY menyusun rekomendasi untuk mencapai target indikator kinerja yang lebih baik di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyamakan persepsi terkait pemahaman mengenai rincian pelaksanaan kegiatan, termasuk materi maupun item kuesioner untuk pengukuran indeks melalui bimbingan teknis kepada penyuluh dan staf di semua satker BNN.
- b. Memberikan materi terlebih dahulu tentang ketahanan diri remaja anti narkoba kepada responden sebelum responden tersebut mengisi kuesioner indeks.
- c. Menyasar kepada responden dari lembaga pendidikan yang mendapatkan intervensi dari BNN wilayah DIY dan dilaksanakan secara tatap muka.

2. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	100 %

Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Dektara) merupakan pengukuran kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Petunjuk Teknis Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, 2021). Pengukuran indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi 3 (tiga) dimensi diantaranya:

1. *Beliefs system* (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. *Organizational Process* (proses organisasi) adalah struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. *Communication/problem-solving processes* (proses komunikasi) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Penilaian indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba pada satuan kerja wilayah dilakukan oleh Direktorat Advokasi BNN RI (tingkat pusat). Masing-masing satuan kerja BNN tingkat wilayah melaporkan hasil kegiatan dan memfasilitasi proses pengumpulan data kuesioner dari para responden sesuai petunjuk teknis. Perhitungan nilai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh BNN RI dan lembaga penelitian yang telah bekerja sama. Hal tersebut bertujuan agar proses penghitungan berjalan transparan karena dikerjakan oleh para profesional. Adapun klasifikasi untuk menentukan kategori capaian nilai indeks ketahanan keluarga anti narkoba (Dektara) dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kategori Penilaian Dektara

Interval Nilai	Kategori
88,31 – 100	Sangat Tinggi
76,61 – 88,30	Tinggi
65,00 – 76,60	Rendah
25,00 – 64,99	Sangat Rendah

BNNP DIY telah menetapkan target RKT 2024 dimana kegiatan ini ditargetkan tercapainya 3 (tiga) Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”. Selain itu, sesuai dengan target Renproja 2020 - 2024 agar memperoleh nilai minimum 78,70 berkategori “sangat tinggi”. Realisasi T.A. 2024, BNNP DIY telah melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menunjukkan bahwa BNN Wilayah DIY telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sebab dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten/ Kota.

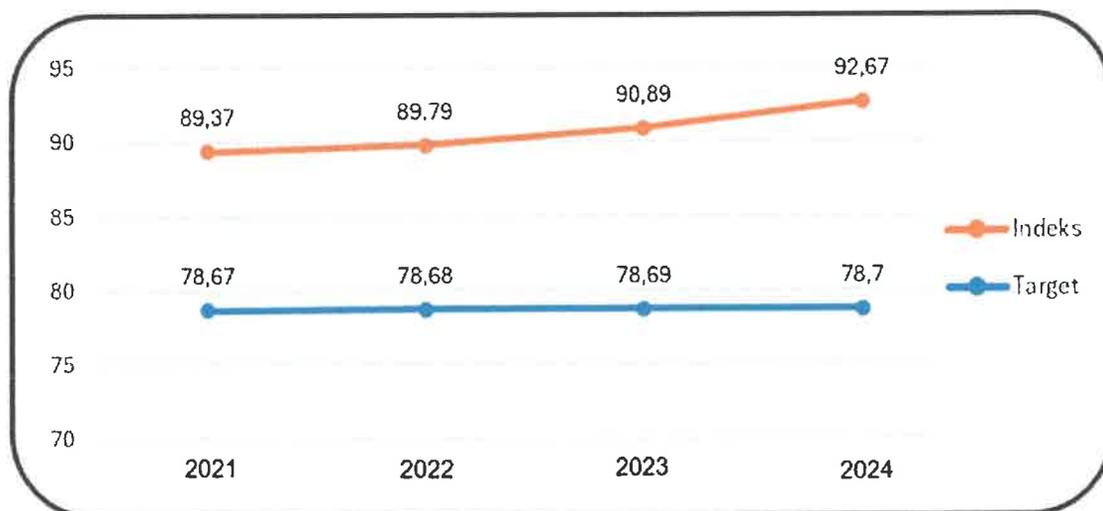
Sasaran dari kegiatan ini ditetapkan dengan indikator kinerja jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “sangat tinggi” dengan nilai minimal 78,70. Sasaran pengukuran indeks berasal dari 10 (sepuluh) Keluarga yang terdiri dari sepuluh Bapak/Ibu dan sepuluh anak sehingga total 20 (dua puluh) orang dari tiap Desa / Kalurahan Bersinar (Bersih Narkoba) di Kabupaten/Kota yang disasar (Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo).

Berdasarkan hasil pengukuran kuesioner indikator ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI (Lampiran 2), Wilayah DIY pada tahun 2024 memperoleh kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai 92,07. Indeks tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai sudah sesuai bahkan melampaui target nilai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 di angka 78,70. Perhitungan kategori “sangat tinggi” tersebut diperoleh dari rata-rata nilai BNNP dan BNNK. Hasil perhitungan nilai/ score indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) wilayah DIY tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data Score Dektara Wilayah DIY

Satuan Kerja	Score Dektara	Kategori
BNNP DIY	92,67	Sangat Tinggi
BNN Kota Yogyakarta	93,30	Sangat Tinggi
BNNK Sleman	90,26	Sangat Tinggi
BNNK Bantul	92,05	Sangat Tinggi
Rata-Rata Provinsi DIY	92,07	Sangat Tinggi

Nilai Dektara BNNP DIY dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mampu mempertahankan predikat kategori “sangat tinggi” dan meningkatkan nilai indeks Dektara tiap tahunnya. Dari yang semula tahun 2021 memiliki nilai 89,37 kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan nilai 89,79 selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2023 dapat memiliki nilai 90,89 dan tahun 2024 ini memperoleh nilai indeks 92,67. Nilai yang diperoleh BNNP DIY sudah sesuai bahkan melampaui target level nasional maupun target Rencana Program Kerja (Renproja) 2021 – 2024 pada tiap tahunnya. Perbandingan capaian *score* indeks ketahanan keluarga BNNP DIY dengan target *score* level nasional dan atau Rencana Program Kerja (Renproja) dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Perbandingan Score Dektara BNNP DIY dengan Target Nasional

Indikator kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba memiliki nomenklatur yang sama mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2024. BNN wilayah DIY hingga tahun 2024 telah membentuk 77 Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang terdiri dari 17 Desa di Kabupaten Sleman, 9 Desa di Kota Yogyakarta, 11 Desa

di Kabupaten Bantul, 11 Desa di Kabupaten Gunungkidul, dan 29 Desa di Kabupaten Kulon Progo. Adapun data dukung indikator ini terdapat pada lampiran 2.

Pada tahun 2024 ini, setiap satuan kerja BNN di wilayah DIY diberikan target sebanyak 2 (dua) Desa yang harus diberikan intervensi terkait kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba. Sehingga total ada 8 Desa yang diberikan intervensi. Pada tahun ini, BNNP DIY fokus pada lokasi di Kabupaten Kulon progo. Sedangkan BNN Kabupaten/Kota fokus lokasinya di wilayah masing-masing. Data Desa Bersinar yang diberikan intervensi kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Desa Bersinar yang Diintervensi Tahun 2024

Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo
1. Sinduadi 2. Sinduharjo	1. Giwangan 2. Wirogunan	1. Bangunharjo 2. Potorono	1. Giripurwo 2. Cerme

Faktor Keberhasilan dalam Mencapai Target Kinerja :

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

- a. Petugas BNNP dan BNNK memiliki persepsi yang sama terkait ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba mulai dari konsep dasar, standar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis, dan prosedur pengukuran yang diberikan BNN RI;
- b. Petugas yang kompeten sehingga dapat menjalin komunikasi yang efektif dan persuasif untuk membantu keluarga (baik orang tua maupun anak) sehingga memiliki ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba;
- c. Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi peningkatan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.

Tantangan dalam Mencapai Target Kinerja :

Tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

- a. Instruksi yang kurang konsisten dari Pembina Fungsi Pusat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga satuan kerja wilayah kurang persiapan dalam melaksanakan kegiatan;

- b. Kemampuan public speaking para penyuluh narkoba maupun staf di wilayah yang belum merata terkait advokasi dan negosiasi untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Peserta kegiatan belum memperoleh pelatihan lanjutan (Training Of Trainer) agar dapat menjadi fasilitator mandiri;
- d. Belum semua Desa Bersinar yang telah diberikan intervensi memiliki komitmen dengan memberikan dukungan anggaran untuk melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba secara berkelanjutan.

Kegiatan peningkatan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dilaksanakan secara efisien baik secara anggaran maupun sumber daya manusia yang belum maksimal, karena sebagian kegiatan dilaksanakan tanpa anggaran DIPA. Dengan keterbatasan tersebut BNNP DIY selalu memanfaatkan jejaring dengan *stakeholder* sehingga kegiatan berhasil diselesaikan.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja :

Berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun yang sudah berjalan, fungsi pencegahan BNNP DIY menyusun rekomendasi untuk mencapai target indikator kinerja yang lebih baik di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dan perencanaan program yang matang serta keterlibatan antar Bidang & Bagian di Satker BNNP dan BNNK, sesuai dengan program kegiatan yang akan diintervensi pada Desa Bersinar serta penyamaan persepsi dalam memilih, menentukan, dan menetapkan lokasi Desa Bersinar yang akan diintervensi supaya hasilnya dapat maksimal dan sesuai target program;
- b. Dilaksanakannya pelatihan public speaking kepada penyuluh narkoba di wilayah dalam rangka peningkatan kemampuan dalam hal advokasi & negosiasi;
- c. Perlu dilaksanakan Training Of Trainer fasilitator bagi peserta program ketahanan keluarga anti narkoba agar dapat menjadi fasilitator mandiri di Desa terkait;
- d. Senantiasa menjalin komunikasi dengan Desa Bersinar yang telah dicanangkan sebelumnya agar berkomitmen melaksanakan kegiatan pencegahan bahaya narkoba bagi keluarga maupun masyarakat secara berkelanjutan.

3. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	3 kabupaten/kota	3 kabupaten/kota	100 %

Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota di DIY yang telah diintervensi program pemberdayaan masyarakat baik oleh BNNP atau BNN Kabupaten/Kota di Wilayah DIY, yang memiliki angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat dalam upaya P4GN yang diukur dalam bentuk Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) berkategori mandiri. Predikat “Mandiri” tersebut menggambarkan masyarakat yang sebelumnya pasif berubah menjadi aktif dan berperan serta dalam program P4GN. Pelaksanaan penilaian pengukuran Indeks kemandirian partisipasi (IKP), dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh BNNP DIY dan BNN Kabupaten/Kota di Wilayah DIY maksimal 3 (tiga) bulan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Pengukuran IKP terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi bagian dari pengurukan, antara lain aspek manusia, aspek metode, aspek anggaran, aspek system, aspek sarana dan prasarana dan kegiatan P4GN. Metode pengolahan data, Nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipasi) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”. Mengingat kriteria dalam lingkungan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka penilaian IKP didasarkan pada tabel sebagai berikut :

Nilai Interval	Nilai Konversi	Kategori	Kriteria Mandiri
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Mandiri
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Mandiri

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2024 telah dilakukan pengukuran kepada 3 (tiga) Kota/Kabupaten di wilayah DIY dengan 2 sasaran lingkungan yaitu Pendidikan dan Masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran IKP pada tahun 2023 di 3 (tiga) Kota/Kabupaten di wilayah DIY dengan kategori “Sangat Mandiri” yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dengan hasil sebagai berikut:

**NILAI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI TAHUN 2024
BNNP/BNNK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SATKER	NILAI IKP			TOTAL INDEKS	KATEGORI
	PEMERINTAH	PENDIDIKAN	MASYARAKAT		
BNN KOTA YOGYAKARTA		3,56	3,69	3,63	SANGAT MANDIRI
BNNK SLEMAN		3,53	3,46	3,50	SANGAT MANDIRI
BNNK BANTUL		3,76	3,71	3,74	SANGAT MANDIRI
Rata-rata IKP di 3 Kabupaten/Kota		3,61	3,62	3,62	SANGAT MANDIRI
BNNP DIY	3,66	-	3,59	3,63	SANGAT MANDIRI

Berdasarkan tabel di atas jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada 3, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, dengan nilai rata-rata IKP yaitu 3.62. BNNP DIY juga melakukan pengukuran IKP untuk Kabupaten Kulon Progo yang telah diintervensi dengan program pemberdayaan Masyarakat oleh BNNP DIY di lingkungan instansi pemerintah dan masyarakat. Hasil pengukuran IKP BNNP DIY dengan sasaran Kabupaten Kulon Progo sebesar 3.63. Adapun data dukung indikator ini terdapat pada lampiran 3.

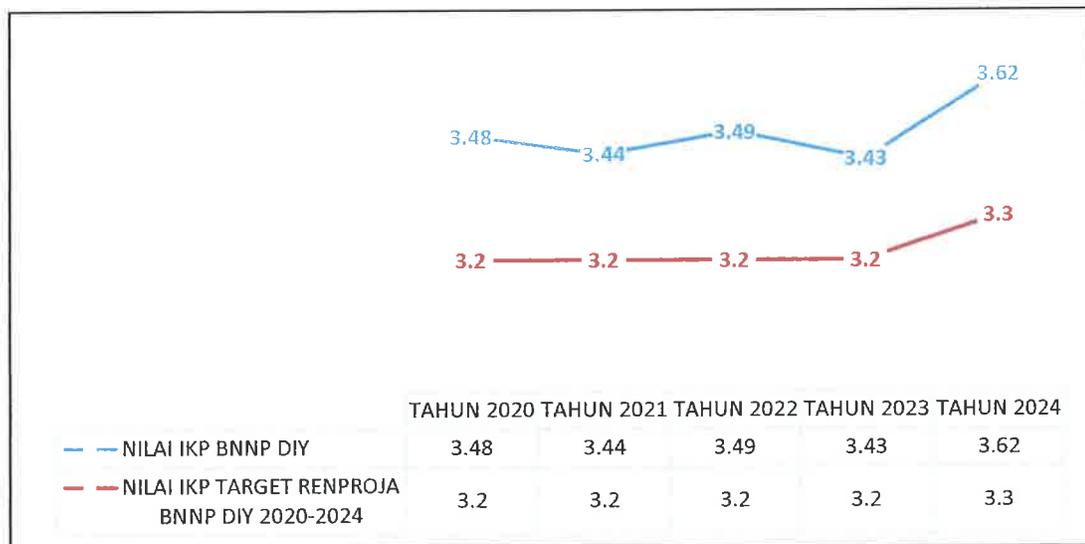
Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja ini telah memenuhi target sesuai dengan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2024). Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai IKP rata-rata Nasional yaitu 3.59, maka Yogyakarta dan Bantul berada di atas nilai rata-rata IKP Nasional.

Renproja BNNP DIY tahun 2020 – 2024, BNNP DIY memiliki target capaian pada sasaran program kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan nilai Indikator Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% capaian
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.3	3.62	109.7%

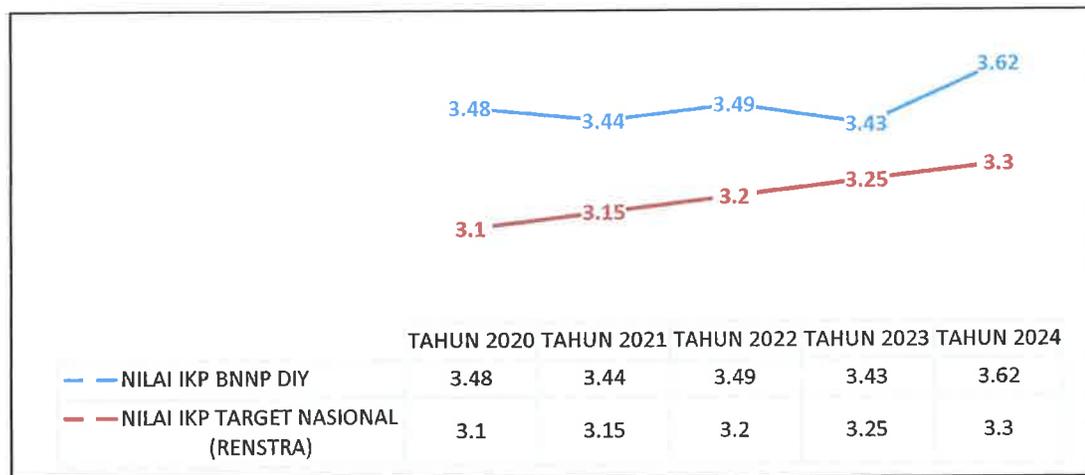
Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi merupakan perwujudan kemandirian partisipasi atau peran serta aktif masyarakat dalam penanganan P4GN. Capaian nilai IKP tahun 2024 untuk 3 kabupaten/kota di wilayah DIY mencapai 3.62. Realisasi nilai IKP tersebut telah sesuai dengan nilai kinerja yang ditargetkan pada Renproja BNNP DIY Tahun 2020-2024, bahkan melampaui dari target yang ditetapkan,

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (1 periode renproja 2020 - 2024) adalah sebagai berikut:



Capaian Nilai IKP Tahun 2024 sebesar 3.62 jika dibandingkan dengan hasil perhitungan IKP Tahun 2023, yaitu sebesar 3.43 maka terdapat kenaikan indeks sebesar 0.19. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nilai IKP berdasarkan Renproja 2020-2024, dari tahun 2020 sampai dengan 2024, nilai IKP BNNP DIY pada tahun 2024 telah melampaui dari target yang ditetapkan di Renproja 2020-2024.

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional adalah sebagai berikut:



Dilihat dari Renstra BNN Tahun 2020 – 2024, target Indeks Kemandirian Partisipasi secara nasional pada tahun 2024 yaitu diangka 3,3, pada tahun ini realisasi BNNP DIY pada angka 3.62, dengan nilai tersebut dapat menyumbang Nilai IKP BNN secara nasional.

Keberhasilan/Kegagalan Dalam Mencapai Target Kinerja

1. Keberhasilan Capaian Kinerja

- a) Nilai IKP untuk target 3 Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 3.62, nilai tersebut telah mencapai dari target yang ditetapkan di Renja/RKT Tahun 2024, Renproja 2020-2024 dan Renstra BNN RI Tahun 2020-2024.
- b) Nilai IKP dengan ketegori sasaran, lingkungan pendidikan memiliki nilai indeks IKP sebesar 3.61, dan lingkungan Masyarakat dinilai 3.62.
- c) Telah terbentuk 240 (dua ratus empat puluh) orang penggiat anti narkoba dari 169 lembaga yang dilaksanakan oleh BNNP dan BNNK di Wilayah DIY. Penggiat yang terbentuk telah diberikan pelatihan oleh BNNP dan BNNK di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kegiatan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba. Penggiat mendapatkan materi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam P4GN yaitu kebijakan dan strategi P4GN, *public speaking*, pengetahuan dasar narkoba, literasi digital, *team work*, motivasi dalam upaya pengembangan karakter, strategi kampanye narkoba dan penyusunan rencana kerja (*action plan*).

JUMLAH PENGGIAT PERAN SERTA MASYARAKAT BNNP DAN BNNK di WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
BNNP/BNNK	JUMLAH LEMBAGA			JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH PENGGIAT
	PEMERINTAH	PENDIDIKAN	MASYARA KAT		
BNNP DIY	28	-	28	56	60
BNNK YOGYAKARTA	-	16	16	32	60
BNNK SLEMAN	-	30	14	44	60
BNNK BANTUL	-	15	22	37	60
TOTAL				169	240

d) Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga berhasil meningkatkan peran institusi/Lembaga/kelompok masyarakat untuk menjalankan beberapa dukungan kegiatan P4GN sebagai berikut:

- 1) menginisiasi institusi/Lembaga/kelompok masyarakat untuk memasang himbauan anti narkoba di lokasi strategis yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
- 2) mendorong inisiatif dari institusi/Lembaga/kelompok masyarakat untuk melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi secara tatapmuka/langsung melalui upacara, rapat, pengajian dll.
- 3) menginisiasi insitusi pendidikan dan kelompok masyarakat di wilayah DIY untuk mengeluarkan regulasi/surat edaran tentang P4GN.
- 4) mendorong rencana pembentukan satgas di institusi pendidikan dan kelompok masyarakat.
- 5) menginisiasi instansi, institusi pendidikan, swasta dan kelompok masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine secara mandiri (melalui anggaran swadaya).

e) Deteksi Dini Melalui Tes Urine Secara Mandiri

Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga mendorong instansi/institusi/dunia usaha/kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan deteksi dini narkoba melalui tes urin secara mandiri (melalui anggaran swadaya) dan fasilitasi BNNP/BNNK dengan total 3.119 orang yang diperiksa dari 29 lembaga.

BNNP/BNNK	Jumlah Lembaga/ Peserta Tes Urine				Total Lembaga	Keterangan
	Instansi Pemerintah	Swasta	Pendidikan	Masyarakat		
BNNP DIY	11 INSTANSI	2 LEMBAGA	2 LEMBAGA	-	15 LEMBAGA	1. POLBANGTAN, 2. PT KAI (PERSERO) BALAI YASA 3. MAHASISWA POLBANGTAN 4. KAJATI DIY 5. BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DIY 6. BSSN 7. BPN KANWIL DIY,KAB. BANTUL DAN SLEMAN 8. ARMADA BUS TERMINAL JOMBOR 9. BIN 10. PT GARUDA MITRA SEJATI 11. KPP PRATAMA WONOSARI 12. LLDIKTI 13. BPMP 14. UNY 15. DJP KANWIL DIY
	1493 ORANG	231 ORANG	427 MAHASISWA & SISWA	-	2151 ORANG	
BNN Kota Yogyakarta	-	-	4 LEMBAGA	1 LEMBAGA	5 LEMBAGA	1. MTSN 1 YOGYAKARTA 2. POLTEKKES BHAKTI SETYA HUSADA 3. SMP N 10 YOGYAKARTA 4. SMKN 4 YOGYAKARTA 5. PERWAKILAN PENGGIAT P4GN DAN KALURAHAN
	-	-	272 SISWA	25 ORANG	297 ORANG	
BNNK SLEMAN	2 LEMBAGA	4 LEMBAGA	2 LEMBAGA	-	8 LEMBAGA	1. BKPP KABUPATEN SLEMAN 2. PT. PIA JUWARA SATOE 3. BDK 4. GRIYA PERSADA CONVETION 5. PDUM TIRTA SEMBADA DAXU 6. SMA SANTA MIKAEL 7. PT. IGPINTERNASIONAL 8. SMP N 4 SLEMAN
	193 ORANG	393 ORANG	60 SISWA	-	646 ORANG	
BNNK BANTUL	-	-	-	1 LEMBAGA	1 LEMBAGA	1. SATGAS ANTINARKOBA KALURAHAN NGESTIHARJO
	-	-	-	25 ORANG	25 ORANG	

2. Kegagalan mencapai target kinerja

- a) Menurunnya angka Indeks Kotan di Kabupaten Sleman dan merubah status ketanggapan wilayah tersebut dari tahun sebelumnya dari Tanggap menjadi “Cukup Tanggap”.
- b) Kebijakan program pemerintah daerah yang belum bersinergi dalam program P4GN.
- c) Kebijakan anggaran pemerintah daerah yang belum bersinergi dalam program P4GN dikarenakan pengalihan anggaran ke PEMILU dan PILKADA.
- d) Beberapa Kabupaten/Kota belum memiliki Peraturan Daerah P4GN.

Dalam meraih keberhasilan Nilai IKP, BNNP DIY dan BNN Kota/Kabupaten Wilayah DIY, selalu menekankan kepada Penggiat P4GN yang sudah dibentuk untuk dapat menemukenali kegiatan P4GN melalui pemanfaatan 5M (*man, method, money, machine* dan *material*) di lingkungan masing-masing. Dengan semakin aktif peran serta masyarakat dalam melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi.

Hambatan yang dihadapi dalam meraih Nilai IKP diantaranya :

1. Belum adanya apresiasi atau sanksi atas pelaksanaan program di wilayah, sehingga motivasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait masih rendah.
2. Beberapa instansi/lembaga tidak memiliki anggaran khusus terkait pelaksanaan tes urin, hal ini dikarenakan diantaranya adanya *refocusing* anggaran, tidak ada anggaran khusus terkait tes urine, atau tingkat urgensi dari tes urin masih rendah untuk lingkungan tempat sekolah/kerjanya.
3. Belum masifnya peran BUMN dan sektor swasta dalam mendukung program P4GN.
4. Belum optimalnya implementasi regulasi P4GN (Permendagri No.12 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN dan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023) di wilayah.
5. Kebijakan anggaran pemerintah daerah yang belum bersinergi dalam program P4GN dikarenakan pengalihan anggaran ke PEMILU dan PILKADA.

Untuk mewujudkan target Nilai IKP, BNNP DIY melaksanakan kegiatan secara efisien dengan jumlah SDM yang belum maksimal dan beberapa anggaran diblokir namun kegiatan tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai output yang telah ditargetkan.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam mengantisipasi terjadinya kegagalan pada pencapaian kinerja BNNP DIY, maka diperlukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun regulasi, program dan anggaran serta merealisasikannya di Rencana Aksi Daerah tentang P4GN di Tahun 2024;
2. Mendorong stakeholder di lingkungan Instansi Pemerintah/Pendidikan/Swasta/Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri baik untuk sosialisasi P4GN, deteksi dini melalui tes urine, pembentukan satgas;
3. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah desa di Wilayah DIY untuk mendukung P4GN di desa melalui pengalokasian anggaran tentang P4GN dengan menggunakan dana desa;
4. Meningkatkan kerja sama dengan BUMN dan swasta untuk mendukung P4GN di Tingkat kabupaten/kota melalui pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	87,38 %	128,50 %

Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah peningkatan kualitas hidup klien yang telah mengikuti layanan rehabilitasi berkelanjutan yang diperoleh dari pengukuran kualitas hidup menggunakan instrumen WHOQoL (*World Health Organization Quality of Life*)-

BREF yang mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil skor WHOQoL saat penerimaan awal rehabilitasi dengan akhir program rehabilitasi. Klien dinyatakan meningkat kualitas hidupnya jika nilai skor WHOQoL akhir lebih tinggi dibandingkan saat awal penerimaan rehabilitasi. Data dukung indikator ini terdapat pada lampiran 4.

Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup telah melebihi target yang telah ditentukan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BNNP DIY, pada tahun 2023, Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup mencapai 73,76% sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu 87,38%.

Realisasi kinerja selama 1 periode renproja 2020-2024 tidak dapat dibandingkan seluruhnya karena nomenklatur Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup belum ditetapkan pada Renproja BNNP DIY karena mangacu pada Renstra BNN.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional pada tahun 2024 dapat ditinjau dari hasil prosentase peningkatan kualitas hidup klien di BNNP DIY dan hasil rata-rata secara nasional. Prosentase peningkatan kualitas hidup klien di BNNP DIY adalah 87,38% sedangkan hasil nasional adalah 85,01% yang artinya hasil capaian kinerja BNNP DIY lebih tinggi dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target

- Adanya peran aktif konselor dalam melaksanakan pendekatan terhadap klien selama proses konseling pada saat layanan rehabilitasi sampai dengan layanan pascarehabilitasi, sehingga dapat membantu klien dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengukuran kualitas hidup

- Klien yang mengikuti layanan rehabilitasi mengalami drop out atau tidak datang kembali dalam konseling.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerjanya, bidang Rehabilitasi BNNP DIY menggunakan anggaran sesuai DIPA T.A. 2024 secara efisien, dibuktikan dengan anggaran pengukuran kualitas hidup ditargetkan untuk 45 klien namun BNNP DIY berhasil melakukan pengukuran kualitas hidup terhadap 83 klien.

Rekomendasi perbaikan kinerja

- Petugas rehabilitasinya akan terus meningkatkan dan memaksimalkan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang diberikan kepada klien,
- Melakukan koordinasi dengan pembina fungsi untuk penambahan dukungan anggaran guna pelaksanaan pengukuran kualitas hidup klien.

5. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %

Jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Petugas IBM merupakan anggota masyarakat yang dipilih dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) oleh Kelurahan setempat yang ditunjuk sebagai lokasi unit IBM yang bertugas sebagai Agen Pemulihan (AP). Agen pemulihan memiliki tugas pemetaan, penjangkauan, layanan IBM, dukungan pemulihan terhadap penyalahguna narkoba di lingkungannya. Selain itu AP juga dapat melakukan rujukan ke tempat layanan rehabilitasi lebih lanjut. Adapun anggota masyarakat yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Agen Pemulihan antara lain penggiat dan relawan anti narkoba, kelompok peduli (anggota karang taruna, kader PKK dan lain-lain), anggota lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, mantan pecandu (*recovery addict*) serta tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan desa).

Realisasi jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sudah sesuai target di RKT 2024, target yang ditetapkan 10 orang Agen Pemulihan (AP) dan realisasinya adalah 10 orang (AP) yang mengikuti pelatihan, sedangkan realisasi kinerja jika kita bandingkan dengan target jangka menengah (Renproja) untuk indikator petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 20 Agen Pemulihan,

diawal tahun 2024 BNN RI memberikan target yang disesuaikan dengan anggaran yang diturunkan ke BNNP DIY hanya mencukupi untuk melakukan pelatihan terhadap 10 Agen Pemulihan. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 5.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun tahun sebelumnya, setiap tahunnya target pelatihan bagi petugas IBM mengalami peningkatan sesuai dengan penambahan jumlah unit IBM yang operasional, realisasinya pun setiap tahun selalu tercapai. Hal ini diartikan bahwa BNNP DIY mampu memenuhi realisasi kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun rinciannya sebagai berikut :



Target jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada TA 2024 dilevel nasional adalah sebanyak 900 orang, BNNP DIY diberikan target 10 petugas yang harus dilakukan pelatihan. Dengan terealisasinya target BNNP DIY diharapkan dapat membantu pencapaian target kinerja BNN secara nasional.

Faktor Keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja:

1. Antusiasnya Agen Pemulihan yang mengikuti pelatihan.
2. Adanya peningkatan skor pretest dan post test yang diikuti oleh Agen Pemulihan untuk melihat perbedaan Agen Pemulihan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.
3. Kegiatan IBM Agen Pemulihan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dimulai dari sosialisasi, pemetaan, penjangkauan, layanan interensi wajib serta layanan intervensi pilihan dengan baik dan lancar dan mencapai target klien yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Indikator ini adalah

- adanya pendekatan petugas rehabilitasi terhadap Kalurahan dalam pemilihan Agen Pemulihan yang berkompeten.

Hambatan dalam pelaksanaan penyelenggara layanan IBM yang terlatih :

- a. Agen Pemulihan merupakan perangkat desa yang memiliki tanggung jawab pekerjaan masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya beberapa kali mengalami jadwal yang bersamaan dengan pelatihan.
- b. Bimtek ini dilaksanakan dalam 1 lokasi yang tidak sesuai dengan wilayah domisili masing-masing kalurahan tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang lebih bagi Agen Pemulihan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ditunjukkan dengan keterbatasan anggaran yang dikeluarkan dalam indikator ini, kegiatan yang sedianya dilaksanakan dalam 1 unit IBM disetiap 1 lokasi digunakan untuk kegiatan 2 Unit IBM dalam 1 lokasi.

Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan kinerja :

- a. Agen pemulihan dapat diambil dari berbagai lapisan masyarakat yang waktunya *fleksibel* dapat disesuaikan jika ada pelatihan sehingga dapat maksimal dalam mengikuti tahapan-tahapan pelatihannya.
- b. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan bimtek bagi petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

6. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi adalah jumlah lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar

layanan. Lembaga dikategorikan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) apabila memenuhi 70% s.d. 85% dari persyaratan umum dan khusus dari instrumen SNI 8807-2022.

Untuk mencapai Standar Pelayanan Rehabilitasi Nasional maka dilakukan bimbingan teknis secara periodik di lembaga rehabilitasi milik BNNP/BNNK maupun mitra. Pada tahun 2024, bimbingan teknis lembaga rehabilitasi dilakukan terhadap 17 lembaga rehabilitasi milik BNNP/BNNK maupun mitra yang tersebar di BNNP/BNNK Kota/Kab wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah bimbingan teknis dilakukan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi dan evaluasi/penilaian SPM di akhir tahun menggunakan instrumen SNI 8807-2022. Data dukung Indikator ini dapat dilihat pada lampiran 6.

Berikut merupakan daftar lembaga rehabilitasi mitra BNN di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan Bimbingan Teknis pada tahun 2024:

No	Satuan Kerja	Lembaga Rehabilitasi
1.	BNNP D.I. Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Kota Yogyakarta 2. RSUD Wates 3. Griya Pemulihan Siloam 4. Ponpes Al Islamy 5. Klinik Pratama Wira Patria BNN Kota Yogyakarta
2.	BNNK Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Sleman 2. Lapas Narkotika Kelas Ila Yogyakarta 3. RS Mitra Paramedika 4. PABM Nawacita 5. Ponpes Bidayatussalikin
3.	BNN Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Mergangsan 2. RS Bethesda 3. RSK Puri Nirmala
4.	BNNK Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Panembahan Senopati 2. Puskesmas Kasihan 2 3. RS Nur Hidayah 4. Yayasan Anugerah Tuhan Hafara

Realisasi jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi pada tahun 2024 memenuhi target yang telah ditentukan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2024) yaitu 1 (satu) Lembaga yaitu Klinik Pratama Wira Patria BNN Kota Yogyakarta.

Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional merupakan wujud peningkatan layanan rehabilitasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat. Target jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun ini tidak sesuai dengan jumlah lembaga yang telah ditargetkan pada Renproja BNNP DIY pada T.A. 2024 yaitu 2 lembaga. Penetapan target yang berbeda ini menimbang kondisi di lapangan di tahun 2024 yaitu banyaknya lembaga rehabilitasi yang terhambat operasionalisasinya sejak tidak mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial, sehingga sulit untuk dapat memenuhi target SNI 8807:2022. Oleh sebab itu, penetapan kinerja tahun 2024 telah ditentukan sebanyak satu lembaga dan capaian jumlah lembaga telah memenuhi target tersebut.

Realisasi kinerja selama 1 periode Renproja 2020-2024 tidak dapat dibandingkan seluruhnya karena nomenklatur dan definisi operasional target kinerja pada tahun 2020 berbeda dengan tahun 2021 s.d 2024. Pada tahun 2021, pencapaian target kinerja diukur menggunakan instrumen Standar Pelayanan Minimal, sedangkan pada tahun 2022 pengukuran menggunakan instrumen SNI 8807:2019, serta tahun 2023 dan 2024 menggunakan instrumen SNI 8807: 2022. Ketiga instrumen memiliki standar yang berbeda, dengan instrumen SNI 8807 menggunakan standar yang lebih tinggi dibandingkan instrumen SPM sehingga menyebabkan penurunan jumlah target dan capaian lembaga yang dapat memenuhi standar tersebut.

Capaian kinerja dari tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Dilihat dari Renstra BNN, target Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar pada T.A 2024 secara nasional yaitu di angka 90 lembaga dan tercapai sebanyak 48 lembaga. Dalam hal ini BNNP DIY diberikan target 1 lembaga dengan harapan membantu pencapaian target kinerja BNN secara nasional.

Faktor Keberhasilan dalam mencapai target kinerja adalah adanya komitmen yang kuat dari lembaga untuk peningkatan standar layanan dan kemampuan dari lembaga untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan yang masih ada. Selain itu, bimbingan teknis dilakukan secara intensif dan rutin oleh petugas meski tanpa didukung oleh penganggaran, sehingga dapat dilakukan pendampingan bagi lembaga dalam pemenuhan elemen yang perlu dipenuhi di instrumen SNI 8807:2022.

Dalam mewujudkan target, Bidang Rehabilitasi BNNP DIY menggunakan anggaran sesuai DIPA T.A. 2024 secara efisien, memaksimalkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada, serta memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang tersedia.

Kendala atau hambatan dalam mencapai target kinerja adalah:

- Komitmen yang rendah dari lembaga untuk memenuhi standar layanan terutama untuk lembaga di mana layanan rehabilitasi adalah fungsi layanan tambahan dan tidak diwajibkan oleh instansi induk dari lembaga tersebut.
- Perubahan struktur di Kementerian Sosial yang menyebabkan konselor dan pekerja sosial milik Kementerian Sosial yang ditugaskan di IPWL tidak lagi ditugaskan hanya untuk menjalankan layanan rehabilitasi narkoba saja namun juga masalah sosial lainnya, menyebabkan layanan rehabilitasi di IPWL tidak bisa berjalan optimal dan beberapa tidak bisa berjalan/tidak operasional.

Dalam hal efisiensi atas penggunaan sumber daya, bidang Rehabilitasi BNNP DIY memaksimalkan anggaran DIPA T.A. 2024 untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi sesuai SNI 8807:2022. Efisiensi terjadi karena dengan keterbatasan anggaran, BNNP DIY melakukan pendampingan rutin baik secara tatap muka maupun virtual bagi lembaga rehabilitasi mitra BNN walau tidak didukung oleh penganggaran, sehingga aspek SNI lembaga dapat dipenuhi.

Rekomendasi perbaikan kinerja:

- Adanya tindak lanjut/apresiasi bagi lembaga yang telah dapat memenuhi aspek SNI 8807:2022, misalnya dalam bentuk sertifikat, SK Kepala BNN, atau surat penetapan penunjukan bagi lembaga tersebut untuk menjadi instansi utama rujukan klien rehabilitasi baik sukarela maupun proses hukum.
- Dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi lembaga. Dengan demikian, kegiatan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi dapat dilakukan secara lebih intensif.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	8 Unit	8 Unit	100 %

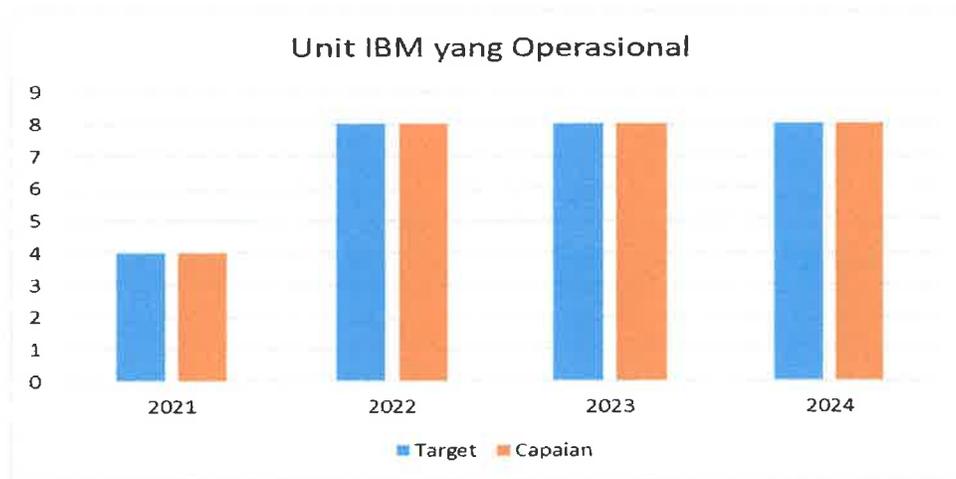
Jumlah Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah banyaknya unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja pada jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional sesuai dengan target RKT 2024 yaitu 8 Unit IBM, yang merupakan target BNN Wilayah DIY, antara lain BNNP DIY yaitu Kalurahan Giripurwo dan Kalurahan Cerme Kulon Progo, BNNK Sleman yaitu Kalurahan Sinduharjo dan Kalurahan Sinduadi, BNN Kota Yogyakarta yaitu Kelurahan Giwangan, Kelurahan Wirogunan, serta BNNK Bantul yaitu Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Potorono, dan dari ke-8 Unit IBM tersebut mendapatkan fase perkembangan Prima, dimana seluruh komponen tata Kelola sampai dengan pencatatan dan pelaporan IBM sudah dilaksanakan dengan baik, dukungan masyarakat, jejaring kerja IBM juga sudah dibangun. Dari jumlah yang ditargetkan tersebut BNNP DIY mampu menyelesaikan sesuai target RKT, serta melaksanakan seluruh kegiatan IBM dengan baik.

Di dalam Renproja BNNP DIY target Indikator kinerja ini ditargetkan sejumlah 4 unit, dikarenakan anggaran yang diturunkan dari BNN RI hanya mencukupi untuk 2 Unit IBM yang operasional saja maka target nya menyesuaikan yaitu 2 unit IBM untuk BNNP DIY. Dengan total realisasi keseluruhan BNNP DIY dan jajarannya sebanyak 8 Unit IBM. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 7.

Penyelenggara layanan rehabilitasi IBM ini merupakan pembentukan Unit IBM yang dilakukan di BNN Wilayah DIY dan telah melaksanakan seluruh rangkaian layanan IBM, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bidang rehabilitasi BNNP

DIY pada kurun waktu tersebut berhasil mencapai target yang telah ditentukan, dengan rincian sebagai berikut :



Target nasional Unit IBM yang operasional sesuai Renstra BNN adalah 148 unit IBM yang tersebar di BNNP dan BNNK di seluruh Indonesia, untuk BNN Wilayah DIY diberikan target sebesar 8 Unit IBM yang operasional, BNNP DIY dan BNNK jajarannya masing-masing ditargetkan 2 Unit IBM, dengan demikian BNNP DIY telah membantu pencapaian target nasional Deputi Bidang Rehabiltiasi BNN RI.

Faktor Keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja :

- Adanya koordinasi dan pendampingan dari BNNP DIY terhadap perangkat desa/Kalurahan Giripurwo dan Kalurahan Cerme dalam melaksanakan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat;
- Sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM TA.2024 oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI terhadap fase perkembangan Unit IBM BNN Wilayah DIY, yang dinilai dari pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM adalah 8 Unit IBM masuk dalam fase perkembangan prima.

Upaya nyata yang dilakukan agar Unit IBM dapat beroperasi :

- Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak perangkat desa/Kalurahan setempat;
- Petugas rehabilitasi selalu melakukan pendampingan saat kegiatan IBM berlangsung.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja ini :

- Dilihat dari segi waktu, dikarenakan kesibukan Agen Pemulihan dan klien dalam pekerjaannya masing-masing sehingga layanan IBM susah untuk diselenggarakan, dan upaya yang dilakukan adalah kegiatan IBM dilaksanakan pada malam hari setelah Agen Pemulihan dan klien selesai bekerja.

Untuk mewujudkan Unit IBM yang operasional Bidang Rehabilitasi BNN Wilayah DIY menggunakan anggaran sesuai DIPA T.A. 2024 secara efisien, memaksimalkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada, serta mendorong masing-masing Kalurahan / Unit IBM untuk mendukung terselenggaranya kegiatan IBM ini dengan anggaran di masing-masing Kalurahan.

Rekomendasi dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

- BNN dapat memberikan apresiasi terhadap petugas Agen Pemulihan,
- Adanya kompensasi anggaran untuk petugas rehabilitasi yang sering melaksanakan kegiatan IBM diluar jam kantor.

7. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
8.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60 Indeks	3,79 Indeks	105,27 %

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah survei kepuasan masyarakat/penerima layanan rehabilitasi yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di lembaga rehabilitasi yaitu klinik pratama milik BNNP DIY. Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mengatur tentang bagaimana sebuah kebijakan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Pengukuran ini dilakukan menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang dibuat oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI. Aplikasi ini untuk memudahkan pengguna dalam proses pengumpulan dan pengolahan data dari responden, sehingga dapat menghasilkan statistik dan laporan dalam bentuk digital yang mudah diakses dan digunakan. Menurut Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Indeks kepuasan ini adalah upaya untuk mengevaluasi mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN, dengan melihat 9 unsur antara lain:

1. Persyaratan pelayanan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk, spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Dari hasil pengukuran, didapatkan Nilai Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN untuk BNNP DIY di angka 3,79 indeks dengan kategori Sangat Baik (dari target yang ditetapkan yaitu 3,6). Sedangkan untuk hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat penerima layanan rehabilitasi di BNN Wilayah DIY, diperoleh nilai Indeks 3,83. Dengan demikian BNNP DIY mampu mencapai nilai indeks kepuasan melebihi target yang telah ditentukan. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 8.

Realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renproja), Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN melebihi target yang ditentukan. Target IKM di Renproja 3,2 berbeda dengan target RKT 2024 yaitu 3,6 karena target RKT disesuaikan dengan capaian IKM dari hasil penilaian di tahun sebelumnya sebagai acuan. Penilaian di tahun sebelumnya yang melebihi target menyebabkan penetapan RKT yang lebih tinggi daripada Renproja namun demikian BNNP DIY mampu memenuhi target tersebut.

Dari hasil analisa target dan realisasi indikator kinerja dari tahun ke tahun, diketahui bahwa BNNP DIY mampu memenuhi target yang telah ditentukan dengan hasil yang maksimal seperti digambarkan pada diagram berikut :



Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Rehabilitasi rawat jalan secara nasional BNN tahun 2024 adalah 3.62 dengan kategori sangat baik, demikian BNNP DIY dapat menyumbang nilai yang maksimal untuk mensukseskan target nasional. Adapun hasil survei skor tertinggi pada unsur sarana sebesar 3,84 dan terendah pada persyaratan sebesar 3,69. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pemahaman klien terhadap persyaratan administrasi yang dilakukan sebelum proses rehabilitasi atau pada saat pendaftaran layanan rehabilitasi walaupun.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, BNNP DiY melaksanakan secara efisien tanpa anggaran dan dengan keterbatasan SDM kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Faktor Keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja :

- Klinik Seger Waras BNNP DIY memberikan pelayanan terhadap klien rehabilitasi dengan baik, sehingga klien mendapatkan manfaatnya;
- Adanya Survei layanan rehabilitasi BNNP DIY dapat memberikan saran dan kritik yang membangun untuk meningkatkan layanan rehabilitasi BNNP DIY setiap tahunnya.

Hambatan yang dialami pada indikator ini adalah :

- Dikarenakan survei yang dilakukan berbentuk daring, terkadang klien lupa untuk mengisi jika tidak dilakukan saat itu juga;
- Beberapa klien tidak memiliki gawai yang kompatibel untuk membuka link survei indeks penerima layanan rehabilitasi tersebut.

Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan kinerja selanjutnya:

- Klien dapat diarahkan untuk melakukan pengisian survei setelah melakukan konseling di Klinik BNNP DIY, sehingga memudahkan pengisian bagi klien yang terbatas/tidak memiliki gawai untuk pengisian survei. Selain itu petugas dapat melakukan pendampingan dalam pengisian sehingga dapat membantu klien jika memiliki kesulitan dalam pengisian survei;
- Hasil dari penilaian bagi unsur yang memiliki nilai kurang baik seperti persyaratan akan dijadikan evaluasi misalnya melalui informasi persyaratan yang lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan, serta memberikan bimbingan terhadap pengguna layanan pada saat mereka melengkapi persyaratan dalam mengikuti layanan rehabilitasi di Klinik Seger Waras BNNP DIY.
- Hasil penilaian per unsur dapat dijadikan bahan masukan bagi pelaksanaan layanan rehabilitasi di Klinik BNNP DIY agar pelayanan semakin meningkat.

8. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
9.	Jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang P-21	9 Berkas Perkara	19 Berkas Perkara	211,11 %

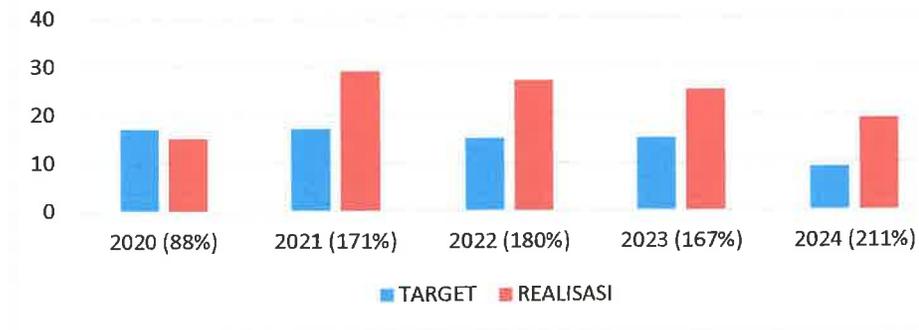
Jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang P-21 adalah banyaknya berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana Narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana Narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari BNNP DIY.

Target Indikator Kinerja ini sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) T.A. 2024 dimana BNNP DIY menetapkan target 9 Berkas Perkara. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, BNNP DIY berhasil mencapai realisasi bahkan melebihi target pada RKT-2024 yaitu sebanyak 19 Berkas Perkara, dimana 2 Berkas Perkara hasil pemberkasan yang belum P21 di tahun Tahun 2023 dan 17 Berkas Perkara hasil penyelesaian di Tahun 2024.

Jika dilihat dari Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP DIY tahun 2020-2024, indikator kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang P-21 jumlah target nya selalu berbeda, hal ini disesuaikan dengan anggaran yang ada dimana BNN RI selaku pembina fungsi berhak mengatur target dan anggaran terhadap instansi di wilayahnya dengan disesuaikan kondisi per wilayah masing-masing. Sehingga BNNP DIY pada tahun 2024 diberi target 9 berkas perkara. Dari target tersebut BNNP DIY mampu menyelesaikan kasus sebanyak 19 berkas perkara atau melebihi dari target yang telah ditetapkan, Data dukung indikator ini ada pada lampiran 9.

Perbandingan capaian jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang P-21 setiap tahunnya selalu melebihi target yang diberikan

JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA YANG P-21



Secara nasional, dilihat dari Renstra BNN target untuk jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang P-21 meningkat setiap tahunnya dengan target 625 berkas perkara pada Tahun 2020, 650 berkas perkara pada Tahun 2021, 675 berkas perkara pada Tahun 2022, 700 berkas perkara pada Tahun 2023, 725 berkas perkara pada Tahun 2024, dan BNNP DIY selalu melampaui target sehingga mampu memberikan andil atas keberhasilan target nasional BNN RI.

Dengan pencapaian realisasi jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang P-21 yang melebihi target, hal ini merupakan keberhasilan Bidang Pemberantasan BNNP DIY dan BNNK di wilayah DIY dalam mencapai target kinerja.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target Pada Indikator Ini :

- Sinergitas BNNP DIY dengan instansi terkait antara lain Kejaksaan Tinggi, Polda, Bea Cukai, dll;
- Kualitas SDM dalam upaya penyidikan (P4GN);
- Anggaran DIPA yang memadai;
- Komitmen atau tekad yang kuat dalam pemberantasan dan penegakan hukum dilakukan secara profesional.

Hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah:

- Anggaran DIPA yang kurang maksimal;
- Kuantitas dan kualitas personil yang mendukung bidang Pemberantasan;
- Kurangnya dukungan peralatan IT/Alsus dalam upaya pemberantasan Narkotika di lapangan maupun dalam pelaksanaan tugas yang lain;
- Keterbatasan wilayah dalam melakukan tindakan, karena pensuplay berada di luar wilayah DIY;

- d. Keterbatasan wilayah dalam melakukan tindakan, karena penyuplay berada di luar wilayah DIY;
- e. Kemajuan teknologi sangat cepat yang digunakan para pelaku kejahatan Narkotika menuntut agar tim pemberantasan waspada terhadap perkembangan teknologi.

Bidang Pemberantasan BNNP DIY dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai DIPA T.A. 2024 secara efisien meskipun mengalami *Automatic Adjustmen (AA)*. Dalam keterbatasan personil, Bidang Pemberantasan BNNP DIY dapat memaksimalkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada, serta memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang tersedia.

Rekomendasi untuk Penyempurnaan Pencapaian :

- Dukungan anggaran DIPA;
- Penambahan personil bidang pemberantasan;
- Diklat lidik sidik / peningkatan kemampuan petugas;
- Dukungan peralatan yang merupakan alat intelijen khusus (alsus) antara lain DF, akses CP, portable xray sebagai deteksi dini karena modus operandi dalam perkara yang ditangani oleh BNNP DIY kebanyakan berasal dari Perusahaan Jasa Titipan.

9. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
10.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100 %

Tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan yang meliputi : tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas. Pengukuran dilakukan dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian dan hilangnya nyawa

Metode pengukuran indikator Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah :

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	$\frac{\text{Jumlah tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$	$= \frac{(21-0)}{21} \times 100\%$ = 100 %	<p>a : jumlah tahanan yang kabur</p> <p>b : jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian</p> <p>c : jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas</p>

Realisasi Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan BNNP DIY pada tahun 2024 memenuhi target sesuai dengan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP DIY tahun 2024.

Secara Nasional yang ditargetkan di dalam Resntra BNN, Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan BNNP DIY di targetkan di angka 100 indeks dengan realisasi diangka 100 indeks juga. Begitu pun indeks pertahunnya sedangkan output capaiannya pada setiap tahun direntang waktu tahun 2020–2024 adalah 100 indeks.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Indikator pada tahun tahun sebelumnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini dengan nilai realisasi yang stabil pada angka 100 pada lima tahun terakhir.

Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan BNNP DIY Tahun 2024



Dilihat dari Renstra BNN, target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan BNNP DIY Tahun 2024 adalah 100, sesuai dengan Renstra BNN Tahun 2020-2024 dengan target nilai 100 setiap tahunnya pada Tahun 2020-2024 karena diharapkan di BNNP DIY khususnya dan BNN-RI umumnya tidak ada tahanan yang meninggal mendadak tidak wajar, sakit dan atau terluka akibat kelalaian petugas maupun perkelahian antar tahanan. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 10

Faktor Keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja dengan pencapaian realisasi Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan BNNP DIY di angka 100 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini merupakan keberhasilan Bidang Pemberantasan BNNP DIY dan BNNK di wilayah DIY dalam mencapai target kinerja. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penjagaan tahanan tentunya tidak lepas dari kerjasama dari seluruh personil Bidang Pemberantasan khususnya dan personil BNNP DIY umumnya, dan juga pengelolaan sumber daya yang ada dengan baik, hal ini terlihat dari kemampuan pengelolaan anggaran dengan serapan sebesar 99,99% dengan jumlah tahanan yang melebihi target. Jumlah tahanan yang ditargetkan adalah sebanyak 15 orang dengan realisasi jumlah tahanan sejumlah 21 orang atau sebesar 140% dari target yang telah ditetapkan.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahanan diantaranya sebagai berikut:

- belum adanya personil khusus yang melaksanakan jaga tahanan. Personil jaga tahanan melibatkan penyidik, analis intel dan staff Bidang Pemberantasan lain yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan pekerjaan tersebut;

- sarana dan prasarana yang masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini juga diharapkan dapat segera dipenuhi seperti penambahan kamera cctv, penambahan pintu besi, penambahan jeruji besi, dan juga penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan penjagaan dan pengawasan tahanan.

Bidang Pemberantasan BNNP DIY dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tahanan telah menggunakan anggaran sesuai DIPA T.A. 2024 secara efisien, memaksimalkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada, serta memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Personil Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Wastahti) berjumlah tiga orang yang terdiri dari Kepala Seksi, satu Pengolah Data, dan satu Pengadministrasian Umum. Seksi Wastahti tidak memiliki personil penjaga tahanan yang menjadi personil utama dalam pelaksanaan penjagaan dan pengawasan tahanan. Kegiatan penjagaan dan pengawasan tahanan dibantu oleh personil dari seksi lain dari Bidang Pemberantasan dan Intelijen.

Pengelolaan anggaran pengawasan tahanan pada tahun 2024 juga dilakukan secara efisien dengan persentase penyerapan sebesar 99,97% dan realisasi jumlah tahanan yang diawasi sebanyak 21 orang dengan target yang telah ditentukan sebanyak 15 orang. Persentase realisasi jumlah tahanan yang dijaga dan diawasi sebesar 140% dari target yang telah ditentukan.

Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan :

- Mengajukan permohonan personil penjaga tahanan.
- Mengajukan penambahan fasilitasi untuk meningkatkan keamanan seperti penambahan pintu besi, penambahan jeruji pada jendela dan pintu sel, dan penambahan kamera cctv.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
11.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100 %

Definisi operasional tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika. Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan saat dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan

(tahap II). Metode pengukuran indikator Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika adalah :

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil	Keterangan
1.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	$= \frac{\{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{22}\}}{y} \times 100 \%$ $= \frac{\{1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1\}}{14} \times 100 \%$ $= \frac{14}{14} \times 100 \%$ $= 100$	100 %	<p>a_1= untuk barang bukti 1 a_2= untuk barang bukti 2 , dst y= jumlah BA (penitipan),</p> <p>Dengan asumsi: Jumlah BA penitipan = Jumlah BA pengeluaran</p>

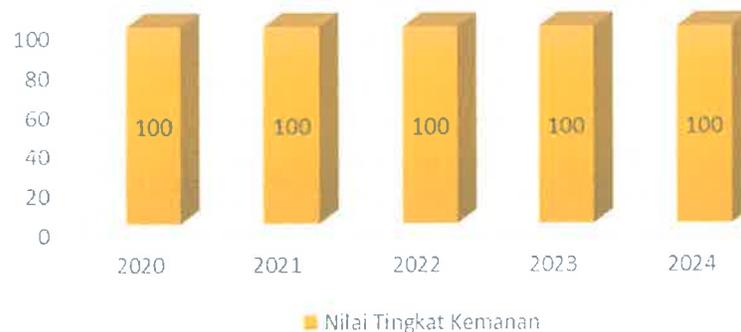
Dari formula atau rumus diatas diperoleh bahwa Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika sebesar 100. Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika selalu dalam keadaan baik dari tahun ke tahun terbukti dengan jumlah barang bukti masuk dan keluar yang selalu sama tanpa selisih.

Realisasi Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika BNNP DIY pada tahun 2024 memenuhi target sesuai dengan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2024). Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika BNNP DIY pada RKT tahun 2024 ditargetkan di angka 100 indeks sedangkan output capaiannya adalah juga 100 indeks.

Realisasi Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika BNNP DIY pada tahun 2024 memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Renproja BNNP DIY 2020—2024. Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika BNNP DIY pada Renproja BNNP DIY 2020–2024 ditargetkan di angka 100 indeks pertahunnya sedangkan output capaiannya pada setiap tahun direntang waktu tahun 2020–2024 adalah 100 indeks. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 11.

Perbandingan realisasi Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika BNNP DIY periode 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik dibawah ini dengan nilai yang stabil pada angka 100 pada empat tahun terakhir.

Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika Tahun 2024



Dilihat dari Renstra BNN, target Nasional Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika BNNP DIY BNNP DIY Tahun 2024 adalah 100, sesuai dengan Renstra BNN Tahun 2020-2024 dengan target nilai 100 setiap tahunnya pada Tahun 2020-2024 karena diharapkan barang bukti yang didapatkan dalam pengungkapan kasus dapat dikelola dengan baik yang ditandai dengan kuantitas barang bukti yang masuk dan keluar tidak ada selisih karena sebab yang tidak diinginkan seperti rusak ataupun hilang karena kelalaian petugas.

Faktor keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja, dengan pencapaian realisasi Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika BNNP DIY BNNP DIY di angka 100 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini merupakan keberhasilan Bidang Pemberantasan BNNP DIY dan BNNK di wilayah DIY dalam mencapai target kinerja, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama dari seluruh personil Bidang Pemberantasan khususnya.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- belum adanya personil khusus yang melaksanakan pengawasan dan pengelolaan barang bukti. Personil khusus yang dimaksudkan disini adalah, personil yang telah mendapatkan *training/diklat/bimbingan* teknis dalam pengelolaan barang bukti;
- kurangnya fasilitas dalam perawatan barang bukti juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Kekurangan fasilitas tersebut diantaranya adalah tidak adanya cctv di dalam gudang barang bukti, dan kurangnya pengatur suhu di ruangan penyimpanan barang bukti, hal ini terkait dengan perawatan barang bukti narkotika yang berupa bahan kimia sehingga

barang bukti yang disimpan tersebut tidak mengalami kerusakan akibat kelembaban maupun suhu yang terlalu panas;

- Belum adanya standar atau SOP yang disosialisasikan oleh BNN-RI dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan perawatan barang bukti narkotika maupun non narkotika.

Bidang Pemberantasan BNNP DIY dalam melaksanakan kegiatan pengawasan barang bukti telah menggunakan anggaran sesuai DIPA T.A. 2024 secara efisien, memaksimalkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada, serta memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Personil Seksi Wastahti yang terbatas dan hanya berjumlah tiga orang melaksanakan tugas pengawasan, perawatan dan administrasi barang bukti dan juga tahanan. Penyerapan anggaran pengawasan barang bukti pada tahun 2024 adalah sebesar 99,99%. Terdapat anggaran yang tidak terserap yaitu dari anggaran pemusnahan barang bukti dikarenakan selama tahun 2024 hanya dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sebanyak 3 kali kegiatan yaitu 2 kali pemusnahan barang bukti berupa sabu dan 1 kali pemusnahan berupa ganja.

Rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan kinerja adalah:

- meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan barang bukti, hal ini dapat tercapai dengan adanya diklat/*training*/bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan dan pengawasan barang bukti oleh pembina fungsi, termasuk standarisasi proses terkait penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, perawatan dan pengeluaran barang bukti narkotika maupun non narkotika;
- Penambahan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengamanan dan perawatan barang bukti seperti kamera CCTV di gudang barang bukti, pintu besi, dan alat pengatur kelembaban dan suhu untuk gudang barang bukti;
- Standarisasi proses pengawasan dan perawatan barang bukti.

10. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efisien Dan Efektif

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
12.	Nilai Kinerja Anggaran BNNP DIY	88	99,97	113,60
		Indeks	Indeks	%

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah Capaian atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari hasil olah data pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan perwujudan dalam proses peningkatan manajemen kinerja secara efektif dan efisien, Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNNP DIY pada tahun 2024 telah memenuhi target seperti yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun pada Renproja BNNP DIY. Target NKA pada RKT tahun 2024 sebesar 88 Indeks sedangkan target pada Renproja sebesar 90 Indeks. Dari target tersebut didapat angka realisasinya berdasarkan perhitungan pada aplikasi SMART Kemenkeu yaitu 99,97 Indeks yang merupakan penjabaran dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 99,93. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 12.

Perbandingan capaian NKA BNNP DIY untuk periode 5 (lima) tahun terakhir bisa dilihat pada grafik dibawah ini, dengan hasil yang belum stabil setiap tahunnya dikarenakan beberapa variabel tidak terpenuhi untuk syarat pencapaian target NKA, salah satunya Capaian Relaisasi Output (CRO) yang tidak maksimal pada tahun 2021 dan 2023. Menganalisa dari data-data tersebut, pada tahun 2024 BNNP DIY berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan memaksimalkan relisasi anggaran dan CRO sehingga dari target 88 Indeks tercapai 99,97 Indeks.

Grafik 12.1
Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran
Th. 2020 s.d 2024



Dilihat dari Renstra BNN, target Nilai Kinerja Anggaran BNN T.A 2024 secara nasional yaitu diangka 90 Indeks, dalam hal ini BNNP DIY mencapai realisasi lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 99,97 Indeks, dapat diartikan BNNP DIY memberikan sumbangsih Nilai Kinerja Anggaran maksimal untuk target nasional NKA.

Faktor Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator :

- Persentase Capaian Realisasi Output (CRO) BNNP DIY seluruhnya mencapai 100 %;
- Penyerapan anggaran BNNP DIY mencapai 98,61 %;
- Efisiensi Standar Biaya Khusus (SBK) , Hasil perhitungan pada aplikasi SAMRT mencapai nilai 100;
- Koordinasi antara bagian Perencanaan dengan pelaksana kegiatan dalam hal pemantauan data kinerja termasuk mekanisme pelaksanaan kegiatan secara 3E (Ekonomis, Efektive dan Efisien) dengan memperhatikan capaian output yang di targetkan.

Hambatan yang dihadapi dalam meraih NKA diantaranya :

1. Susahnya mengevaluasi secara manual atas Nilai Kinerja yang muncul pada aplikasi SMART Kemenkeu;
2. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan belum maksimal, dikarenakan kurang tepatnya jadwal pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang diajukan ke KPPN.

Dalam mewujudkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA), BNNP DIY menggunakan anggaran sesuai DIPA secara efisien. Anggaran yang ada dipergunakan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pada indikator ini secara maksimal dengan didukung SDM yang ada. Dibuktikan dengan keberhasilan BNNP DIY dalam mencapai realisasi NKA melebihi Nilai Kinerja yang telah ditargetkan.

Rekomendasi untuk penyempurnaan Nilai Kinerja Anggaran kedepan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan bagian Keuangan selaku penginput Capaian Output Satker, guna memantau Nilai Kinerja Anggaran BNNP DIY;
2. Para pelaksana kegiatan harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah didaftarkan ke KPPN sehingga dapat memaksimalkan Nilai Konsistensi Penyerapan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
13.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten/ Kota	3 BNN Kabupaten/ Kota	100 %

Definisi Indikator Kinerja ini adalah banyaknya BNN Kabupaten/Kota yang Capaian atas penggunaan anggaran tertuang dalam dokumen anggaran dan menimbulkan NKA yang memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNNP DIY pada tahun 2024 telah memenuhi target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 dalam arti seluruh BNN Kabupaten/Kota di wilayah DIY berhasil mencapai NKA sesuai target. Namun demikian masih perlu adanya evaluasi untuk lebih baik lagi agar NKA BNNP DIY (target 88 tercapai 99,97) dan BNN Kota Yogyakarta (target 87 tercapai 99,98) bisa maksimal seperti yang sudah diraih oleh BNNK Sleman (target 87) dan BNNK Bantul (target 88) dengan meraih NKA maksimal yaitu di angka 100. Sedangkan pada Renproja BNNP DIY yang merupakan turunan dari Renstra BNN, untuk Indikator ini belum ditargetkan. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 13.

Dilihat dari capaian realisasi indikator Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target dari tahun ke tahun BNNP DIY mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target bisa dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 13.1.
Capaian Jumlah BNNK dengan NKA
Th. 2020 s.d 2024



Pada indikator ini belum terdapat target secara nasional yang dituangkan di dalam Renstra BNN, sehingga belum dapat membandingkan target dan realisasi secara nasional.

Faktor kegagalan pada indikator ini salah satunya dari Nilai Efisiensi, dimana tidak maksimalnya Nilai efisiensi ini dipengaruhi oleh realisasi anggaran dan capaian output yang tidak seimbang, serta konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan yang belum terlaksana secara maksimal.

Dalam meraih keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran, BNNP DIY selalu berkoordinasi dengan BNN Kabupaten/Kota terutama dengan bagian Perencanaan untuk terus melakukan pemantauan data kinerja dan realisasi capaian output dan anggaran agar terpantau progres kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing bidang/bagian.

Hambatan yang dihadapi dalam meraih indikator ini diantaranya :

1. Kontrol sistem yang belum maksimal dalam mengevaluasi secara manual atas Nilai Kinerja yang muncul di aplikasi SMART Kemenkeu;
2. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan yang kurang maksimal, dikarenakan kurang tepatnya jadwal pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang diajukan ke KPPN.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini, BNNP DIY dan jajaran menggunakan anggaran sesuai DIPA T.A. 2024 secara efisien. Ketersediaan anggaran dan SDM yang minim tidak menyurutkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak merupakan salah satu langkah dalam mencapai keberhasilan outcome, dibuktikan dengan tercapainya target NKA disetiap BNN Kota/Kabupaten di wilayah DIY.

Rekomendasi untuk penyempurnaan kedepan adalah :

1. Koordinasi pihak terkait seperti Pembina Fungsi (Biro Keuangan Settama BNN RI) selaku penanggung jawab indikator kinerja ini.
2. Koordinasi dengan Dirjend. Anggaran sebagai penanggung jawab aplikasi SMART Kemenkeu.
3. Para pelaksana kegiatan harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah didaftarkan ke KPPN sehingga dapat memaksimalkan Nilai Konsistensi Penyerapan.

Untuk mencapai target diperlukan kerjasama antara fungsi perencanaan, pelaksana teknis, keuangan dan pelaporan, sehingga penyerapan anggaran, konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD), capaian keluaran dan efisiensi dapat mencapai Nilai Kinerja yang maksimal.

11. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
14.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99.09 Indeks	99.93 Indeks	100.81 %

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

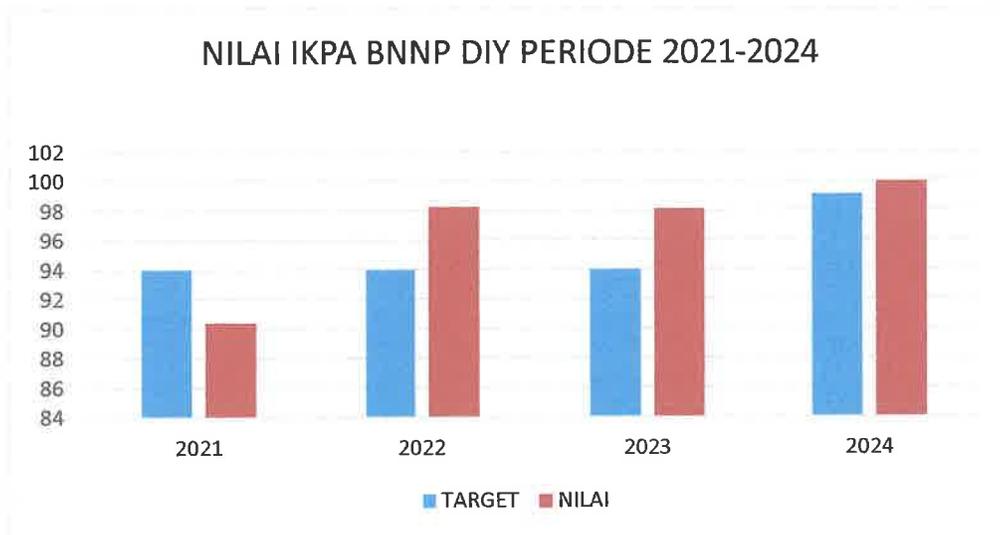
- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

BNNP DIY mendapatkan Nilai IKPA tahun 2024 sebesar 99.93 Indeks, Nilai tersebut melebihi target yang disusun dalam RKT BNNP DIY TA 2024 sebesar 98.19 Indeks. Nilai IKPA didapat dari delapan (8) indikator pelaksanaan anggaran yang terdiri dari indikator (Revisi DIPA (100), Halaman III DIPA (1), Penyerapan Anggaran (99.63), Data Kontrak (100), Pengelolaan UP/TUP (100), Penyelesaian Tagihan (100), Dispensasi SPM (100) dan Hasil Capaian Output (100).

Sesuai dengan target IKPA sebagaimana tertulis pada dokumen rencana program kerja BNNP DIY TA 2024 nilai IKPA melebihi target dari nilai target yang ditetapkan 94, pada tahun ini nilai IKPA BNNP DIY berhasil mencatatkan nilai 98.93.

Secara Nasional target IKPA belum tertuang di dalam Renstra BNN, sehingga belum dapat menganalisa target dan reliasasinya. Penilaian nilai IKPA dimulai sejak tahun 2021 dengan menggunakan formulasi penilaian yang terdiri dari 4 aspek dan 13 indikator. Pada tahun 2022 penilaian nilai IKPA mengalami reformulasi terdiri dari 3 aspek penilaian dan 8 indikator. Hal ini dimaksudkan agar satker dapat mendapatkan nilai yang lebih mudah dijangkau oleh pelaksana anggaran. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 14.

Hasil penilaian IKPA BNNP DIY pada tahun 2021 sebesar 90.46, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 98.23 dan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 98.09. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terjadi beberapa kali Automatic Adjustment dan Optimalisasi anggaran untuk penyesuaan tunkin pegawai BNN namun pada akhirnya dibatalkan sehingga mempengaruhi timeline dan rencana penarikan dana yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti digambarkan dalam grafik di bawah ini :



Keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya;

Keberhasilan nilai IKP BNNP DIY ini didapat dari tujuh (7) indikator yang mendapat nilai 100 antara lain indikator:

1. Revisi DIPA (100)
2. RPD Hal III DIPA (100)
3. Belanja Kontraktual (100)
4. Penyelesaian Tagihan (100)
5. Pengelolaan UP/ TUP (100)
6. Dispensasi SPM (100)
7. Capaian output (100)

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dilihat dari pencapaian nilai IKPA BNNP DIY dengan hasil maksimal dapat dilaksanakan dengan sinergitas dan koordinasi baik yang sangat terkait antara peran Kepala Satker dengan pemangku pelaksana kegiatan teknis dan didukung oleh semua tim pendukung operasional di dalam unit organisasi BNNP DIY.

Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan :

- dilakukan dengan memaksimalkan nilai pada indikator Revisi Halaman III DIPA yang memuat kesesuaian antara rencana penarikan dana yang dibuat dengan realisasi pelaksanaan anggaran atau timeline yang disusun setiap awal triwulan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan program dan operasional pendukung.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
15.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target.	3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	100 %

Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target adalah banyaknya BNN Kabupaten/ Kota yang IKPA nya memenuhi target sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kinerja.

Nilai IKPA BNN di wilayah DIY tahun 2024 mendapatkan nilai akhir BNNK Sleman 100, BNNK Bantul 100 dan BNNK Yogyakarta 99.96 melebihi dari target yang disusun dalam RKT BNNP DIY TA 2024 sebesar 99.09

Sesuai dengan target IKPA sebagaimana tertulis pada dokumen rencana program kerja BNNP DIY TA 2024 nilai IKPA 94 dan target nasional yang ditetapkan yaitu 95.00. Semua satker BNN di wilayah DIY memperoleh nilai diatas target atau melampaui dari nilai IKPA BNN nasional. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 15.

Berikut adalah hasil penilaian IKPA BNNK Sleman pada tahun 2021 sebesar 75.45, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 96.95 dan pada tahun 2023 naik menjadi 98.12 lalu tahun 2024 menjadi 100. Sedangkan penilaian IKPA BNNK Bantul pada tahun 2021 sebesar 85.93, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 98.00 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 99.10 dan tahun ini mendapatkan nilai 100. Nilai IKPA BNNK Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 90.53, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 99.39 dan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 99.00 lalu terjadi peningkatan pada tahun 2024 menjadi 99.96.



Secara Nasional di dalam renstra BNN tahun 2020-2024 untuk indikator nilai IKPA tidak masuk kedalam sasaran strategis, saat ini indikator yang ada yaitu Indikator Nilai Kualitas Laporan Kinerja yang hanya menjadi target BNN pusat.

Keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja ini, BNN Wilayah berhasil mendapatkan nilai di atas target yang ditetapkan dan tidak ada satupun yang nilainya IKPA 2024 dibawah target yang ditetapkan rencana target tahunan (RKT) maupun target renproja (2020-2024), dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terencana, akurat dan sinergitas yang baik di antara pelaksana tugas di lapangan sehingga dapat mendapatkan nilai yang baik pada delapan aspek indikator penilaian IKPA TA 2024.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk Pencapaian nilai IKPA BNN Wilayah DIY dengan hasil maksimal dapat dilaksanakan dengan sinergitas dan koordinasi baik yang sangat terkait antara peran Kepala BNNP DIY dengan Kepala BNNK dan pelaksana kegiatan teknis serta oleh semua tim pendukung operasional di dalam unit organisasi BNN Wilayah DIY.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi)

- perbaikan kinerja yaitu dengan memaksimalkan nilai pada penyerapan anggaran sesuai dengan target triwulanan yang memuat kesesuaian antara rencana penarikan dana yang dibuat dengan realisasi pelaksanaan anggaran atau timeline yang disusun setiap awal triwulan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan program dan operasional pendukung. Hal ini merupakan poin penting dalam menaikkan nilai IKPA secara maksimal karena bukan menjadi satu-satunya tugas salah satu bidang/bagian namun merupakan hasil kinerja bersama sebagai satu unit organisasi pemerintah.

12. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit vertikal

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
16.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian Internal	91 Indeks	91,94 indeks	101 %

Satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM adalah satuan kerja yang mampu memenuhi kriteria WBK/WBBM berdasarkan penilaian oleh Inspektorat utama untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB terkait Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Pengukuran dilakukan melalui penilaian secara mandiri (*self assessment*) dengan menggunakan instrument WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dimulai dari tahun 2019 dan pada tahun 2020 dilaksanakan penancangan Pembangunan ZI yang pada akhirnya membuahkan hasil dengan menerima predikat WBK pada tahun 2021 dengan nilai ZI 92,86.

Pada Rencana Program Kerja BNNP DIY belum menargetkan Nilai Pembangunan Zona Integritas selama lima tahun periode penganggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dilihat dari Renstra BNN target nasional nilai ZI sebesar 75 sepanjang tahun renstra 2020-2024. Target nilai ZI tersebut lebih kecil dari pada yang ditargetkan pada RKT BNNP DIY yaitu sebesar 91. Dari target yang telah ditentukan tersebut BNNP DIY selalu mencapai hasil diatas target.

Nilai Zona Integritas BNNP DIY baru ditargetkan pada RKT tahun 2023 dengan indeks 85, BNNP DIY berhasil mencapai realisasi pada indeks 90,11. Sedangkan pada tahun 2024 target Indeks 91 dengan capaian Realisasi ZI pada Indeks 91,94 atau mendapat capaian 101%. Berdasarkan surat dari Inspektur Utama Nilai ZI BNNP DIY berhasil memperoleh peringkat pertama. Data dukung indikator ini ada pada lampiran 16.

Dari hasil analisa target dan realisasi tahun ke tahun, BNNP DIY mampu memenuhi target dengan baik dan cenderung meningkat, sehingga mampu memberikan nilai tambah untuk target nasional BNN RI. Target dan realisasi Zona Integritas BNNP DIY dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



BNNP DIY memaksimalkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan ZI yang merupakan tindakan efisiensi anggaran dengan kata lain walaupun tidak didukung anggaran namun didukung oleh sumber daya manusia yang andal maka Pembangunan Zona Integritas dapat dilakukan.

Upaya yang dilakukan oleh BNNP DIY untuk mencapai keberhasilan dalam Pembangunan Zona Integritas :

- Dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan relasi yang terjalin antara BNNP dengan stake holder yang telah melakukan kerja sama.

Rekomendasi dari Kegiatan Pembangunan Zona Integritas ini :

- Adanya alokasi anggaran untuk keperluan Pembangunan Zona Integritas
Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, BNNP DIY belum memiliki postur anggaran mandiri, selama ini keperluan penganggaran kegiatan ZI menggunakan fasilitas pada kegiatan lain pada DIPA BNNP DIY.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran di lingkup BNNP DIY dan jajarannya. Kewajiban atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, berbagai pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dan jajarannya dibiayai oleh DIPA dengan total anggaran Rp.18.144.268.000,- terserap Rp.17.936.674.660,- setara dengan 98,86 %. Adapun data dukung terdapat pada lampiran 17.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelayan masyarakat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP DIY telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja T.A. 2024.

Perjanjian Kinerja BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 terdiri dari 12 (dua belas) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 16 (enam belas) indikator. BNNP DIY dan jajarannya melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai target dengan baik.

Rekomendasi atau rencana aksi BNNP Daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka mengoptimalkan kinerja ke depan adalah :

1. Perencanaan secara matang dan optimal dalam memahami outcome kinerja yang akan dicapai;
2. Koordinasi dengan BNN RI dalam hal menyamakan persepsi terkait pemahaman tentang rincian pelaksanaan kegiatan, termasuk materi maupun item kuesioner untuk pengukuran indeks melalui bimbingan teknis kepada penyuluh dan staf di semua satker BNN;
3. Koordinasi antar semua bidang dan stakeholder untuk bisa bersinergi memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait program kerja BNNP DIY;
4. Koordinasi antara BNNP DIY dengan BNN Kab/Kota harus ditingkatkan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan, hambatan diawal proses kegiatan untuk mendapatkan solusi terbaik;
5. Perlu dilaksanakan *Training Of Trainer* fasilitator bagi peserta program ketahanan keluarga anti narkoba agar dapat menjadi fasilitator mandiri di Desa terkait;
6. Mendorong penggiat P4GN untuk lebih berkomitmen dalam upaya P4GN mulai dari lingkungan keluarga, kerja, pendidikan dan masyarakat;

7. Meningkatkan kerja sama dengan BUMN dan swasta untuk mendukung P4GN di Tingkat kabupaten/kota melalui pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR);
8. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun regulasi, program dan anggaran serta merealisasikannya di Rencana Aksi Daerah tentang P4GN di Tahun 2024;
9. Melakukan koordinasi dengan pembina fungsi untuk penambahan dukungan anggaran guna pelaksanaan pengukuran kualitas hidup klien;
10. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan bimtek bagi petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih;
11. Diklat lidik sidik / peningkatan kemampuan petugas;
12. Koordinasi dengan BNN RI untuk dukungan peralatan teknologi intelijen;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik serta kerjasama dengan para penegak hukum serta *stakeholder* terkait untuk peningkatan kinerja dalam bidang pemberantasan Narkotika;
14. Mengajukan permohonan personil petugas jaga tahanan (sipir) petugas pengawas Barang Bukti;
15. Mengajukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan keamanan seperti penambahan pintu besi, penambahan jeruji pada jendela dan pintu sel, dan penambahan kamera CCTV;
16. Koordinasi antar bidang/ fungsi teknis dan BNNK Jajarannya untuk lebih memperhatikan formulasi capaian output pada kegiatannya sesuai dengan juknis dari pengemban fungsi dan pelaksanaan di lapangan sehingga tersusun data capaian output dalam pencapaian nilai IKPA dan NKA yang maksimal.

LAMPIRAN 1



Jumlah kabupaten /kota dengan indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

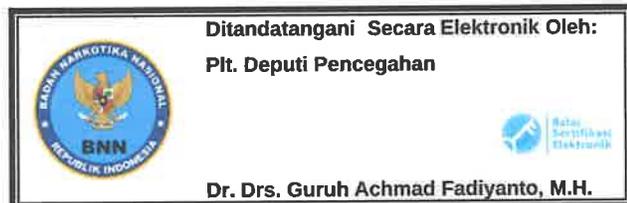
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024**

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	55.86	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	49.75	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

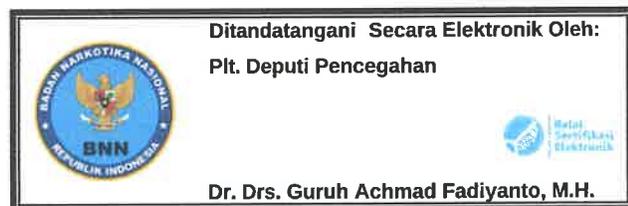
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



LAMPIRAN 2



Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

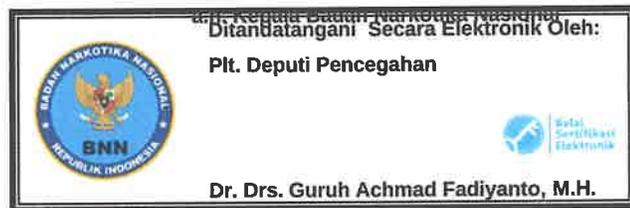
1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWA	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAH	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN ISURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONALNOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNNTANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN

TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN

TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI



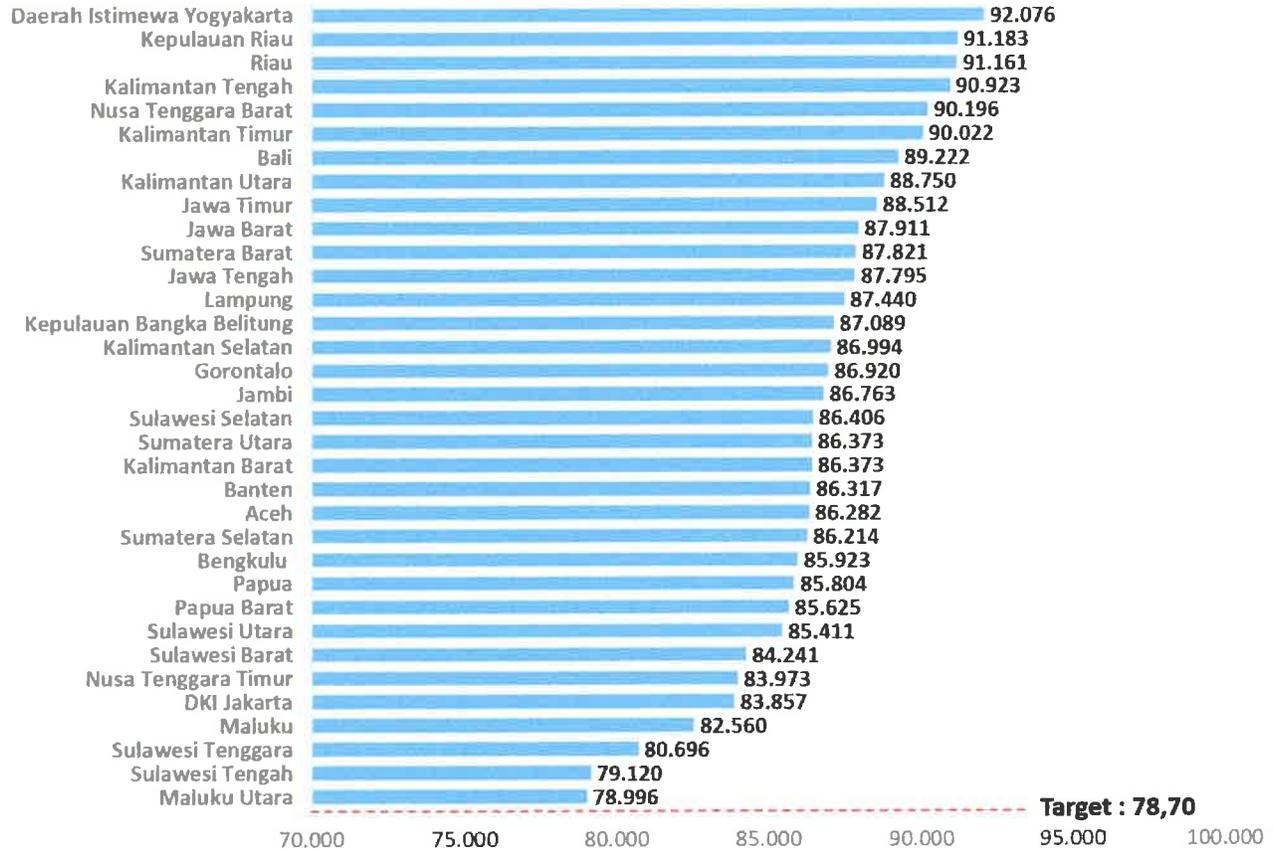
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

LAMPIRAN 3



Jumlah Kabuoten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisip[asi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY

DATA CAPAIAN DAN HASIL IKP TAHUN 2024

NO	SATKER	CAPAIAN ADVOKASI LEMBAGA				JUMLAH	HASIL IKP				IKP
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	
1	BNNP ACEH	1	0	0	1	2	3.32	0	3.29	0	3.31
2	BNNK Sabang	1	0	0	1	2	3.66	0	0	3.76	3.81
3	BNNK Pidie Jaya	1	0	1	0	2	3.59	0	3.64	0	3.62
4	BNNK Pidie	1	0	0	1	2	3.44	0	0	3.48	3.46
5	BNNK Gayo Lues	0	0	1	1	2	0	0	3.37	3.49	3.43
6	BNNK Bireuen	1	0	0	1	2	3.27	0	0	3.37	3.32
7	BNNK Banda Aceh	1	0	0	1	2	3.47	0	0	3.84	3.66
8	BNNK Aceh Tamiang	1	0	0	1	2	3.72	0	0	3.67	3.70
9	BNNK Aceh Selatan	1	0	1	0	2	3.33	0	3.28	0	3.31
10	BNN Kota Lhokseumawe	1	0	1	0	2	3.84	0	3.68	0	3.76
11	BNN Kota Langsa	1	0	1	0	2	3.67	0	3.78	0	3.73
1	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	1	1	2	0	0	3.69	3.76	3.73
2	BNNK Solok	0	0	1	1	2	0	0	3.77	3.8	3.79
3	BNNK Sawahlunto	1	0	0	1	2	3.6	0	0	3.86	3.73
4	BNNK Payakumbuh	0	0	1	1	2	0	0	3.83	3.86	3.85
5	BNNK Pasaman Barat	0	0	1	1	2	0	0	3.81	3.86	3.84
1	BNNP SUMUT	0	0	1	1	2	0	0	3.53	3.6	3.57
2	BNNK Tebing Tinggi	0	0	1	1	2	0	0	3.383	3.451	3.42
3	BNNK Tapanuli Selatan	1	1	0	0	2	3.79	3.67	0	0	3.73
4	BNNK Tj. Balai	0	0	1	1	2	0	0	3.4	3.73	3.57
5	BNNK Simalungun	0	1	0	1	2	0	3.48	0	3.54	3.51
6	BNNK Serdang Bedagai	0	0	1	1	2	0	0	3.45	3.17	3.31
7	BNNK Pematang Siantar	1	0	0	1	2	3.428	0	0	3.434	3.43
8	BNNK Langkat	0	0	1	1	2	0	0	3.47	3.55	3.51
9	BNNK Mandailing Natal	0	0	1	1	2	0	0	3.5	3.55	3.53
10	BNNK Labuhan Batu Utara	1	0	0	1	2	3.4368	0	0	3.6224	3.53
11	BNNK Karo	0	0	1	1	2	0	0	3.32	3.708	3.51
12	BNNK Gunungsitoli	0	0	1	1	2	0	0	3.46	3.53	3.50
13	BNNK Deli Serdang	1	0	0	1	2	3.76	0	0	3.7	3.73
14	BNNK Binjai	0	0	1	1	2	0	0	3.68	3.53	3.61
15	BNNK Batubara	1	0	0	1	2	3.84	0	0	3.8	3.82
16	BNNK Asahan	0	0	1	1	2	0	0	3.41	3.43	3.42
1	BNNP SUMSEL	1	0	0	1	2	4	0	0	4	4.00
2	BNNK Prabumulih	1	0	0	1	2	3.92	0	0	3.88	3.90
3	BNNK Pagar Alam	0	0	1	1	2	0	0	3.54	3.53	3.54
4	BNNK Oku Timur	1	0	0	1	2	3.73	0	0	3.61	3.67
5	BNNK Ogan Komering Ilir	1	0	0	1	2	3.88	0	0	3.51	3.70
6	BNNK Ogan Ilir	1	0	0	1	2	3.44	0	0	3.48	3.46
7	BNNK Muara Enim	1	0	0	1	2	3.68	0	0	3.67	3.68
8	BNNK Lubuklinggau	1	0	0	1	2	0	0	3.73	3.86	3.80
9	BNNK Empat Lawang	1	0	0	1	2	3.75	0	0	3.53	3.64
10	BNN Kab Musi Rawas	0	0	1	1	2	0	0	3.48	3.36	3.42
1	BNNP LAMPUNG	1	0	0	1	2	3.32	0	0	3.56	3.44

DATA CAPAIAN DAN HASIL IKP TAHUN 2024

NO	SATKER	CAPAIAN ADVOKASI LEMBAGA				JUMLAH	HASIL IKP				IKP
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	
2	BNNK Way Kanan	1	0	0	1	2	3.56	0	0	3.54	3.55
3	BNNK Tanggamus	1	0	0	1	2	3.54	0	0	3.94	3.74
4	BNNK Lampung Timur	1	0	0	1	2	3.25	0	3.47	0	3.36
5	BNNK Lampung Selatan	1	0	1	0	2	3.6	0	3.56	0	3.58
6	BNN Kota Metro	1	0	0	1	2	3.62	0	0	3.53	3.58
1	BNNP RIAU	1	0	0	1	2	3.7	0	0	3.67	3.69
2	BNNK Pelalawan	1	0	0	1	2	3.66	0	0	3.76	3.71
3	BNNK Pekan Baru	1	0	0	1	2	3.9	0	0	3.8	3.85
4	BNNK Kuantan Singingi	0	0	1	1	2	0	0	3.8	3.92	3.86
5	BNN Kota Dumai	1	0	0	1	2	4	0	0	4	4
1	BNNP KEP. RIAU	0	1	0	1	2	0	4	0	4	4.00
2	BNNK Tanjungpinang	0	0	1	1	2	0	0	3.68	3.778	3.73
3	BNNK Karimun	0	0	1	1	2	0	0	3.96	3.84	3.90
4	BNN Kota Batam	0	0	1	1	2	0	0	3.94	3.95	3.95
1	BNNP JAMBI	1	1	0	0	2	3.616	3.765	0	0	3.69
2	BNNK Tanjab Timur	1	0	0	1	2	3.88	0	0	4	3.71
3	BNN Kota Jambi	1	0	0	1	2	3.93	0	0	3.85	3.89
4	BNNK Batanghari	1	0	0	1	2	3.62	0	0	3.58	3.60
1	BNNP BABEL	1	0	0	1	2	3.381	0	0	3.397	3.39
2	BNNK Pangkalpinang	0	0	1	1	2	0	0	3.7	3.5	3.60
3	BNNK Belitung	1	0	0	1	2	3.55	0	0	3.2	3.38
4	BNNK Bangka selatan	0	0	1	1	2	0	0	3.96	3.96	3.96
5	BNNK Bangka	1	0	1	0	2	3.62	0	3.7	0	3.66
1	BNNP BENGKULU	1	0	0	1	2	3.59	0	0	3.73	3.66
2	BNNK Bengkulu Selatan	1	0	0	1	2	3.8	0	0	3.5	3.65
3	BNNK Bengkulu	0	0	1	1	2	0	0	3.89	3.49	3.59
1	BNNP DKI JAKARTA	1	0	0	1	2	3.05	0	0	3.52	3.29
2	BNNK Jakarta Selatan	1	0	1	0	2	3.24	0	2.81	0	3.03
3	BNN Kota Jakarta Utara	0	0	1	1	2	0	0	3.57	3.52	3.55
4	BNN Kota Jakarta Timur	1	0	0	1	2	3.55	0	0	3.67	3.61
1	BNNP BANTEN	1	0	1	0	2	3.54	0	3.57	0	3.56
2	BNN Kota Tangerang Selatan	0	0	1	1	2	0	0	3.74	3.36	3.55
3	BNN Kota Tangerang	0	0	1	1	2	0	0	3.39	3.32	3.36
4	BNN Kota Cilegon	1	0	1	0	2	3.67	0	3.63	0	3.65
1	BNNP JAWA BARAT	0	1	0	1	2	0	3.52	0	3.54	3.53
2	BNNK Sumedang	1	1	0	0	2	3.75	3.67	0	0	3.71
3	BNNK Sukabumi	1	0	0	1	2	3.83	0	0	3.83	3.83
4	BNNK Karawang	0	0	1	1	2	3.8	0	0	3.4	3.60
5	BNNK Garut	0	1	0	1	2	0	3.78	0	3.78	3.78
6	BNNK Cimahi	1	0	0	1	2	3.65	0	0	3.45	3.55
7	BNNK Cianjur	1	0	0	1	2	3.52	0	0	3.5	3.51
8	BNNK Ciamis	1	0	0	1	2	3.6	0	0	3.57	3.59
9	BNNK Bandung Barat	1	0	1	0	2	3.65	0	3.87	0	3.76

DATA CAPAIAN DAN HASIL IKP TAHUN 2024

NO	SATKER	CAPAIAN ADVOKASI LEMBAGA				JUMLAH	HASIL IKP				IKP
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	
10	BNN Kota Tasikmalaya	1	0	1	0	2	3.56	0	3.8	0	3.68
11	BNN Kota Depok	0	0	1	1	2	0	0	3.58	3.66	3.62
12	BNN Kota Cirebon	1	0	0	1	2	3.88	0	0	3.93	3.91
13	BNN Kota Bandung	1	0	0	1	2	3.8	0	0	3.43	3.80
14	BNN Kabupaten Bogor	1	0	0	1	2	3.4	0	0	3.59	3.50
15	BNNK Kuningan	1	0	0	1	2	3.345	0	0	3.32	3.33
1	BNNP JAWA TENGAH	1	0	1	0	2	3.78	0	3.46	0	3.62
2	BNNK Temanggung	0	0	1	1	2	0	0	4	4	4.00
3	BNNK Tegal	0	1	0	1	2	0	3.36	0	3.36	3.36
4	BNNK Purbalingga	1	0	0	1	2	3.4	0	0	3.41	3.41
5	BNNK Magelang	0	0	1	1	2	0	0	3.72	3.64	3.68
6	BNNK Cilacap	0	1	0	1	2	0	3.52	0	3.48	3.50
7	BNNK Batang	1	0	1	0	2	3.46	0	3.4	0	3.43
8	BNNK Banyumas	0	0	1	1	2	0	0	3.64	3.61	3.63
9	BNN Kota Surakarta	1	0	0	1	2	3.42	0	0	3.52	3.47
10	BNN Kab. Kendal	1	0	0	1	2	3.71	0	0	3.84	3.78
1	BNNP JAWA TIMUR	1	0	0	1	2	3.69	0	0	3.62	3.66
2	BNNK Tulung Agung	1	0	0	1	2	3.73	0	0	4	3.87
3	BNNK Tuban	1	0	1	0	2	3.55	0	3.71	0	3.63
4	BNNK Trenggalek	1	0	0	1	2	3.6	0	0	3.5	3.55
5	BNNK Sumenep	0	0	1	1	2	0	0	3.68	2.96	3.32
6	BNNK Sidoarjo	0	0	1	1	2	0	0	3.84	3.76	3.80
7	BNNK Pasuruan	0	0	1	1	2	0	0	3.88	3.76	3.82
8	BNNK Nganjuk	1	0	1	0	2	3.54	0	3.88	0	3.71
9	BNNK Mojokerto	1	0	1	0	2	3.29	0	3.34	0	3.32
10	BNN Kab Malang	1	0	0	1	2	3.72	0	0	3.72	3.72
11	BNNK Lumajang	1	0	0	1	2	3.56	0	0	3.56	3.56
12	BNNKab Kediri	0	0	1	1	2	0	0	3.84	3.2	3.52
13	BNNK Gresik	1	0	1	0	2	4	0	3.92	0	3.96
14	BNNK Blitar	1	0	0	1	2	3.47	0	0	3.344	3.41
15	BNN Kota Surabaya	0	0	1	1	2	0	0	3.76	3.76	3.76
16	BNN Kota Malang	0	0	1	1	2	0	0	3.26	3.78	3.52
17	BNN Kota Kediri	1	0	1	0	2	3.84	0	3.8	0	3.82
18	BNN Kota Batu	1	0	0	1	2	3.52	0	0	3.72	3.62
1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	1	0	1	0	2	3.66	0	3.59	0	3.63
2	BNNK Sleman	0	0	1	1	2	0	0	3.46	3.53	3.50
3	BNNK Bantul	0	0	1	1	2	0	0	3.71	3.76	3.74
4	BNN Kota Yogyakarta	0	0	1	1	2	0	0	3.69	3.56	3.63
1	BNNP BALI	0	1	0	1	2	0	3.79	0	3.55	3.67
2	BNNK Klungkung	1	0	1	0	2	3.47	0	3.96	0	3.72
3	BNNK Karangasem	1	0	1	0	2	3.48	0	3.32	0	3.40
4	BNNK Gianyar	1	1	0	0	2	3.96	3.88	0	0	3.92
5	BNN Kota Denpasar	0	0	1	1	2	0	0	3.3	3.3	3.30

DATA CAPAIAN DAN HASIL IKP TAHUN 2024

NO	SATKER	CAPAIAN ADVOKASI LEMBAGA				JUMLAH	HASIL IKP				IKP
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	
6	BNN Kabupaten Badung	1	0	1	0	2	3.93	3.87	0	0	3.90
7	BNN Kab Buleleng	1	0	1	0	2	3.35	0	3.64	0	3.50
1	BNNP NTB	0	0	1	1	2	0	0	3.4	3.3	3.35
2	BNNK Sumbawa Barat	0	0	1	1	2	0	0	3.57	3.52	3.55
3	BNNK Sumbawa	1	0	1	0	2	3.33	0	3.74	0	3.54
4	BNNK Mataram	1	0	0	1	2	3.92	0	0	3.84	3.88
5	BNNK Bima	1	0	1	0	2	3.74	0	3.8	0	3.77
1	BNNP NTT	1	0	0	1	2	3.47	0	0	3.48	3.48
2	BNNK Kota Kupang	1	0	0	1	2	3.69	0	0	3.39	3.54
3	BNNK Belu	0	0	1	1	2	0	0	3.62	3.36	3.49
4	BNN Kab. Rote Ndao	0	0	1	1	2	0	0	3.34	3.37	3.36
1	BNNP KALIMANTAN BARAT	1	0	0	1	2	3.43	0	0	3.42	3.43
2	BNNK Sintang	1	0	0	1	2	3.06	0	0	3.4	3.23
3	BNNK Sanggau	1	0	0	1	2	3.86	0	0	4.05	3.96
4	BNNK Pontianak	0	0	1	1	2	0	0	3.86	3.64	3.75
5	BNNK Mempawah	0	0	1	1	2	0	0	3.36	3.382	3.37
6	BNN Kota Singkawang	0	0	1	1	2	0	0	3.6	3.54	3.57
7	BNN Kab. Kubu Raya	0	0	1	1	2	0	0	3.43	3.46	3.45
8	BNN Kab Bengkayang	0	0	1	1	2	0	0	3.45	3.73	3.59
1	BNNP KALIMANTAN SELATAN	1	0	1	0	2	3.4	0	3.2	0	3.30
2	BNNK Tanah Laut	1	0	0	1	2	3.45	0	0	3.38	3.42
3	BNNK Tabalong	0	0	1	1	2	0	0	3.71	3.04	3.38
4	BNNK Hulu Sungai Utara	0	0	1	1	2	0	0	3.36	3.28	3.32
5	BNNK Hulu sungai Selatan	0	0	1	1	2	0	0	3.68	3.64	3.66
6	BNNK Barito Kuala	1	-	1	-	2	2.75	-	3.29	-	3.02
7	BNNK Banjarmasin	1	0	0	1	2	3.62	0	0	3.78	3.70
8	BNNK Banjarbaru	0	0	1	1	2	0	0	3.55	3.92	3.74
9	BNNK Balangan	0	0	1	1	2	0	0	3.33	3.4	3.37
1	BNNP KALIMANTAN TENGAH	1	0	0	1	2	3.52	0	0	3.6	3.56
2	BNNK Palangka Raya	-	-	1	1	2	-	-	3.56	3.52	3.54
3	BNNK Kotawaringin Barat	-	-	1	1	2	-	-	4	3.88	3.94
1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	1	0	1	0	2	3.7	0	3.68	0	3.69
2	BNNK Samarinda	1	0	1	0	2	3.75	0	3.62	0	3.69
3	BNNK Balikpapan	1	0	1	0	2	3.64	0	3.76	0	3.70
4	BNN Kota Bontang	1	1	0	0	2	3.48	3.82	0	0	3.65
1	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	1	1	2	0	0	3.56	3.57	3.57
2	BNNK Tarakan	1	1	-	-	2	3.22	3.42	-	-	3.32
3	BNNK Nunukan	1	0	1	0	2	3.34	-	3.29	-	3.32
1	BNNP SULAWESI BARAT	1	0	0	1	2	3.24	0	0	3.47	3.36
2	BNNK Polewali Mander	1	0	0	1	2	3.6	0	0	3.6	3.60
1	BNNP SULAWESI TENGGARA	1	0	0	1	2	3.38	0	0	3.59	3.49
2	BNNK Kolaka	1	0	0	1	2	3.79	0	0	3.98	3.89
3	BNNK Bau Bau	1	0	0	1	2	3.85	0	0	3.96	3.91

DATA CAPAIAN DAN HASIL IKP TAHUN 2024

NO	SATKER	CAPAIAN ADVOKASI LEMBAGA				JUMLAH	HASIL IKP				IKP
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	
4	BNN Kota Kendari	0	0	1	1	2	0	0	3.45	3.99	3.72
5	BNNK Muna	0	0	1	1	2	0	0	3.69	3.7	3.70
1	BNNP SULAWESI SELATAN	1	1	0	0	2	3.62	3.25	0	0	3.44
2	BNN Kota Palopo	0	0	1	1	2	0	0	3.36	3.87	3.62
3	BNNK Tana Toraja	0	0	1	1	2	0	0	3.89	3.92	3.91
4	BNNK Bone	1	0	0	1	2	3.88	0	0	3.17	3.53
1	BNNP SULAWESI TENGAH	1	0	0	1	2	3.65	0	0	2.99	3.32
2	BNNK Palu	1	0	1	0	2	3.68	0	3.72	0	3.70
3	BNNK Donggala	1	0	0	1	2	3.84	0	0	4	3.92
4	BNNK Banggai Kep	0	0	1	1	2	0	0	3.82	3.53	3.68
5	BNN KAB Tojo Una-Una	1	0	0	1	2	3.4	0	0	3.41	3.41
6	BNN Kab Poso	1	0	0	1	2	3.27	0	0	3.76	3.52
7	BNN KAB Morowali	1	0	0	1	2	3.41	0	0	3.55	3.48
1	BNNP SULAWESI UTARA	1	0	0	1	2	2.93	0	0	3.07	3.00
2	BNNK Bolaang Mongondow	1	0	1	0	2	3.68	0	3.12	0	3.40
3	BNN Kota Bitung	0	0	1	1	2	0	0	3	3.44	3.22
4	BNN Kota Manado	1	0	0	1	2	3.68	0	0	3.12	3.40
5	BNNK Kepulauan Sangihe	1	0	0	1	2	3.42	0	0	3.4	3.41
1	BNNP GORONTALO	1	0	0	1	2	3.27	0	0	3.85	3.56
2	BNN Kota Gorontalo	1	0	0	1	2	3.41	0	0	3.81	3.61
3	BNNK Bone Bolango	1	0	1	0	2	3.74	0	3.45	0	3.60
4	BNN Kab Gorontalo	1	0	1	0	2	3.75	0	3.76	0	3.76
5	BNNK Gorontalo Utara	1	0	1	0	2	3.54	0	3.57	0	3.56
6	BNNK Boalemo	1	0	0	1	2	3.44	0	0	3.54	3.49
1	BNNP MALUKU	1	0	1	0	2	3.12	0	3.08	0	3.10
2	BNNK Tual	1	0	0	1	2	3.51	0	0	3.21	3.36
3	BNNK Buru Selatan	1	0	0	1	2	3.53	0	0	3.25	3.39
1	BNNP MALUKU UTARA	0	0	1	1	2	0	0	3.69	3.57	3.63
2	BNNK Pulau Morotai	0	0	1	1	2	0	0	3.8	3.04	3.42
3	BNNK Halmahera Utara	1	0	1	0	2	3.92	0	3.84	0	3.88
4	BNN Kota Tidore Kepulauan	1	0	0	1	2	3.52	0	0	3.2	3.36
1	BNNP PAPUA	1	0	1	0	2	3.29	0	3.3	0	3.30
2	BNNK Mimika	1	0	0	1	2	3.35	0	0	3.25	3.30
3	BNNK Jayapura	0	0	1	1	2	0	0	3.31	3.31	3.31
1	BNNP PAPUA BARAT	1	0	0	1	2	3.48	0	0	3.45	3.47
JUMLAH IKP											3.59

LAMPIRAN 4



Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY

Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Tahun 2024

Satuan Kerja	Jumlah Klien Rawat Jalan	Jumlah Klien IBM	Total Klien	Jumlah Klien yang Naik Kualitas Hidupnya Perdomain				Persentase Jumlah Klien yang Naik Kualitas Hidupnya Perdomain				Rata-Rata Persentase Kenaikan Kualitas Hidup
				Fisik	Psikologis	Sosial	Lingkungan	Fisik	Psikologis	Sosial	Lingkungan	
BNNP DIY	97	10	107	95	93	93	93	89%	87%	87%	87%	87,38%

Yogyakarta, Januari 2024
Ketua Tim Rehabilitasi



drg. Febriana Kusuma D.M., M.A.R.S



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,
IKM dan Presentase Peningkatan
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI

TAHUN 2024

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	3.5	83.80
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
Riau	3.21	3.69	88.55
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
Kepulauan Riau	3.66	3.72	80.21
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.57	91.56
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
Bengkulu	3.68	3.69	78.42
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
Jambi	3.24	3.48	85.14
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
Sumatera Selatan	3.19	3.63	86.63
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
Lampung	3.6	3.65	83.85
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
Banten	3.93	3.57	76.30
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
DKI Jakarta	3.84	3.65	89.79
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
Jawa Barat	3.56	3.56	80.20
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

D.I.Yogyakarta	3.74	3.83	87.64
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
Jawa Timur	3.66	3.6	87.46
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
Kalimantan Barat	3.23	3.57	88.79
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
Kalimantan Selatan	3.43	3.68	90.69
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.05
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
Bali	3.72	3.65	91.18
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
Nusa Tenggara Barat	3.92	3.72	83.95
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
Nusa Tenggara Timur	3.26	3.77	87.18
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
Sulawesi Utara	3.18	3.59	92.83
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
Gorontalo	3.2	3.5	77.17

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	92.14
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	3.22	72.00
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	3.68	97.47
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3.64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	63.69



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Rehabilitasi



Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

LAMPIRAN 5



**Jumlah petugas penyelenggara
layanan IBM yang terlatih**



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



LURAH GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PEMULIHAN UNIT INTERVENSI BERBASIS
MASYARAKAT DI KALURAHAN GIRIPURWO TAHUN 2024

LURAH GIRIPURWO,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan Narkoba semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih optimal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;
- c. bahwa untuk memudahkan akses rehabilitasi berkelanjutan bagi penyalahguna Narkoba di wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Giripurwo tentang Pembentukan Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Kalurahan Giripurwo Tahun 2024;
- e. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini, dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkoba;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
5. Surat Pengesahan DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 Nomor : SP DIPA-066.01.2.682494/2024 tanggal 24 November 2023;
6. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 448/C/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Kalurahan Bersih Narkotika, Psikotropika, Obat-Obatan Terlarang, dan Zat Adiktif Tahun 2022;
7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Lingkungan BNN Provinsi/Kab/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP/15/II/KA/RH/2024/BNNP tentang Penetapan Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat Terbentuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Kalurahan Giripurwo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Agen Pemulihan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi/memberikan informasi tentang pengenalan IBM dan kegiatannya dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- b. Melakukan pemetaan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah sekitar sebagai dasar kegiatan penjangkauan dan pengembangan IBM;
- c. Melakukan penjangkauan dengan membangun hubungan dengan pengguna narkoba, keluarganya atau masyarakat disekitarnya serta kemudian mendorongnya agar memanfaatkan layanan IBM;
- d. Melakukan layanan pemulihan antara lain:
 - a) Skrining menggunakan DAST 10
 - b) Penerimaan awal
 - c) Layanan intervensi (layanan wajib, layanan pilihan, dan bina lanjut/pemantauan)
 - d) Pertemuan kelompok
- e. Melakukan bina lanjut/pemantauan, kegiatan ini merupakan lanjutan layanan intervensi untuk melakukan pendampingan lebih lanjut agar klien dapat memperkuat dan menjaga pemulihannya, dengan melakukan:
 - a) Pemantauan
 - b) Pengembangan diri
 - c) Layanan intervensi sesuai kebutuhan

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Kepala BNNP DIY dan Lurah setempat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Surat Pengesahan DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 Nomor: SP DIPA-066.01.2.682494/2024 tanggal 24 November 2023 sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Giripurwo

Pada Tanggal : 13 Maret 2024

LURAH GIRIPURWO

MARDI SANTOSA



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PEMULIHAN
UNIT INTERVENSI BERBASIS
MASYARAKAT DI KALURAHAN
GIRIPURWO TAHUN 2024

DAFTAR AGEN PEMULIHAN KALURAHAN GIRIPURWO

No	Nama	Jabatan	Wilayah
1	2	3	4
1	SUGIYA	Agen Pemulihan	Padukuhan Karanganyar
2	CANDRIKA AYU PRATAMI	Agen Pemulihan	Padukuhan Karanganyar
3	TRIONO	Agen Pemulihan	Padukuhan Kebonromo
4	AGUS SUKRISTYO SAYEKTI	Agen Pemulihan	Padukuhan Nglengkong
5	DEWI KARUNIA	Agen Pemulihan	Padukuhan Grigak

Ditetapkan di : Giripurwo
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

LURAH GIRIPURWO



MARDI SANTOSA



**KEPUTUSAN LURAH CERME
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI KALURAHAN CERMETAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa permasalahan Narkoba semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih optimal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;

c. bahwa untuk memudahkan akses rehabilitasi berkelanjutan bagi penyalahguna Narkoba di wilayah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Lurah Cerme tentang Pembentukan Agen Pemulihan Layanan Pascarehabilitasi Tahun 2024;

e. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 09 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota.
5. Surat Pengesahan DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 Nomor : SP DIPA 000.01.2.682494/2024 tanggal 24 November 2023;
6. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 309/A/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Kalurahan/Kelurahan Bersih Narkotika Tahun 2021;
7. Keputusan Kepala BNN RI Nomor : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Lingkungan BNN Provinsi/Kab/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Kepala BNNP DIY Nomor : KEP/15/II/KA/RH/2024/BNNP tentang Penetapan Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat Terbentuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama yang tersebut dalam surat keputusan ini sebagai Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Kalurahan Cerme dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : **Tugas Agen Pemulihan adalah sebagai berikut :**
- a. Melakukan Sosialisasi / memberikan informasi tentang

- pengenalan IBM dan kegiatannya dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- b. Melakukan pemetaan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah sekitar sebagai dasar kegiatan penjangkauan dan pengembangan IBM ;
 - c. Melakukan penjangkauan dengan membangun hubungan dengan pengguna narkoba, keluarganya atau masyarakat disekitarnya serta kemudian mendorongnya agar memanfaatkan layanan IBM;
 - d. Melakukan layanan pemulihan antara lain :
 - a) skrining menggunakan DAST 10
 - b) penerimaan awal
 - c) Layanan intervensi (layanan wajib, layanan pilihan, dan bina lanjut/pemantauan)
 - d) Pertemuan kelompok
 - e. Melakukan bina lanjut/pemantauan, kegiatan ini merupakan lanjutan layanan intervensi untuk melakukan pendampingan lebih lanjut agar klien dapat memperkuat dan menjaga pemulihannya, dengan melakukan :
 - a) Pemantauan
 - b) Pengembangan diri
 - c) Layanan intervensi sesuai kebutuhan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Kepala BNNP DIY dan Kepala Desa setempat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Surat Pengesahan DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 Nomor : SP DIPA-066.01.2.682494/2024 tanggal 24 November 2023 sesuai

peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2024



DAFTAR AGEN PEMULIHAN KALURAHAN CERME

No	Nama	Jabatan	Wilayah
1	2	3	4
1	Ngatijan	Agen Pemulihan	Dusun Kalikepek I dan Kelikepek II
2	Martati	Agen Pemulihan	Dusun Nglarangan III dan Nglarangan IV
3	Virsia Fani Prasitha Devi	Agen Pemulihan	Dusun Bangmalang V dan Bangmalang VI
4	Sugiyanto	Agen Pemulihan	Dusun Cerme VII dan Cerme VIII
5	Akhirul Kurniawan	Agen Pemulihan	Dusun Gesikan IX dan Gesikan X

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal 1 Maret 2024



LAMPIRAN 6



Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor: ST/264/I/RH.02.03/2024/De.Rehab

Dalam
Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi
Bagi Penyalah Guna Narkotika

SNI 8807:2022

(Pemenuhan 70%-90%)

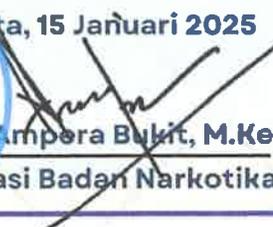
Diberikan Kepada :

Klinik Pratama Wira BNNK Kota Yogyakarta

atas keberhasilan sebagai

Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Tipe III

Jakarta, 15 Januari 2025


dr. Bina Ampora Bukit, M.Kes

Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/108/II/DE/RH.02.03/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Exp
Perihal : Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi SNI
Target Prioritas Nasional Tahun 2024

Jakarta, 10 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan evaluasi pemenuhan standar SNI 8807:2022 terhadap lembaga rehabilitasi milik BNN dan Mitra BNN dalam program Prioritas Nasional (PN) yang dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November 2024. Terlampir merupakan daftar lembaga rehabilitasi serta pemenuhan klasifikasi tipe yang diperoleh, adapun e-sertifikat akan diberikan menyusul melalui email.

3. Berdasarkan dengan butir dua diatas, dimohon Kepala untuk dapat terus menerus melakukan pembinaan dan mempertahankan kualitas layanan agar penyelenggaraan rehabilitasi dapat diberikan dapat efektif dan efisien.

4. Demikian.....

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Januari 2025
an. Kepala **Badan Narkotika Nasional**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Kepala BNNKab/Kota;
5. Pimpinan Lembaga Rehabilitasi.

DAFTAR TERLAMPIR

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Selatan
4. Kepala BNNP Riau
5. Kepala BNNP Jambi
6. Kepala BNNP Lampung
7. Kepala BNNP Bangka Belitung
8. Kepala BNNP Banten
9. Kepala BNNP DKI Jakarta
10. Kepala BNNP Jawa Barat
11. Kepala BNNP Jawa Tengah
12. Kepala BNNP DIY
13. Kepala BNNP Jawa Timur
14. Kepala BNNP Kalimantan Barat
15. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
16. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
17. Kepala BNNP Bali
18. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
19. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
20. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
21. Kepala BNNP Sulawesi Utara
22. Kepala BNNP Gorontalo
23. Kepala BNNP Maluku
24. Kepala BNNP Maluku Utara
25. Kepala BNNP Papua

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Januari 2025
an. Kepala Badan Narkotika Nasional



**HASIL CAPAIAN STANDARDISASI
KLINIK/LEMBAGA REHABILITASI SESUAI SNI 8807:2022**

No	Provinsi	Nama Lembaga	Setting	Rekomendasi Tipe
1	Aceh	Klinik Pratama BNNP Aceh	Rajal Medis	3
2	Sumatera Utara	Klinik Pratama BNNK Binjai	Rajal Medis	3
3	Sumatera Utara	Yayasan Amelia	Ranap Sosial	3
4	Sumatera Utara	Klinik Pratama BNNK Tebing Tinggi	Rajal Medis	3
5	Sumatera Utara	Klinik Pratama BNNK Pematang Siantar	Rajal Medis	3
6	Jambi	RSJ Daerah Provinsi Jambi	Ranap Medis	3
7	Jambi	Karunia Insani Jambi	Ranap Sosial	3
8	Sumatera Selatan	Klinik BNNK OKU Timur	Rajal Medis	3
9	Sumatera Selatan	RSJ Ernaldi Bahar	Ranap Medis	1
10	Riau	Yayasan Sarasehan	Ranap Sosial	3
11	Riau	Yayasan Gemuni	Ranap Sosial	3
12	Lampung	Klinik Pratama BNNP Lampung	Rajal Medis	3
13	Lampung	Klinik Pratama BNNK Metro	Rajal Medis	3
14	Bangka Belitung	Klinik Pratama BNNK Belitung	Rajal Medis	3
15	Banten	Klinik Pratama BNNK Cilegon	Rajal Medis	3
16	Banten	Klinik Pratama BNN Kota Tangerang	Rajal Medis	3

No.	Provinsi	Nama Lembaga	Setting	Rekomendasi Tipe
17	DKI Jakarta	Klinik IPWL BNN	Rajal Medis	2
18	DKI Jakarta	Klinik Pratama BNNK Jakarta Timur	Rajal Medis	3
19	DKI Jakarta	Klinik Pratama BNNK Jakarta Selatan	Rajal Medis	2
20	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNK Cirebon	Rajal Medis	3
21	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNK Kuningan	Rajal Medis	3
22	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNP Jawa Barat	Rajal Medis	2
23	Jawa Tengah	Klinik Pratama BNNK Magelang	Rajal Medis	2
24	Jawa Tengah	Klinik Pratama BNNK Temanggung	Rajal Medis	2
25	Jawa Tengah	Puskesmas Karanganyar	Rajal Medis	3
26	D.I. Yogyakarta	Klinik Abhipraya BNNK Bantul	Rajal Medis	3
27	D.I. Yogyakarta	PABM NAWACITA	Ranap Sosial	3
28	Jawa Timur	Klinik Pratama BNNK Gresik	Rajal Medis	3
29	Jawa Timur	Klinik Pratama BNNK Tuban	Rajal Medis	3
30	Jawa Timur	Klinik Pratama BNNK Blitar	Rajal Medis	3
31	Jawa Timur	Yayasan Merah Putih	Ranap Sosial	3

No.	Provinsi	Nama Lembaga	Setting	Rekomendasi Tipe
32	Kalimantan Barat	Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya	Rajal Medis	3
33	Kalimantan Barat	Klinik Pratama BNNK Pontianak	Rajal Medis	3
34	Kalimantan Tengah	Klinik Pratama BNNP Kalteng	Rajal Medis	3
35	Kalimantan Tengah	RSJD Kalawa Atei	Ranap Medis	3
36	Kalimantan Selatan	Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin	Rajal Medis	3
37	Kalimantan Selatan	Klinik Pratama BNNK Balangan	Rajal Medis	3
38	Bali	Klinik Pratama BNNK Buleleng	Rajal Medis	3
39	Nusa Tenggara Barat	RSJ Mutiara Sukma	Ranap Medis	1
40	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama BNNP Sulawesi Selatan	Rajal Medis	3
41	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama BNNK Bone	Rajal Medis	3
42	Sulawesi Tengah	Klinik Pratama BNNK Palu	Rajal Medis	3
43	Sulawesi Utara	Klinik Pratama BNNP Sulawesi Utara	Rajal Medis	3
44	Sulawesi Utara	Klinik BNNK Bolaang Mangondow	Rajal Medis	3
45	Gorontalo	Klinik Pratama BNN Kota Gorontalo	Rajal Medis	3

No.	Provinsi	Nama Lembaga	Setting	Rekomendasi Tipe
46	Maluku	Klinik Pratama BNNP Maluku	Rajal Medis	3
47	Maluku Utara	Klinik Pratama BNNP Maluku Utara	Rajal Medis	3
48	Papua	Klinik Pratama Kenambai Umbai BNN Kabupaten Jayapura	Rajal Medis	3

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Januari 2025
an. Kepala **Badan Narkotika Nasional**





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/125/II/DE/RH.02.03/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) exp
Perihal : Hasil Evaluasi Pemenuhan SNI Target
Wilayah (Reguler) Th. 2024

Jakarta, 10 Januari 2025

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Direktorat PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi terhadap lembaga rehabilitasi target wilayah (regular) BNNP/BNNK/Kab pada bulan Desember 2024 dengan target pemenuhan 70 %. Adapun daftar lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI tahun 2024 terlampir dengan e-sertifikat menyusul.

3. Berdasarkan dengan butir dua, dimohon Kepala untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga tercapai pemenuhan 100% pada tahun 2025.

4. Demikian...

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Pimpinan Lembaga Rehabilitasi.

DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI TARGET WILAYAH (REGULER)
YANG MEMENUHI SNI 8807:2022 TAHUN 2024

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5
1	Aceh	Yayasan Al Fatha	Rawat Inap Sosial	83,33
2	Sumatera Utara	Klinik Pratama BNNK Labuhanbatu Utara	Rawat Jalan Medis	88.46
3		RSJ Prof.Dr.M Ildrem	Rawat Inap Medis	94.32
4	Sumatera Selatan	Klinik Pratama BNN Kabupaten Empat Lawang	Rawat Jalan Medis	94.87
5	Sumatera Barat	RSJ Prof HB. Saanin	Rawat Inap Medis	94.32
6	Riau	Yayasan Rumah Solid	Rawat Inap Sosial	80.77
7	Lampung	RSJ Lampung	Rawat Inap Medis	88.64
8	Kepulauan Bangka Belitung	Klinik Pratama BNNK Pangkalpinang	Rawat Jalan Medis	89.74
9	Bengkulu	Klinik Pratama BNNK Bengkulu Selatan	Rawat Jalan Medis	89.74
10	DKI Jakarta	Puskesmas Tanjung Priuk	Rawat Jalan Medis	82.05
11		Klinik Sisma Medikal Warakas	Rawat Jalan Medis	91.03
12	Banten	Yayasan Sahabat (Sakinah Harakah)	Rawat Jalan Sosial	95,16
13	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNK Bogor	Rawat Jalan Medis	98,72
14		Klinik Pratama BNNK Tasikmalaya	Rawat Jalan Medis	92.31
15		Klinik Bunda Aulia Jabar	Rawat Jalan Medis	92.31
16		Yayasan Rehab Korban	Rawat Jalan Sosial	90.32

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5
		Narkoba Bekasi		
17	Jawa Tengah	Klinik Pratama BNNK Tegal	Rawat Jalan Medis	87.18
18		Klinik Pratama BNNK Purbalingga	Rawat Jalan Medis	96.15
19		Klinik Pratama BNNK Kendal	Rawat Jalan Medis	96.15
20	DI Yogyakarta	Klinik Pratama Wira BNNK Kota Yogyakarta	Rawat Jalan Medis	92.31
21	Jawa Timur	Klinik Pratama Banyak Wide BNN Kab Lumajang	Rawat Jalan Medis	89.74
22		Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kab Sumenep	Rawat Jalan Medis	91.03
23		Ghana Recovery Kab Pamekasan	Rawat Inap Sosial	78.21
24	Kalimantan Utara	Yayasan Sekata Tarakan	Rawat Jalan Sosial	79.03
25	Kalimantan Barat	Yayasan Garatak Sambas	Rawat Inap Sosial	80.77
26	Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Rawat Jalan Medis	97.44
27	Kalimantan Selatan	Klinik Pratama BNNK Barito Kuala	Rawat Jalan Medis	80.77
28		Klinik Utama Mubarak	Rawat Jalan Medis	74.36
29	Sulawesi Utara	Yayasan Bunda Meifa	Rawat Jalan Sosial	80.65
30		Klinik Pratama BNNK Bitung	Rawat Jalan Medis	84.62
31	Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu Mamuju	Rawat Jalan Medis	75.64
32	Sulawesi Selatan	Puskesmas Watampone	Rawat Jalan Medis	70.51
33		Yayasan Prana Waksara	Rawat Jalan Sosial	74,19
34	Bali	Yayasan Anargya Sober	Rawat Inap Sosial	98.72

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5
		House Denpasar		
35		Yayasan Satu Nusa Bali	Rawat Inap Sosial	91.03
36	Nusa Tenggara Barat	Yayasan Generasi Metro Bersinar	Rawat Inap Sosial	89.74
37	Gorontalo	Klinik Pratama BNNK Boalemo	Rawat Jalan Medis	94.87
38		Klinik Pratama BNNK Bone	Rawat Jalan Medis	89.74
39	Papua Barat	RSAL dr. Azhar Zahir Manokwari	Rawat Jalan Medis	71.79



LAMPIRAN 7



Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/15/II/KA/RH/2024/BNNP

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT TERBENTUK

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY

- Mengingat :
- a. bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa / Kalurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa / Kalurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/Kalurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNNP DIY.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi / Kabupaten / Kota Tahap pertama Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 Nomor : SP DIPA-066.01.2.682494/2024 tanggal 23 November 2023;
10. Program Kerja Bidang Rehabilitasi BNNP DIY Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT TERBENTUK DI KALURAHAN GIRIPURWO DAN KALURAHAN CERME KABUPATEN KULON PROGO**
- KESATU : Menunjuk kedua Kalurahan tersebut sebagai lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), terhitung mulai 22 Februari s.d 31 Desember 2024.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengguna Narkoba dengan memanfaatkan fasilitasi dan potensi masyarakat. Masyarakat yang melaksanakan kegiatan masing-masing Kalurahan berjumlah 5 Agen Pemulihan, dengan total 10 Agen Pemulihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 Nomor : SP DIPA-066.01.2.682494/2024 tanggal 23 November 2023 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 28 Februari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : KEP/012/III/KA/RH/2024/BNNK

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNIT IBM
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya rehabilitasi berkelanjutan Melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) maka perlu menunjuk dan menetapkan Agen Pemulihan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul tentang Penugasan Agen Pemulihan di Bantul.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 - 2024;
- d. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/15/II/KA/PM.01/2023/BNN Januari 2024 tentang Data Kawasan Rawan Narkoba 2023 Sebagai Rujukan Pelaksanaan Program Sinergitas Pada Kegiatan P4GN di Lingkungan BNN;

- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 210 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantu tahun 2021 tentang Kalurahan Narkoba;
- g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul TA 2023 Nomor : SP DIPA-066.01.2.040173/2024 tanggal 28 November 2023;
- h. Program Kerja Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Bantul TA 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BNNK BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI KALURAHAN POTORONO.**
- KESATU : Menunjuk Kalurahan Potorono sebagai lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) , terhitung mulai Januari s.d Desember 2024.
- KEDUA : Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengguna Narkoba dengan memanfaatkan fasilitasi dan potensi masyarakat. Anggota Masyarakat yang melaksanakan kegiatan IBM berjumlah 5 Agen Pemulihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Nomor SP DIPA- 066.01.2.040173/2024 Tanggal 28 November 2023 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 05 Februari 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

\$(qrcode)





KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : KEP/011/III/KA/RH/2024/BNNK

TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNIT IBM
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya rehabilitasi berkelanjutan Melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) maka perlu menunjuk dan menetapkan Agen Pemulihan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul tentang Penugasan Agen Pemulihan di Bantul.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 - 2024;
- d. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/15/II/KA/PM.01/2023/BNN Januari 2024 tentang Data Kawasan Rawan Narkoba 2023 Sebagai Rujukan Pelaksanaan Program Sinergitas Pada Kegiatan P4GN di Lingkungan BNN;
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 210 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantu tahun 2021 tentang Kalurahan Narkoba;

g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul TA 2023 Nomor : SP DIPA-066.01.2.040173/2024 tanggal 28 November 2023;

h. Program Kerja Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Bantul TA 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BNNK BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI KALURAHAN BANGUNHARJO.**
- KESATU : Menunjuk Kalurahan Bangunharjo sebagai lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) , terhitung mulai Januari s.d Desember 2024.
- KEDUA : Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengguna Narkoba dengan memanfaatkan fasilitasi dan potensi masyarakat. Anggota Masyarakat yang melaksanakan kegiatan IBM berjumlah 5 Agen Pemulihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Nomor SP DIPA- 066.01.2.040173/2024 Tanggal 28 November 2023 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 04 Februari 2024

\$(qrcode)

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : KEP/13/II/KA/RH.01/2024/BNNK
TENTANG
PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta.
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Kota Yogyakarta tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta Nomor: SP DIPA-066.01.2.045165/2024 tanggal 28 November 2023.
 14. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: NOMOR : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahab Pertama Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Unit IBM sebagai berikut:

1. Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta
2. Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna

narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, terhitung mulai bulan ditetapkannya sampai dengan bulan Desember 2024.

- KEDUA : Menetapkan unit IBM yang terbentuk sebagai unit IBM dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalahguna narkotika kategori ringan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 28 Februari 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA YOGYAKARTA





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 9 (sembilan) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2024;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Desember 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi capaian program, faktor pendukung serta penghambat implementasi program IBM sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di tahun anggaran 2025.

3. Hasil evaluasi operasionalisasi unit IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Capaian fase perkembangan unit IBM

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota serta telaah bukti dukung pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian fase perkembangan unit IBM sebagai berikut:

- Sebanyak 99 unit IBM (23,68%) memenuhi indikator fase Prima
- Sebanyak 221 unit IBM (52,97%) memenuhi indikator fase Tangguh
- Sebanyak 49 unit IBM (11,72%) memenuhi indikator fase Berkembang
- Sebanyak 32 unit IBM (7,66%) memenuhi indikator fase Tumbuh
- Sebanyak 15 unit IBM (3,59%) memenuhi indikator fase Rintisan
- Sebanyak 2 unit (0,48%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 401 unit (95,93%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi, Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta AP telah dapat menemu kenali dan berhasil menjangkau klien untuk dilakukan skrining dengan menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya kemudian klien diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan IBM

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Idealnya, kegiatan IBM dilakukan pada awal program dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi dalam memajukan program IBM. AP dalam melakukan kegiatan IBM senantiasa memerlukan pendampingan intensif dari petugas BNNP & BNNK/ Kota. Dari hasil evaluasi di Tahun 2024 ini AP telah melakukan sosialisasi IBM sebanyak 3.277 kali kepada 73.749 audiens, pemetaan 1.330 kali, dan penjangkauan dilakukan kepada 3.073 orang.

c. Gambaran layanan IBM

Layanan intervensi IBM adalah rangkaian kegiatan yang diberikan oleh AP kepada klien IBM mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi wajib dan pilihan serta layanan bina lanjut. Layanan IBM diberikan oleh AP kepada klien tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota secara komprehensif serta keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat dalam upaya pemulihan dan pemantauan terhadap klien. Pada Tahun 2024 tercatat keterlibatan anggota keluarga/ orang terdekat dalam layanan IBM sejumlah 1.819 orang yang terdiri dari orang tua, kakak, adik, suami/ istri, paman/ bibi atau guru sebagai wali murid di sekolah, walaupun terdapat beberapa klien IBM yang memilih untuk tidak melibatkan keluarga dengan alasan takut, malu, ataupun berdomisili jauh dari keluarga.

d. Gambaran profil klien IBM

Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2024 sebanyak 2.310 orang dengan profil berikut:

- Mayoritas klien merupakan hasil penjangkauan AP yaitu 98,40% (2.273 orang)
- Sebanyak 93,90% (2.169 orang) klien berjenis kelamin laki-laki, dan kebanyakan dalam kelompok usia 17-25 tahun (38,01%) dan 26-35 tahun (26,36%)

- Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (53,12%), mayoritas bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan/ pekebun (35,19%) dan pelajar/ mahasiswa (25,19%)
- Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah shabu (34,88%), sedatif/ hipnotik (9,71%) dan kanabis (8,70%)

e. Gambaran Agen Pemulihan

Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang dipilih oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/ kelurahan, sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jumlah AP pada tahun 2024 ini terlapor sebanyak 2.210 orang, dengan berbagai latar belakang unsur masyarakat yang berbeda-beda, mayoritas adalah laki-laki dan berasal dari unsur tokoh masyarakat (29,50%).

f. Gambaran pendanaan mandiri untuk IBM

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 115 unit IBM (27,51%) telah memperoleh pendanaan mandiri untuk operasional unit IBM serta pelaksanaan kegiatan & layanan. Pendanaan mandiri ini merupakan hasil sosialisasi, koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh AP dengan pendampingan serta pembinaan penuh petugas BNNP & BNNK/Kota. Dukungan dana diperoleh dari desa, kelurahan, OPD, iuran/ sumbangan/ donasi, dan/ atau CSR dengan rentang nilai mulai dari Rp 875.000,- sampai dengan Rp 172.133.000,-.

g. Hasil survey kebermanfaatan program IBM terhadap lingkungan & Masyarakat

Dalam rangka mengetahui dampak kegiatan IBM serta kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat melalui petugas BNNP & BNNK/Kota melakukan survey berupa penyebaran pengisian kuesioner dengan menggunakan skala *likert* pemberian skor 0-4.

survey di lakukan terhadap 4.111 orang responden yang merupakan anggota masyarakat non AP di wilayah desa/ kelurahan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia 36-45 tahun (27,66%), merupakan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi IBM (72,39%). Berdasarkan hasil survey yang telah di lakukan tercatat bahwa mayoritas responden (92,36%) telah mengetahui keberadaan IBM di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, dari pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 0-4 yang berarti bahwa IBM dapat memberikan dampak sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

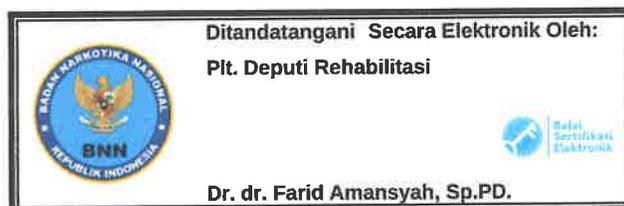
h. Identifikasi faktor pendukung & penghambat implementasi program IBM

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat faktor pendukung keberhasilan program IBM yang harus ditingkatkan, dan faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar dapat diatasi. beberapa faktor pendukung & faktor penghambat yang dikategorikan sesuai dengan pelaksana program IBM, diantaranya adalah:

- Petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota
- Agen Pemulihan (AP)
- Kepala Desa/ Lurah

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2024. Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) di IBM dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN

**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
Prima (99 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim	Sei Dadap	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Hasak		Asahan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
20	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
21	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
22	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
23	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
24	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
25	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
26	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
27	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
28	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
29	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Sempur Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara
30	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
31	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
32	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
33	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
34	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
35	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
36	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
37	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
38	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
39	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
40	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
41	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
42	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
43	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggepol	Jumo	Kabupaten Temanggung
44	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
45	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
46	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
47	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkong	Kabupaten Purbalingga
48	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
49	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
52	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
53	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
54	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
55	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
56	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
57	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
58	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul
59	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
60	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
61	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
62	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
63	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
64	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
65	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar
66	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
67	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
68	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
69	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
70	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
71	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
72	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
73	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
74	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
75	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
76	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
77	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
78	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
79	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
80	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Kecamatan Jambangan	Kota Surabaya
81	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Kecamatan Rungkut	Kota Surabaya
82	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
83	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
84	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
85	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
86	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
87	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
88	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
89	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
90	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
91	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan	Palu Utara	Kota Palu

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Mamboro Barat		
92	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
93	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
94	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
95	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
96	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
97	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
98	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
99	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
Tangguh (221 unit)					
1	Aceh	BNNP ACEH	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP ACEH	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
7	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
11	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
12	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
13	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
16	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
17	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
18	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
19	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
20	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
21	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
23	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar
24	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematangsiantar
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
31	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
32	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
33	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
36	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
37	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
38	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
39	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancah Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
40	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
41	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Kandis	Kandis	Kabupaten Siak

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Kota		
42	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
43	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
44	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
45	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
46	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
47	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
48	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
49	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
50	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
51	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
52	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
53	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
54	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
55	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi
56	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
57	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
58	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
59	Sumatera Selatan	BNNP SUMATERA SELATAN	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin
60	Sumatera Selatan	BNN Provinsi Sumatera Selatan	Desa Gasing	Talang Kelapa	Banyuasin
61	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
62	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
63	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
64	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Gula Baru	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
65	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
66	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Selatan
67	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur
68	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
69	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
70	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
71	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
72	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
73	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
74	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
75	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
76	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
77	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
78	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
79	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
80	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
81	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
82	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
83	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
84	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
85	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
86	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
87	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
88	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
89	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
90	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
91	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Jakarta Barat
92	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
93	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
94	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
95	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
96	Banten	BNNP BANTEN	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
97	Banten	BNNP BANTEN	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
98	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
99	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
100	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
101	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
102	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
103	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
104	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
105	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
106	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracandong	Kota Bandung
107	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
108	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
109	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
110	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
111	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
112	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpunan	Kabupaten Sukabumi
113	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
114	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cislak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
115	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Cina		
116	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
117	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
118	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
119	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
120	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
121	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
122	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta
123	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
124	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
125	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
126	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
127	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
128	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
129	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
130	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
131	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
132	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
133	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Pandanarum	Tempeh	Kabupaten Lumajang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
135	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
136	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
137	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
138	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
139	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
140	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
141	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
142	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
143	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Kalimook	Kalianget	Sumenep
144	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
145	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
146	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
150	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
151	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
157	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
158	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
159	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
160	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
161	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
162	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
163	Kalimantan	BNN Kab. Barito	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Selatan	Kuala			Barito Kuala
164	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
165	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
166	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
167	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
168	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
169	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
170	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
171	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
172	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
173	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
174	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
175	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
176	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
177	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
178	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
179	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
180	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
181	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado
182	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karame	Singkil	Kota Manado
183	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
184	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
185	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
186	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
187	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
188	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
189	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
190	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
193	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
194	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
195	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka
196	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka
197	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
198	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
199	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
200	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
201	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
202	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
203	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
204	Maluku	BNNP MALUKU	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
205	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
206	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar El	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
207	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
208	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
209	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
210	Bali	BNNP BALI	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
211	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
212	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
213	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
214	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
215	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
216	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
217	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
218	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Bullide	Kota Barat	Kota Gorontalo
219	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulabutao	Dungingi	Kota Gorontalo
220	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kampung Aimasi	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
221	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kelurahan Manokwari Barat	Kecamatan Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
Berkembang (49 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
4	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
7	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejawi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
10	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
11	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
12	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
13	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
14	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
15	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
16	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
19	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
20	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
21	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
22	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
23	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandangan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
24	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
26	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja
27	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
28	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
29	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
30	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
31	Maluku	BNNP MALUKU	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
32	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
33	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
34	Bali	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
35	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
36	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
37	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
38	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
39	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
40	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
41	NTB	BNN Kab.	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
		Sumbawa			Sumbawa
42	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
43	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
44	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
45	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
46	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
47	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	Papua	BNN Kab. Mimika	Inauga	Wania	Mimika
49	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
Tumbuh (32 unit)					
1	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
4	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
7	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
8	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoarjo	Kota Kediri
9	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
10	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
11	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Nipah-Nipah	Kecamatan Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
12	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
13	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
14	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
15	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
17	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
18	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
19	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
20	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
21	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
22	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
23	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
24	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
25	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
26	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
27	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
28	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
29	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
30	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
31	Papua	BNN Kab. Mimika	Sempan	Mimika Baru	Mimika
32	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
Rintisan (15 unit)					
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong le Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
3	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belintang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
5	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Benda Baru	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
6	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Benda	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
7	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
8	Kalimantan	BNN Kota Bontang	Kelurahan	Bontang Barat	Kota Bontang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Timur		Belimbing		
9	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
10	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
11	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
12	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
13	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
14	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
15	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
Pra Fase (2 unit)					
1	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
2	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara




 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Rehabilitasi

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

REKAPITULASI CAPAIAN FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM PER PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0	2	0	0	10	10
2	Sumatera Utara	0	0	0	1	21	10
3	Sumatera Barat	0	0	1	0	8	1
4	Riau	0	0	0	0	10	0
5	Jambi	0	0	0	0	8	0
6	Sumatera Selatan	0	1	4	7	7	1
7	Lampung	0	0	0	1	10	1
8	Kep. Bangka Belitung	0	1	1	0	5	3
9	Kepulauan Riau	0	0	1	0	7	0
10	Bengkulu	0	0	0	2	3	1
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	5	3
12	Banten	0	2	0	1	7	0
13	Jawa Barat	0	0	0	2	18	11
14	Jawa Tengah	0	0	0	0	9	11
15	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	8
16	Jawa Timur	0	0	1	0	14	22
17	Kalimantan Barat	0	0	0	8	6	2
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	6	0
19	Kalimantan Selatan	0	1	1	2	13	1
20	Kalimantan Timur	0	1	4	0	2	1
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	4	2
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	9	1
23	Sulawesi Tengah	0	2	3	1	3	5
24	Sulawesi Selatan	0	0	0	2	6	0
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0	3	7	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	4	0
27	Maluku	0	0	0	3	3	0

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tanggung	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Maluku Utara	2	0	3	0	3	0
29	Bali	0	2	4	2	2	4
30	NTB	0	0	0	6	2	2
31	NTT	0	2	3	3	0	0
32	Gorontalo	0	0	4	2	6	0
33	Papua	0	1	2	3	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	2	0

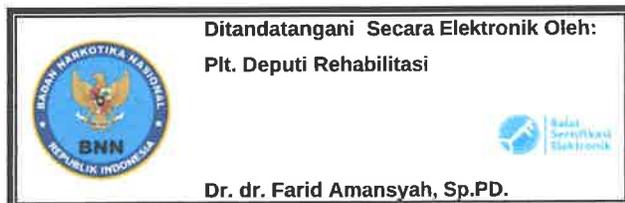


GAMBARAN KEGIATAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024



Kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota di tahun 2024 adalah:

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 3.277 kali, dengan total peserta/ audiens sejumlah 73.749 orang. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal, serta menggunakan media sosial. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.330 kali di 1.853 RT/ dusun/ banjar, dan memperoleh informasi estimasi jumlah penyalah guna narkotika sebanyak 6.613 orang. Kegiatan ini bertujuan memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.073 orang penyalah guna narkotika, dan yang bersedia ditindaklanjuti untuk masuk dalam layanan IBM adalah 2.346 orang. Kegiatan ini bertujuan mendekati penyalah guna narkotika dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan IBM. Secara umum, alasan para penyalah guna narkotika menolak mengikuti layanan di IBM antara lain karena merasa belum siap, malu, takut ditangkap polisi, tidak terganggu dengan penyalahgunaan zatnya, tidak diizinkan keluarga, atau sibuk bekerja.



GAMBARAN LAYANAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

Skrining & Penerimaan Awal



Layanan intervensi bagi penyalah guna narkoba di IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota, dengan gambaran berikut:

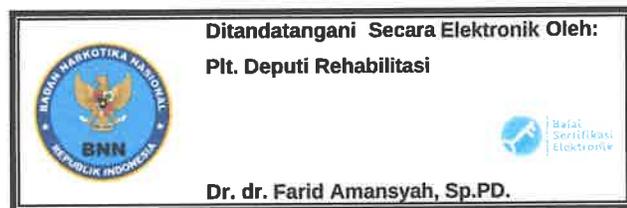
- Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi risiko gangguan penggunaan narkoba menggunakan instrumen *Drug Abuse Screening Test* (DAST-10). Jumlah penyalah guna yang diskri ning adalah 2.579 orang, dengan hasil:

- Tidak teridentifikasi adanya resiko : 97 orang (3,76%)
- Rendah : 2.158 orang (83,68%)
- Sedang : 243 orang (9,42%)
- Tinggi : 78 orang (3,02%)
- Sangat tinggi : 3 orang (0,12%)

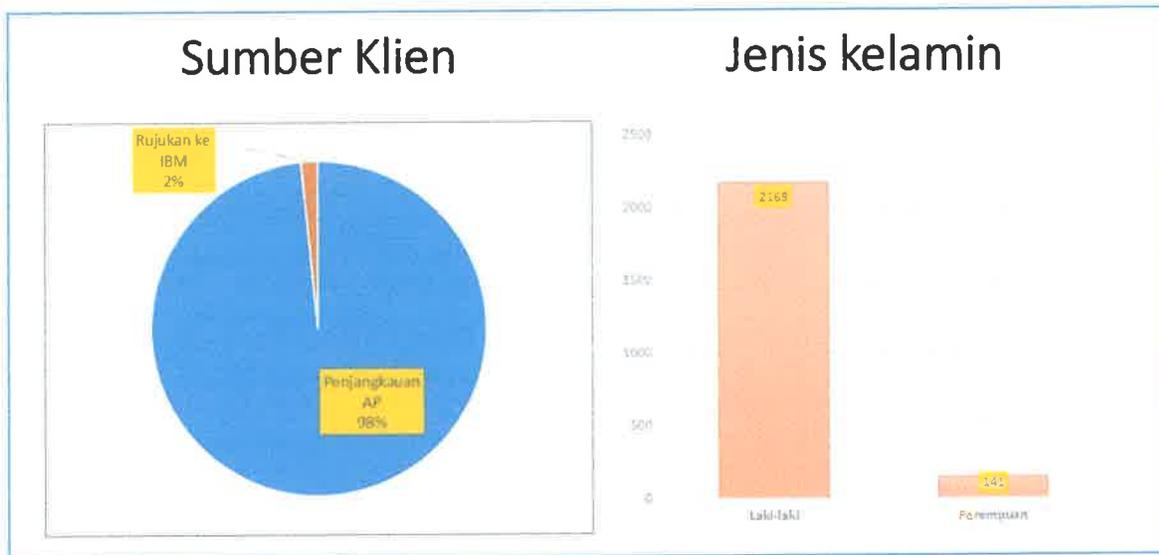
Klien yang dilayani di IBM adalah klien yang berada dalam kategori risiko Rendah hingga Sedang, dengan pendampingan petugas BNNP dan BNNKab/Kota.

- Penyalah guna yang telah diskriming dan dirujuk ke IBM untuk mengikuti layanan sebagai klien berjumlah 2.310 orang, semuanya telah mengikuti rangkaian Penerimaan Awal yaitu pengisian formulir registrasi, surat pernyataan kesediaan mengikuti layanan, serta formulir roda kehidupan.
- Klien IBM mengikuti layanan dalam waktu 16 minggu, terdiri dari:
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) telah diikuti oleh 2.298 orang klien. KIE bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan mendorong perubahan sikap dan perilaku klien.
 - Keterampilan Hidup telah diikuti 2.235 orang klien, bertujuan membekali klien IBM dengan *soft skill* agar dapat kembali beradaptasi, produktif dan melakukan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
 - Kunjungan diri telah diikuti 2.314 orang klien, yang bertujuan membina hubungan, melakukan pemantauan dan mengetahui kondisi klien dalam lingkungannya sehari-hari. Kunjungan diri juga dilakukan untuk menambah kelengkapan data/ informasi tentang klien melalui wawancara dengan klien dan/ atau dengan anggota keluarga serta hasil observasi lingkungan tempat tinggal klien.
 - Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) telah diikuti 2.128 orang klien secara berkelompok, bertujuan mendorong anggota kelompok untuk saling memberikan dukungan, bertukar pengalaman dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi dan harapan satu sama lain.
 - Pencegahan kekambuhan diikuti 2.084 orang klien secara berkelompok, yang bertujuan membantu klien mengenal faktor pemicu, cara menghindarinya dan membangun keterampilan untuk mengatasi rasa ketagihan serta keterampilan menolak narkoba.
 - Sebanyak 337 orang klien difasilitasi untuk rujukan, antara lain ke fasilitas rehabilitasi BNNP & BNNK/ Kota, Balai/ Loka Rehabilitasi BNN, Puskesmas/ RS, Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah/ komponen masyarakat, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan kerja para klien agar bisa mandiri dan produktif secara ekonomi.

- Sebanyak 2.000 orang (86,58% dari jumlah klien) telah mengikuti rangkaian layanan bin a lanjut, yaitu penilaian pascarehabilitasi, pemantauan, pendampingan pemulihan, dan t erminasi yang dilakukan secara simultan oleh AP dan petugas BNNP & BNNK/ Kota
- Sebanyak 2.217 orang klien dilakukan evaluasi perkembangan tahap awal yaitu URICA, WHO-QoL, dan tes urin. Sementara klien yang telah dilakukan evaluasi perkembangan t ahap akhir adalah 1.933 orang
- Pemulihan penyalah guna narkoba tidak mungkin lepas dari keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat. Pada tahun 2024, jumlah anggota keluarga/ orang terdekat yang dili batkan dalam layanan di IBM adalah 1.819 orang, terdiri dari orang tua, kakak, adik, sua mi/ istri, paman/ bibi atau guru. Beberapa klien IBM memilih untuk tidak melibatkan kelua rga dengan alasan takut, malu, atau berdomisili jauh dari keluarga.



GAMBARAN PROFIL KLIEN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

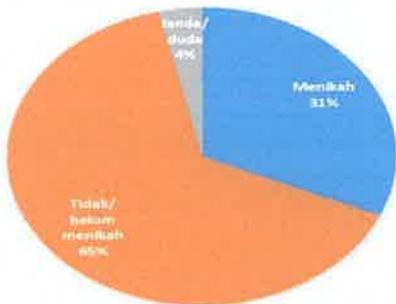


Total klien IBM pada tahun 2024 adalah 2.310 orang. Mayoritas merupakan hasil penjangkauan Agen Pemulihan, dan berjenis kelamin laki-laki.

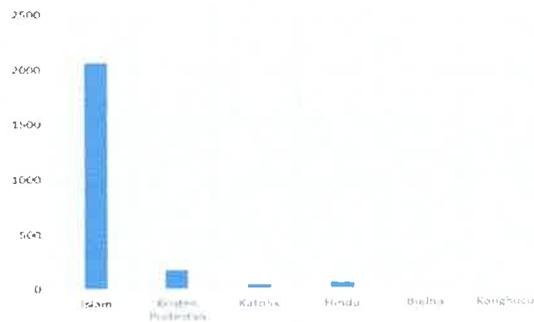


Mayoritas klien berada pada kelompok usia 17-25 tahun, dengan Pendidikan terakhir mayoritas adalah SMA/ sederajat, dan pekerjaan saat ini adalah buruh/ petani/ nelayan

Status Pernikahan

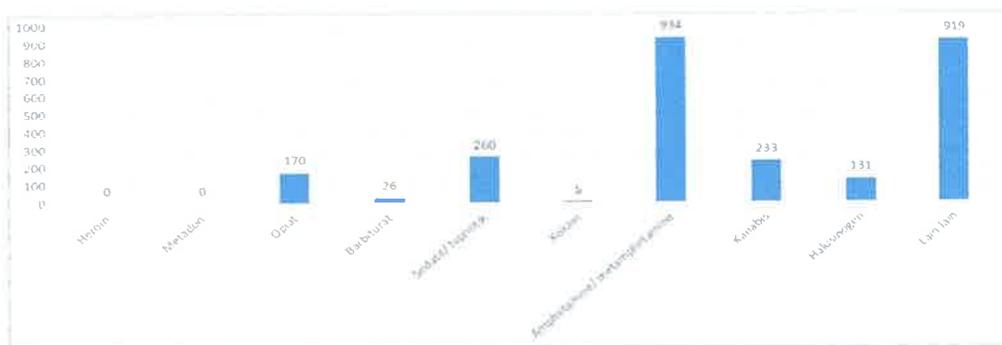


Agama



Mayoritas klien berstatus tidak/ belum menikah, dan mayoritas agama klien adalah Islam

Jenis zat yang digunakan saat ini



Ket: lain-lain mencakup alkohol, obat tanpa resep, inhalansi, komix, samcodin, zenit, bensin, tembakau gonia, hexynor, tramadol, kratom, LL, cansoprodol, DMP

Jenis zat terbanyak yang digunakan oleh klien IBM adalah shabu, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik seperti benzodiazepine, dan ganja

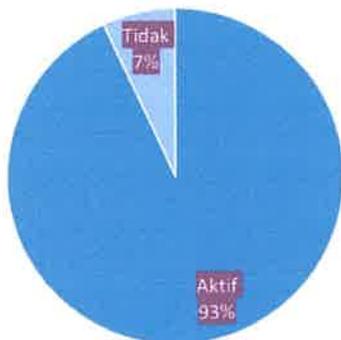


Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Pt. Deputi Rehabilitasi

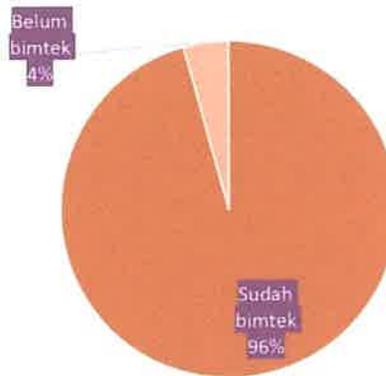
Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.


GAMBARAN AGEN PEMULIHAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM IBM TAHUN ANGGARAN 2024

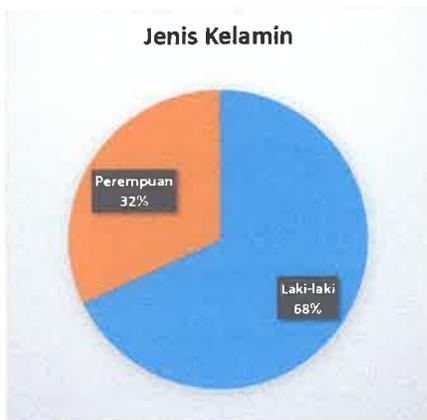
Keaktifan AP



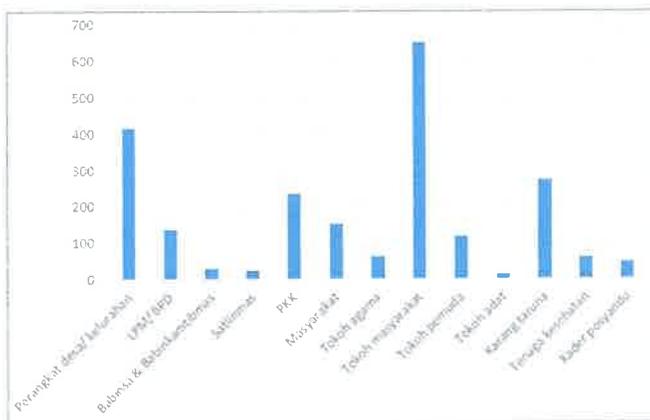
Bimtek AP



Jenis Kelamin



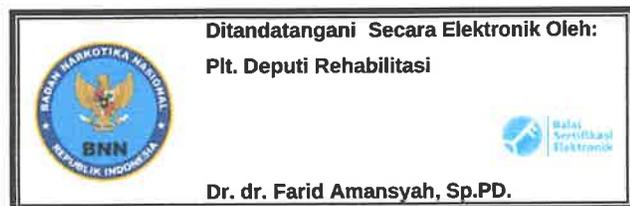
Latar Belakang Kemasyarakatan



Di tahun 2024, gambaran AP sebagai berikut:

- Jumlah AP tahun 2024 adalah 2.210 orang, dan dari jumlah tersebut hanya 92,94% (2.054 orang) yang aktif menjalankan kegiatan & layanan IBM
- Sebanyak 95,70% dari total AP (2.115 orang) telah dilatih oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) secara resmi, sementara sisanya memperoleh informasi dengan metode tular ilmu di antara sesama AP maupun saat asistensi oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota

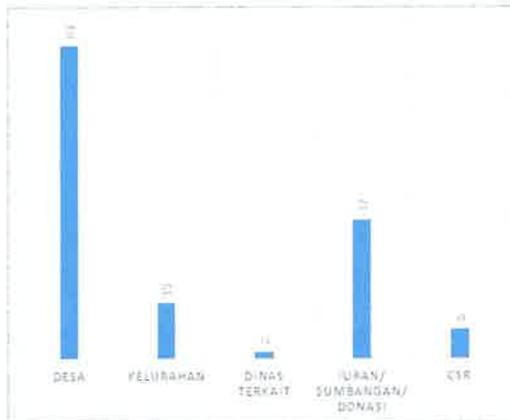
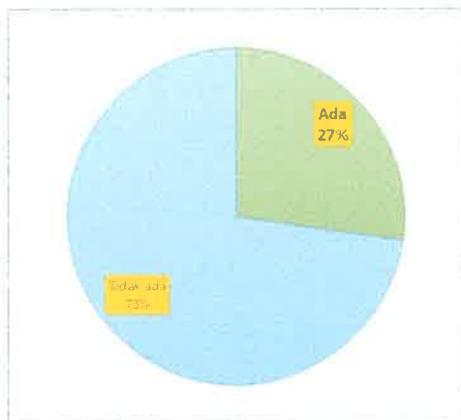
- Mayoritas AP yaitu 1.504 orang (68,05%) berjenis kelamin laki-laki
- Latar belakang AP dalam masyarakat terdiri dari:
 - Sebanyak 18,82% (416 orang) merupakan perangkat desa/ kelurahan, 12 orang di antaranya adalah Kepala Desa/ Lurah
 - Sebanyak 6,15% (136 orang) merupakan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Sebanyak 1,27% (28 orang) adalah perwakilan dari Babinsa dan Babinkamtibmas yang bertugas di Desa/ Kelurahan
 - Sebanyak 1,04% (23 orang) bertugas di Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
 - Sebanyak 10,59% (234 orang) adalah anggota Tim Penggerak PKK
 - Sebanyak 6,88% (152 orang) adalah perwakilan masyarakat, termasuk di antaranya mahasiswa, kelompok seni, pekerja sosial, penggiat/ relawan, dan organisasi kemasyarakatan
 - Sebanyak 2,81% (62 orang) adalah tokoh agama
 - Sebanyak 29,50% (652 orang) adalah tokoh masyarakat, termasuk di antaranya ketua RT, RW, kepala dusun, kepala lingkungan
 - Sebanyak 5,29% (117 orang) adalah tokoh pemuda
 - Sebanyak 0,59% (13 orang) adalah tokoh adat
 - Sebanyak 12,31% (272 orang) adalah ketua maupun anggota karang taruna
 - Sebanyak 2,67% (59 orang) adalah tenaga kesehatan, termasuk di antaranya adalah dokter, perawat dan petugas puskesmas, juga bidan desa
 - Sebanyak 2,08% (46 orang) adalah kader posyandu



**GAMBARAN PENDANAAN MANDIRI UNTUK UNIT IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pendanaan mandiri

Sumber



Pada tahun 2024, sebanyak 115 dari 418 unit IBM (27,51%) telah memperoleh dukungan pendanaan mandiri, mayoritas berasal dari pemerintah desa. Dukungan dari pihak kelurahan relatif lebih sulit diperoleh karena diperlukan adanya aturan hukum secara resmi yang mengatur hingga ke komponen dan sub komponen kegiatan. Dukungan dana bagi unit IBM yang lokasinya di kelurahan cenderung memanfaatkan iuran/ sumbangan/ donasi dari masyarakat maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan swasta yang berdomisili di lokasi tersebut. Daftar unit IBM yang memperoleh dukungan pendanaan tahun 2024 adalah:

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	APBG	Rp4,000,000	Pembuatan papan nama IBM, struktur, alur, dan kegiatan IBM lainnya
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	APBG	Rp3,000,000	Kegiatan IBM, pembuatan papan nama IBM, struktur organisasi, alur kegiatan
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	RAB Desa	Rp7,500,000	Peningkatan kompetensi satgas narkoba
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya	RAB Desa	Rp20,000,000	ATK, konsumsi, spanduk, honor

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		we	Punteuet			dan atribut satgas
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	RAB Desa	Rp8,864,000	Operasional IBM
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	RAB Gampong	Rp9,557,000	Studi banding ke lembaga rehabilitasi, operasionalisasi IBM
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	RAB Gampong	Rp8,000,000	Kegiatan IBM, insentif AP
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	RAB Desa	Rp10,953,052	Kegiatan IBM selama 10 bulan
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	RAB Desa	Rp10,000,000	Transport AP, kegiatan & layanan IBM
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan & layanan IBM
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	RAB Desa	Rp2,750,000	Honor AP
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	RAB Desa Sumbangan warga	Rp5,400,000	Honor AP, sewa posko IBM, konsumsi kegiatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Dana desa	Rp5,400,000	Transport & insentif bulanan AP
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	RAB Nagori	Rp6,000,000	Insentif AP
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	RAB Desa	Rp7,000,000	Honor AP
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	RAB Desa	Rp5,000,000	Honor AP
21	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	RAB Desa	Rp6,590,000	Sosialisasi IBM
22	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	RAB Desa	Rp10,000,000	Operasional Unit IBM
23	Sumatera	BNN Kota	Desa Tanjung	Dana desa	Rp3,000,000	Honor AP

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Selatan	Prabumulih	Telang			
24	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Dana desa	Rp25,000,000	Sosialisasi (termasuk desa bersinar)
25	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Dana desa	Rp40,000,000	Atribut AP, spanduk, kegiatan sosialisasi, ATK
26	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	RAB Desa	Rp3,000,000	
27	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	RAB Desa	Rp3,000,000	Honor AP
28	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	RAB Kampung	Rp2,594,000	Sosialisasi P4GN
29	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,550,000	Kegiatan & layanan IBM
30	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,850,000	Kegiatan & layanan IBM
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	RAB Desa	Rp3,500,000	Kegiatan IBM
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	RAB Desa	Rp41,760,000	Honor AP, kegiatan IBM
33	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Dana Kelurahan (pemberdayaan masyarakat)	Rp20,000,000	Sosialisasi P4GN
34	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp2,000,000	Kegiatan IBM, spanduk
35	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp3,450,000	Kegiatan IBM, flyer
36	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Dana kelurahan Sumbangan warga CSR	Rp6,750,000	Spanduk, Kegiatan IBM
37	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	RAB Desa	Rp15,000,000	Kegiatan IBM
38	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	RAB Desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM
39	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan P4GN
40	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp28,103,000	Operasional IBM
41	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Dana Kades	Rp7,300,000	Spanduk, transport AP, konsumsi

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
						kegiatan
42	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Dana Kades Sumbangan masyarakat	Rp3,000,000	Operasional IBM
43	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	RAB Desa	Rp8,850,000	Sosialisasi P4GN
44	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	RAB Desa	Rp9,000,000	Operasional IBM
45	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Sumbangan warga	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
46	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	RAB Desa	Rp15,000,000	Operasional IBM
47	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	RAB Desa	Rp15,005,400	Operasional IBM
48	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Sumbangan dari Kemensos	Rp5,100,000	Modal usaha klien IBM
49	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Sumbangan masyarakat CSR	Rp2,650,000	Operasional IBM
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	RAB Desa	Rp77,623,000	Desa Bersinar Kegiatan IBM (termasuk pembelian CCTV)
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	RAB Desa	Rp7,968,000	Sosialisasi/ penyuluhan
52	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Sumbangan masyarakat	Rp2,500,000	Operasional IBM
53	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Dana desa	Rp2,350,000	Atribut AP, transport klien, sosialisasi IBM
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	RAB Desa	Rp5,397,500	Penyuluhan penyalahgunaan narkotika
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Dana desa Sumbangan masyarakat	Rp8,100,000	Operasional IBM, banner
56	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	RAB Desa	Rp3,500,000	Operasional IBM
57	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp27,930,000	Sosialisasi P4GN, Rapat AP, sosialisasi
58	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	RAB Desa	Rp875,000	Transport AP
59	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	RAB Desa	Rp2,450,000	Sosialisasi IBM
60	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	APBDes	Rp8,000,000	Sosialisasi IBM
61	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	APBDes	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		A				
62	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Dana Kalurahan	Rp4,330,000	Kegiatan IBM
63	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	RAB Kelurahan LPMK	Rp6,589,800	Workshop P4GN, dukungan pendaftaran kejar paket untuk sekolah klien
64	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduharjo	RAB Kalurahan	Rp10,450,000	Layanan IBM
65	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduadi	RAB Kalurahan	Rp6,200,000	Sosialisasi IBM
66	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Dana desa	Rp3,666,000	Sosialisasi IBM
67	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	RAB Desa	Rp6,600,000	Sosialisasi IBM
68	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Dana desa luran masyarakat	Rp16,300,000	Operasional IBM
69	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Dana desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
70	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	RAB Desa Sumbangan kades	Rp10,442,000	Sosialisasi IBM + tambahan untuk tes urin
71	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	CSR luran AP	Rp3,250,000	Operasional IBM
72	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	CSR luran AP	Rp3,550,000	Operasional IBM
73	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	RAB Desa	Rp172,133,000	Operasional IBM dalam mendukung P4GN
74	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	RAB Desa	Rp20,000,000	Operasional IBM
75	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	RAB Kelurahan	Rp1,225,000	Sosialisasi bahaya napza
76	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	RAB Desa	Rp21,175,000	Sosialisasi IBM
77	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Dana pemberdayaan kelurahan Sumbangan lurah	Rp3,000,000	Sosialisasi IBM, transport klien
78	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	RAB Desa	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
79	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	luran warga	Rp2,500,000	operasional IBM
80	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Dana desa	Rp15,000,000	Atribut AP, sosialisasi IBM
81	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	RAB Desa	Rp10,000,000	Honor AP, transport klien
82	Jawa Timur	BNN Kab.	Desa	RAB Desa	Rp9,545,000	Honor AP,

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		Nganjuk	Kwagean			transport klien
83	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	RAB Kelurahan	Rp1,150,000	Kegiatan IBM, atribut AP
84	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	RAB Kelurahan	Rp10,000,000	Operasional IBM
85	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	RAB Kelurahan	Rp3,150,000	Operasional IBM
86	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	RAB Kelurahan	Rp8,052,000	Operasional IBM
87	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	APBDes	Rp2,500,000	Operasional IBM
88	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	APBDes	Rp17,365,000	Konsumsi & transport kegiatan IBM
89	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	luran masyarakat	Rp2,500,000	Kegiatan IBM
90	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Dana Lurah CSR	Rp6,200,000	Atribut AP, stiker, banner
91	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	luran masyarakat	Rp2,800,000	Operasional IBM
92	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	APBDes	Rp7,430,000	Operasional IBM
93	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	RAB Desa	Rp12,000,000	Kegiatan IBM, media sosialisasi
94	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	APBDes	Rp6,000,000	Kegiatan & layanan IBM
95	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Dana Kelurahan CSR	Rp50,500,000	Study Banding ke Babes Lido, atribut AP, operasional IBM
96	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Dinkes Bidang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Dana kelurahan	Rp. 3.625.000	Sosialisasi IBM
97	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	luran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
98	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	luran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
99	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	RAB Kampung	Rp4,075,000	Kegiatan IBM
100	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dana desa	Rp8,950,000	Atribut AP, kegiatan IBM
101	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan IBM, sarana prasarana, transport klien
102	Sulawesi	BNN Kota	Kelurahan	luran Pengusaha	Rp2,500,000	Operasional

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Tengah	Palu	Mamboro Barat			IBM
103	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM, transport AP untuk penjangkauan
104	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp16,639,000	transport AP, konsumsi kegiatan & layanan, honor AP
105	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Sumbangan masyarakat	Rp3,500,000	Kegiatan & layanan IBM
106	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	RAB Desa Donatur	Rp43,550,000	Kegiatan IBM
107	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	RAB Desa Donatur	Rp30,700,000	Kegiatan IBM
108	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Sumbangan	Rp4,076,000	Operasional IBM
109	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Sumbangan	Rp2,850,000	Operasional IBM, atribut AP
110	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
111	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
112	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	RAB Desa	Rp4,800,000	Sosialisasi, tes urin
113	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Anggaran desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
114	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	RAB Desa	Rp2,000,000	Operasional IBM
115	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	APBDes	Rp10,500,000	Kegiatan IBM



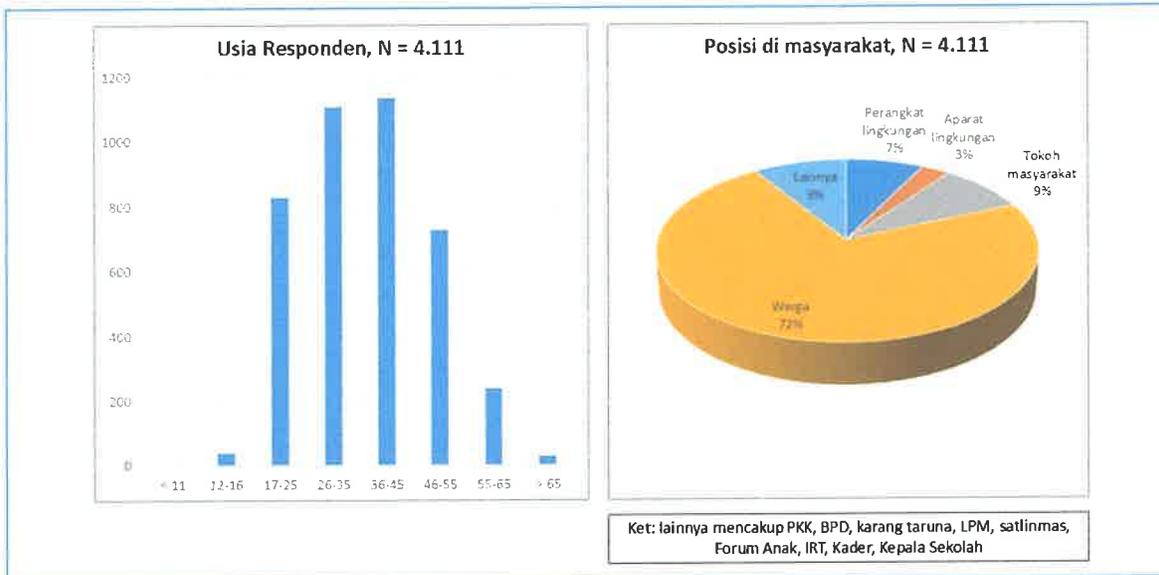
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VIII
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL : 30 Desember 2024

HASIL SURVEY KEBERMANFAATAN PROGRAM IBM

TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

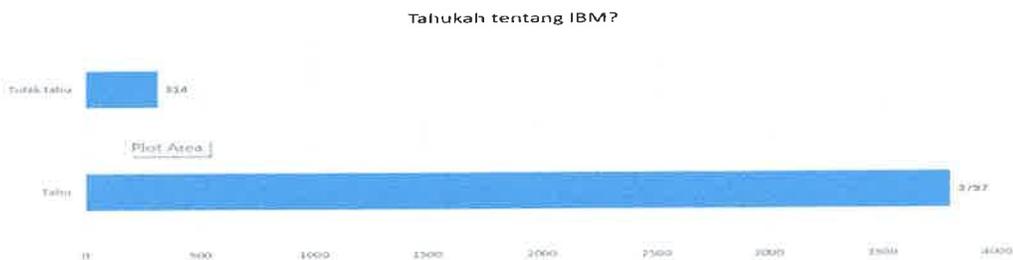
A. Data demografi responden



Mayoritas responden berada pada kelompok usia 36-45 tahun, dilanjutkan dengan selisih yang kurang signifikan dengan kelompok usia 26-35 tahun. Sebanyak 72% dari total responden merupakan warga masyarakat di lingkungan desa/ kelurahan Lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM

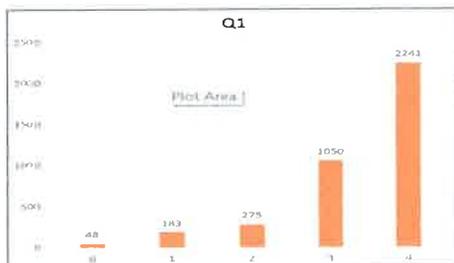
Pengetahuan tentang IBM (N = 4111 orang)



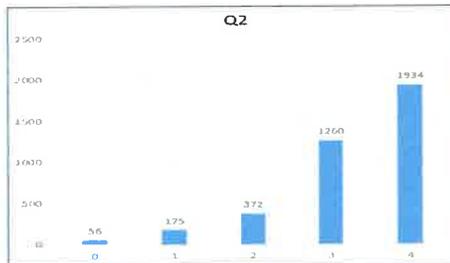
Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden (92,36%) mengetahui keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili

C. Hasil Pelaksanaan survey

Q1
Penjelasan dari kader tentang program IBM ke masyarakat

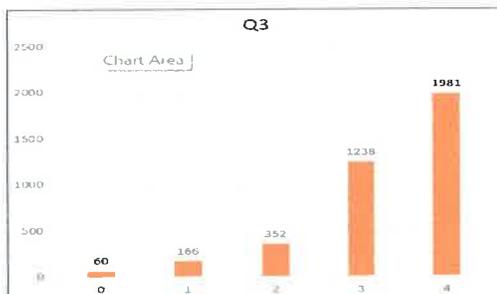


Q2
Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM

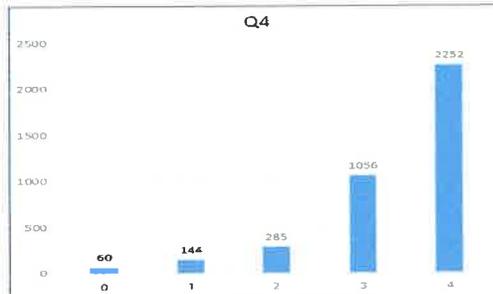


N = 3797 orang

Q3
Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba

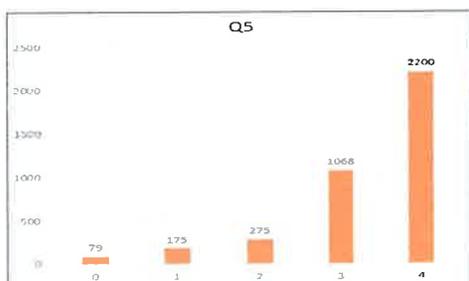


Q4
Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkoba

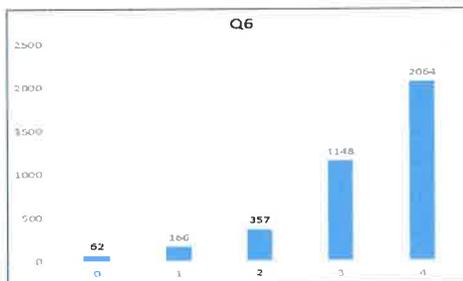


N = 3797 orang

Q5
Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM



Q6
Peran serta penyalah guna yang ikut program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal

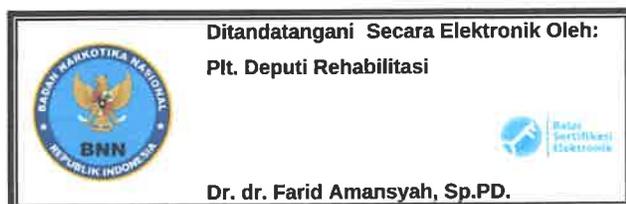


N = 3797 orang

Penjelasan hasil survey:

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
1	Penjelasan dari Agen Pemulihan tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkotika setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Lebih menilai peran IBM terhadap dampak kepada lingkungan menurut pengamatan masyarakat	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkotika di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkotika	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkotika dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkotika di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna	Agen Pemulihan melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkotika
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkotika. Dengan melibatkan keluarga, keluarga dapat paham bahwa masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkotika dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	Agen Pemulihan melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalahguna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkotika yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalahguna narkotika mulai peduli dan terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat (pengajian, 17 Agustusan, dsb).	Sangat berperan dalam kegiatan



**FAKTOR PENDUKUNG & PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
2	3
1. Petugas Pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota	
Pemahaman yang komprehensif akan program IBM, termasuk alur kegiatan & layanan serta alokasi anggaran yang tersedia	Pendampingan unit IBM tidak menjadi prioritas karena banyaknya program bidang/ seksi Rehabilitasi yang harus dilakukan, dengan keterbatasan SDM yang dimiliki
Terjalannya hubungan baik dengan AP dan kepala desa/ lurah di lokasi IBM sebagai hasil dari tingginya intensitas koordinasi dan advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media bukan hanya tatap muka	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.
2. Agen Pemulihan (AP)	
Kepedulian serta kesadaran diri dari AP di dukung oleh peran serta aktif dari lingkungan masyarakat sekitar akan dampak bahaya dari penyalahgunaan narkoba	Pemahaman yang kurang optimal serta ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan program IBM
Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai AP	Pelaksanaan program IBM tidak menjadi prioritas karena AP disibukkan dengan pekerjaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya
3. Kepala Desa/ Lurah	
Komitmen, minat dan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan dalam bidang rehabilitasi penyalah guna narkoba	Program IBM tidak menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan
Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya yang memerlukan penanganan segera	Penolakan data & informasi adanya masalah penyalahgunaan narkoba di wilayahnya



LAMPIRAN 8



Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id

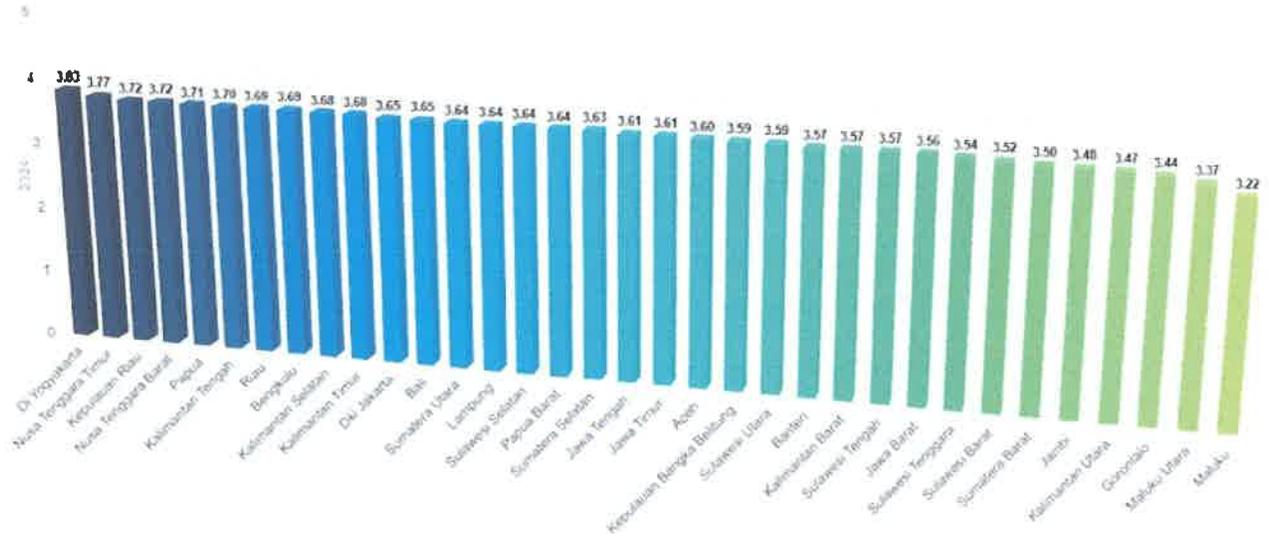


BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY

IKM PROVINSI RAWAT JALAN



3.79 (84,75%)

RIM

Skor RIM (0-100%)

30

Skor Dharma

Skor Dharma (0-100%)

1

Skor Anak

Skor Anak (0-100%)

A

Skor RIM

Skor RIM (0-100%)

27%

Kesimpulan

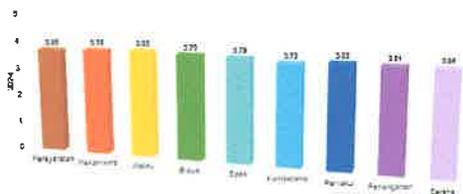
Kepuasan layanan rehabilitasi narkoba di lingkungan Direktorat Narkoba Departemen Diklat dan Manajemen Kepegawaian BNN Ditinjau dari kategori Sangat Baik (A), Berdasarkan uraian tersebut, layanan yang dinilai semua unsur memiliki skor berdasarkan **kecenderungannya**.

Kategori RIM

4,33 - 4,00 = Sangat Baik (A)
 3,67 - 4,32 = Baik (B)
 2,67 - 3,66 = Kurang Baik (C)
 1,67 - 2,66 = Tidak Baik (D)

Perbandingan Unsur RIM

2024



Unsur RIM

2024



LAMPIRAN 9



Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY

UNGKAP KASUS NARKOTIKA BNNP DIY TAHUN 2024

NO	LKN DAN NOMOR BERKAS	TERSANGKA	BRG BUKTI	TKP	MODUS OPERANDI	PASAL	KET.
1	LKN/0016-NAR/VIII/2023/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 30/08/2023	1. SA 2. ASP	Shabu 1.36 gram	1. Jalan Patih Singoranu, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta 2. Jl. Bima 14A Sokowaten Plumbon, Rt.006 Rw.000, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta	Peredaran gelap narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu	Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1), dan atau Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 10 Januari 2024
2	LKN/0018-NAR/XI/2023/BNNP D.I Yogyakarta Tanggal: 22/11/2023	BAM	Shabu 1,77 gram + 0,26 gram + 0,23 gram = 2,26 gram	Sengkan Joho RT. 006 RW. 059, Kel. Condongcatu, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Peredaran gelap narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu	Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 03 Januari 2024
3	LKN/0001-NAR/I/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 25/01/2024	1. NSA 2. IH 3. HTK	10 butir tablet Methamp hetamine berat brutto = 3,1 gram	Matahati Kostel Kusuma Kamar 01 Lantai 1 Blok Sadewa Jl. Veteran Gg. Ranudimejo, Rt.45 Rw.12, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta	Menerima barang dari atas, kemudian menggunakan secara bersama-sama.	Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 (1) Sub Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 06 Mei 2024

4	LKN/0002-NAR/II/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 07/02/2024	1. DYS	Shabu 22,39 gram	Kragilan, Rt. 001 / Rw. 008, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Menerima barang dari atas kemudian barang dipecah-pecah menjadi paket. Kemudian meletakkan paket di beberapa tempat kemudian di edarkan kepada pembeli / user melalui sistem alamat.	Pasal 114 (2) dan Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 29 Mei 2024
5	LKN/0003-NAR/III/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 19/03/2024	TA	Shabu 8,24 gram	Jl. Pogung Rejo Rt. 021 / Rw. 051, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I. Yogyakarta	Menerima barang atas perintah dari atas, kemudian barang dipecah-pecah menjadi paket. Kemudian paket ditaruh di suatu tempat yang alamatnya dikirimkan ke pengendali.	Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 12 Juni 2024
6	LKN/0004-NAR/IV/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 23/04/2024	YWP	Shabu 0,37 gram	Kos Bu Jum, Jl. Potrojoyo, Patran, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Menerima barang dari atas, kemudian di edarkan kepada pembeli/user.	Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 06 Juni 2024
7	LKN/0005-NAR/IV/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 24/04/2024	IP	Shabu 0,33 gram	Warteg Kharisma Bahari, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Menerima barang dari atas, kemudian di edarkan kepada pembeli/user.	Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 06 Juni 2024
8	LKN/0006-NAR/V/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 13/05/2024	ASA	Shabu 1,63 gram	Rumah Kost pedukuhan Keputren, Pleret, Kec. Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Menerima barang dari atas, kemudian barang dipecah-pecah menjadi paket. Kemudian paket di edarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 (1) dan / atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 14 Agustus 2024

9	LKN/0007-NAR/V/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 14/05/2024	1. UHS	Shabu 10,81 gram	Bekelan, RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasih, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Menerima barang dari atas, kemudian barang dipecah-pecah menjadi paket. Kemudian paket di edarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	2 Berkas Perkara <i>Berkas 1 an URIP P 21: 14 Agustus 2024</i>
10	LKN/0007-NAR/V/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 14/05/2024	2. BA 3. RAR	sda	Bekelan, RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasih, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Menerima barang dari atas, kemudian barang dipecah-pecah menjadi paket. Kemudian paket di edarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	<i>Berkas 2 an BAGAS dan RULLY P 21: 25 Juli 2024</i>
11	LKN/0008-NAR/V/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal : 19/05/2024	AK	-	JL. Bintara 14 No.23 KP Bojong Rt.006 Rw.014 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat	Menjadi perantara jual beli Narkotika dengan cara mengirimkan barang kepada seseorang untuk diedarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara <i>P 21: 14 Agustus 2024</i>
12	LKN/0009-NAR/VII/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 25/07/2024	SEC	Shabu 3,15 gram	Dalam rumah yang beralamat di Mojosari, RT/RW : 005/012, Kel. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, DIY	Menerima barang dari atas, kemudian di edarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 (2) dan Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara <i>P 21: 26 September 2024</i>
13	LKN/0010-NAR/VII/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 25/07/2024	HN	Shabu 6,13 gram	Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, DIY	Menjadi perantara jual beli Narkotika dengan cara mengirimkan barang kepada seseorang untuk diedarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 (2) dan / Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara <i>P 21: 10 Oktober 2024</i>
14	LKN/0011-NAR/VII/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 25/07/2024	TDWH	Shabu 14,81 gram	Komplek Yadara Blok IV/9, Babarsari Tambakbayan RT 020 RW 006, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY	Menjadi perantara jual beli Narkotika dengan cara mengirimkan barang kepada seseorang untuk diedarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 (2) dan / Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara <i>P 21: 18 September 2024</i>

15	LKN/0012-NAR/VII/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 27/07/2024	1. WS	Shabu 10,72 gram	Pujokusuman, RT 018 RW 004, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY	Menjadi perantara jual beli Narkotika dengan cara mengirimkan barang kepada seseorang untuk diedarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 (2) dan / Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	2 Berkas Perkara <i>Berkas 1 an WAHYU</i> P 21: 20 September 2024
16	LKN/0012-NAR/VII/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 27/07/2024	2. EDN	sda	Pujokusuman, RT 018 RW 004, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY	Menjadi perantara jual beli Narkotika dengan cara mengirimkan barang kepada seseorang untuk diedarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 (2) dan / Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	<i>Berkas 2 an ERI</i> P21: 9 Oktober 2024
17	LKN/0013-NAR/VIII/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 31/07/2024	1. BI	Shabu 1.665 gram	Urban View Griya Hotel, Jl Jogokaryan No 23, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY	Menjadi perantara jual beli Narkotika dengan cara mengirimkan barang kepada seseorang untuk diedarkan kepada pembeli/user.	Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	2 Berkas Perkara <i>Berkas 1 an BUDI</i> P 21: 29 November 2024
18	LKN/0013-NAR/VIII/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 31/07/2024	2. MP	sda	Urban View Griya Hotel, Jl Jogokaryan No 23, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY	Menjadi perantara jual beli Narkotika dengan cara mengirimkan barang kepada seseorang untuk diedarkan kepada pembeli/user.	Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	<i>Berkas 2 an MARDIANSYAH</i> P 21: 29 November 2024

19	LKN/0014-NAR/VIII/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 17/08/2024	WHMA	Ganja 50,97 gram	Dsn. Ngangkrik RT.07 RW.15, Kel. Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, DIY	Menjadi perantara jual beli Narkotika dengan cara mengirimkan barang kepada seseorang untuk diedarkan kepada pembeli/user.	Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21: 29 Oktober 2024
	LKN/0015-NAR/X/2024/BNNP D.I. Yogyakarta Tanggal: 26/10/2024	F.X. YRK	Ganja 945 gram	Agen Ekspedisi Wahana Jl. Magelang KM 12 Wadas, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta	Membeli narkotika jenis ganja, narkotika dikirim dalam bentuk paket melalui ekspedisi dengan alamat tujuan dititipkan di agen ekspedisi Wahana Sleman	Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika	1 Berkas Perkara P 21:

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen



SUDARYAKA, S.I.K.
AKBP NRP. 70070796

LAMPIRAN 10



Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Brigjen Katamso Komplek Perkantoran
(Selatan Purawisata) Yogyakarta

Telepon : 0274 – 385378 Faximili : 0274 – 385378

E-Mail : bnnp_diy@bnn.go.id; Website : yogyakarta.bnn.go.id

NILAI TINGKAT KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN TAHANAN
TAHUN 2024

NO	LKN	NAMA (INISIAL)	TANGGAL MASUK	KONDISI			DITITIPKAN	TAHAP II	KETERANGAN
				A	B	C			
1	LKN/0001- NAR/II/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	NSA	31/01/2024	Nihil	Nihil	Nihil	02/04/2024	22/05/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
2	LKN/0001- NAR/II/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	IH	31/01/2024	Nihil	Nihil	Nihil	02/04/2024	22/05/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
3	LKN/0001- NAR/II/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	HTK	31/01/2024	Nihil	Nihil	Nihil	03/04/2024	22/05/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
4	LKN/0002- NAR/II/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	DYS	13/02/2024	Nihil	Nihil	Nihil	04/04/2024	06/06/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
5	LKN/0003- NAR/III/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	TA	25/03/2024	Nihil	Nihil	Nihil	04/04/2024	20/06/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Sleman
6	LKN/0004- NAR/IV/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	YWS	29/04/2024	Nihil	Nihil	Nihil		13/06/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Sleman
7	LKN/0005- NAR/IV/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	IP	30/04/2024	Nihil	Nihil	Nihil		20/06/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
8	LKN/0006- NAR/V/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	ASA	19/05/2024	Nihil	Nihil	Nihil		15/08/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Bantul
9	LKN/0007- NAR/V/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	UHS	20/05/2024	Nihil	Nihil	Nihil		15/08/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Bantul
10	LKN/0007- NAR/V/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	BA	20/05/2024	Nihil	Nihil	Nihil		15/08/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Bantul
11	LKN/0007- NAR/V/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	RAR	20/05/2024	Nihil	Nihil	Nihil		15/08/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Bantul
12	LKN/0008- NAR/V/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	AK	20/05/2024	Nihil	Nihil	Nihil		15/08/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Bantul

**NILAI TINGKAT KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN TAHANAN
TAHUN 2024**

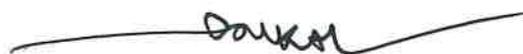
NO	LKN	NAMA (INISIAL)	TANGGAL MASUK	KONDISI			DITITIPKAN	TAHAP II	KETERANGAN
				A	B	C			
13	LKN/0009- NAR/VII/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	SEC	31/07/2024	Nihil	Nihil	Nihil	23/08/2024	10/10/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Sleman
14	LKN/0010- NAR/VII/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	HN	31/07/2024	Nihil	Nihil	Nihil	23/08/2024	24/10/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Sleman
15	LKN/0011- NAR/VII/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	TDWH	31/07/2024	Nihil	Nihil	Nihil	23/08/2024	26/09/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Sleman
16	LKN/0012- NAR/VII/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	WS	02/08/2024	Nihil	Nihil	Nihil	06/09/2024	22/10/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
17	LKN/0012- NAR/VII/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	EDN	03/08/2024	Nihil	Nihil	Nihil	06/09/2024	22/10/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
18	LKN/0013- NAR/VII/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	MP	06/08/2024	Nihil	Nihil	Nihil	06/09/2024	02/12/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
19	LKN/0013- NAR/VII/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	BI	06/08/2024	Nihil	Nihil	Nihil	06/09/2024	02/12/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
20	LKN/0014- NAR/VIII/2024/BNN P D. I. YOGYAKARTA	WHMA	23/08/2024	Nihil	Nihil	Nihil	06/09/2024	12/12/2024	Tahap II di Kejaksaan Negeri Sleman
21	LKN/0015- NAR/X/2024/BNNP D. I. YOGYAKARTA	FXYRK	01/11/2024	Nihil	Nihil	Nihil	07/11/2024		dititipkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

KETERANGAN :

- a : jumlah tahanan yang kabur
- b: jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian
- c: jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan
= jumlah seluruh tahanan - (a+b+c) x 100% Jumlah seluruh tahanan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Andi Fairan, S. I. K., M. S. M

LAMPIRAN 11



Nilai Tingkat Keamanan, barang bukti narkotika dan non narkotika



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Brigjen Katamso Komplek Perkantoran
(Selatan Purawisata) Yogyakarta
Telepon : 0274 – 385378 Faximili : 0274 – 385378
E-Mail : bnnp_diy@bnn.go.id; Website : yogyakarta.bnn.go.id

NILAI TINGKAT KEAMANAN BARANG BUKTI
TAHUN 2024

NO	LKN	Nama (Inisial)	Barang Bukti	Tanggal Masuk	Jumlah Masuk	Jumlah keluar (gram)						Selisih	Keterangan
						Tahap II		Pemusnahan		Penyisihan			
						Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal		
1	LKN/0001-NAR/I/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	NSA	Tablet Metamfetamina	25 Januari 2024	10 butir	10	22 Mei 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Yogyakarta
2	LKN/0002-NAR/II/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	DYS	Sabu	8 Februari 2024	22,39 gram	22,39	6 Juni 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Yogyakarta
3	LKN/0003-NAR/III/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	TA	Sabu	20 Maret 2024	8,24 gram	8,24	20 Juni 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Sleman
4	LKN/0004-NAR/IV/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	YWS	Sabu	24 April 2024	0,37 gram	0,37	13 Juni 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Sleman
5	LKN/0005-NAR/IV/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	IP	Sabu	25 April 2024	0,33 gram	0,33	20 Juni 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Yogyakarta
6	LKN/0006-NAR/V/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	ASA	Sabu	14 Mei 2024	1,63 gram	1,63	15 Agustus 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Bantul
7	LKN/0007-NAR/V/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	UHS	Sabu	14 Mei 2024	10,67 gram	10,67	15 Agustus 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Bantul
8	LKN/0007-NAR/V/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	BA	Sabu	14 Mei 2024	0,14 gram	0,14	15 Agustus 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Bantul
9	LKN/0009-NAR/VII/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	SEC	Sabu	26 Juli 2024	3,15 gram	3,15	10 Oktober 2024						Pelimpahan di - Kejaksaan Negeri Sleman

NO	LKN	Nama (Inisial)	Barang Bukti	Tanggal Masuk	Jumlah Masuk	Jumlah keluar (gram)						Selsih	Keterangan
						Tahap II		Pemusnahan		Penyisihan			
						Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal		
10	LKN/0010-NAR/VII/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	HN	Sabu	26 Juli 2024	6,13 gram	6,13	24 Oktober 2024						- Pelimpahan di Kejaksaan Negeri Sleman
11	LKN/0011-NAR/VII/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	TDWH	Sabu	26 Juli 2024	14,81 gram	0,64	26 September 2024	14,17	22 Agustus 2024				- Pelimpahan di Kejaksaan Negeri Sleman
12	LKN/0012-NAR/VII/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	WS	Sabu	29 Juli 2024	10,04 gram	10,04	22 Oktober 2024						- Pelimpahan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
13	LKN/0012-NAR/VII/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	EDN	Sabu	29 Juli 2024	0,68 gram	0,68	22 Oktober 2024						- Pelimpahan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
14	LKN/0013-NAR/VII/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	MP	Sabu	31 Juli 2024	1665 gram	31,67	2 Desember 2024	1.633,33	13 Agustus 2024				- Pelimpahan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
15	LKN/0014-NAR/VIII/2024/BNNP P D.I. YOGYAKARTA	WHMA	Ganja	18 Agustus 2024	50,97 gram	50,97	12 Desember 2024						- Pelimpahan di Kejaksaan Negeri Sleman
16	LKN/0015-NAR/X/2024/BNNP D.I. YOGYAKARTA	FXYRK	Ganja	27 Oktober 2024	945 gram			935	11 November 2024			10,00	Disimpan di Gudang Barang Bukti BNNP DIY

Ringkasan	
Jenis	Total
Sabu	1.743,58 gram
Tablet Metamfetamina	10,00 butir
Ganja	995,97 gram
Tembakau Sintetis	- gram

KETERANGAN :

a1 = untuk barang bukti 1

a2 = untuk barang bukti 2 , dst

y = jumlah BA (penitipan), dan asumsi : jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran

Nilai tingkat keamanan barang bukti

= { a1 +a2+a3+...+ay } x 100 %

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Andi Fairan, S. I. K., M. S. M

LAMPIRAN 12



Nilai Kerja Anggaran



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) T.A. 2024

BNNP DIY DAN WILAYAH

1. BNNP DIY

Nilai NKA BNNP DIY 99, 97 dengan Kategori Sangat Baik.

MONEV ≡ BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNP) Role Pilih TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satke Download Ekst

Tampilkan 25 ↕ entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Setuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	521494	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	100,00	99,93	99,97

Menampilkan 1 sampel 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya



LAMPIRAN 13



Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY

monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/nkasatkergabungan
Relaunch to update

BMDAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN | BMDAN NARKOTIKA NASIONAL IBUPAT
 Rols Prib 16/12/2024 Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja B M N K S L E M A N

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	040236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	040236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) T.A. 2024

BNN KOTA YOGYAKARTA

Nilai NKA BNNP DIY 99,98 dengan Kategori Sangat Baik.

The screenshot shows the MONEV application interface. At the top, the browser address bar displays 'monev.kemendagri.go.id/app/2024/catke/nka/angkabgn'. The application header includes the logo 'MONEV', the name of the institution 'BADAN KARHOTA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA (BADAN KARHOTA NASIONAL BNNP)', the fiscal year 'Fiskal: Pdt. TA 2024', and a 'Logout' button. The main heading is 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja'. Below this, there is a 'Download Excel' button and a search bar. A table displays the performance data for the unit 'BADAN KARHOTA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA'. The table has columns for 'No.', 'Kode Satuan Kerja', 'Satuan Kerja', 'NK Perencanaan Anggaran', 'NK Pelaksanaan Anggaran', and 'Nilai Kinerja Anggaran'. The data row shows a value of 99.98 for the performance score. At the bottom, there is a copyright notice 'Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.' and the application version 'Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0-2024-04-14 10:28:22'.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	042134	BADAN KARHOTA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA	100,00	99,96	99,98

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entry

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0-2024-04-14 10:28:22

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) T.A. 2024

BNNK BANTUL

Nilai NKA BNNP DIY 100 dengan Kategori Sangat Baik.

MONEV

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL / BADAN NARKOTIKA NASIONAL IBNPHI

Role: Pim T.A. 2024 Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring: Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	040173	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampel 1 dari 1 entri

Sebelumnya Selanjutnya

LAMPIRAN 14



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	066	682494	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	99.63	100.00	100.00	100.00	100.00	99.93	100%	0.00	99.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.91				100.00				

LAMPIRAN 15



Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	066	682494	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	99.63	100.00	100.00	100.00	100.00	99.93	100%	0.00	99.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.91				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	066	045165	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.64	100.00	99.96	100%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.91				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	066	040256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	066	040173	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

LAMPIRAN 16



Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator
Kinerja Nilai Zona Integritas
Berdasarkan Penilaian Internal Pada
BNNP Tahun 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **Para Kepala BNNP**

di
tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, capaian indikator kinerja kegiatan Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal untuk BNNP Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan dengan butir dua, diperintahkan kepada Kepala BNNP agar terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja dan

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNNP Tahun 2025.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.

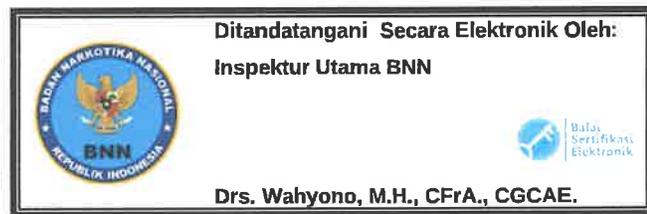


Tembusan :
Sekretaris Utama BNN

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
 NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
 PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95
11	BNNP Sumatera Barat	51.49	31.83	83.32
12	BNNP Banten	47.17	35.92	83.09
13	BNNP Jawa Barat	48.79	34.24	83.03
14	BNNP Sulawesi Barat	46.53	34.53	81.06
15	BNNP Kepulauan Riau	43.82	36.63	80.45
16	BNNP Sumatera Utara	45.59	34.44	80.03
17	BNNP Papua Barat	45.32	34.48	79.80
18	BNNP Kalimantan Timur	43.10	36.34	79.44
19	BNNP Riau	41.80	34.04	75.84
20	BNNP Maluku	43.62	32.05	75.67
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	39.30	35.99	75.29
22	BNNP Kalimantan Barat	40.72	34.33	75.05
23	BNNP Sulawesi Tenggara	41.54	33.50	75.04
24	BNNP DKI Jakarta	41.77	33.26	75.03
25	BNNP Aceh	41.74	33.28	75.02
26	BNNP Sulawesi Utara	31.94	36.87	68.81

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
27	BNNP Jambi	32.60	35.97	68.57
28	BNNP Nusa Tenggara Timur	32.72	35.49	68.21
29	BNNP Kalimantan Utara	32.25	35.62	67.87
30	BNNP Bengkulu	43.83	22.50	66.33
31	BNNP Gorontalo	29.66	34.38	64.04
32	BNNP Maluku Utara	37.63	16.88	54.51
33	BNNP Papua	35.60	17.00	52.60
34	BNNP Sulawesi Tengah	31.25	1.25	32.50



LAMPIRAN 17



Akuntabilitas Keuangan



Call Center BNNP DIY
085 200 800 300



infobnn_prov_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP_DIY



BNN Provinsi DIY



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	682494 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	PAGU	9,596,664,000	3,835,525,000	89,782,000	0	0	0	0	0	0	13,521,971,000
		REALISASI	9,440,326,015 (98.37%)	3,803,492,634 (99.16%)	89,700,000 (99.91%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,333,518,649 (98.61%)
		SISA	156,337,985	32,032,366	82,000	0	0	0	0	0	0	188,452,351
GRAND TOTAL		PAGU	9,596,664,000	3,835,525,000	89,782,000	0	0	0	0	0	0	13,521,971,000
		REALISASI	9,440,326,015 (98.37%)	3,803,492,634 (99.16%)	89,700,000 (99.91%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	13,333,518,649 (98.61%)
		SISA	156,337,985	32,032,366	82,000	0	0	0	0	0	0	188,452,351



PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	066-040256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	030	PAGU	0	1,590,080,000	75,750,000	0	0	0	0	0	0	1,665,830,000
				REALISASI	0.00%	1,588,125,482 (99.88%)	75,750,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,663,875,482 (99.88%)
				SISA	0	1,954,518	0	0	0	0	0	0	1,954,518	
TOTAL				PAGU	0	1,590,080,000	75,750,000	0	0	0	0	0	0	1,665,830,000
				REALISASI	(0.00%)	1,588,125,482 (99.88%)	75,750,000 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
				SISA	0	1,954,518	0	0	0	0	0	0	1,954,518	

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,458,211,000 1,452,703,085 (99.62%)	0 0.00%	1,458,211,000 1,452,703,085 (99.62%)						
		SISA	0	5,507,915	0	0	0	0	0	0	0	5,507,915
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	1,458,211,000 1,452,703,085 (99.62%)	0 (0.00%)	1,458,211,000 1,452,703,085 (99.62%)						
		SISA	0	5,507,915	0	0	0	0	0	0	0	5,507,915



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawal	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	PAGU REALISASI	0 0.00%	50,286,000 49,926,000 (99.28%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	50,286,000 49,926,000 (99.28%)
		SISA	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	PAGU REALISASI	0 0.00%	23,980,000 23,980,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	23,980,000 23,980,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	PAGU REALISASI	0 0.00%	7,963,000 5,863,000 (73.63%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,963,000 5,863,000 (73.63%)
		SISA	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PAGU REALISASI	0 0.00%	822,003,000 819,464,116 (99.69%)	104,414,000 103,615,000 (99.23%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	926,417,000 923,079,116 (99.64%)
		SISA	0	2,538,884	799,000	0	0	0	0	0	0	3,337,884
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	94,080,000 93,339,210 (99.21%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	94,080,000 93,339,210 (99.21%)
		SISA	0	740,790	0	0	0	0	0	0	0	740,790
6	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	PAGU REALISASI	0 0.00%	13,080,000 13,078,000 (99.98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	13,080,000 13,078,000 (99.98%)
		SISA	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
7	3257 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	163,435,000 161,619,400 (98.89%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	163,435,000 161,619,400 (98.89%)
		SISA	0	1,815,600	0	0	0	0	0	0	0	1,815,600



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL

8	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	PAGU REALISASI	0 0.00%	15,725,000 15,725,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	15,725,000 15,725,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	PAGU REALISASI	0 0.00%	14,245,000 13,795,000 (96.84%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	14,245,000 13,795,000 (96.84%)
		SISA	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
10	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	103,045,000 100,341,900 (97.38%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	103,045,000 100,341,900 (97.38%)
		SISA	0	2,703,100	0	0	0	0	0	0	0	2,703,100
11	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,000,000 9,988,500 (99.89%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,000,000 9,988,500 (99.89%)
		SISA	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
12	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	76,000,000 75,917,800 (99.89%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	76,000,000 75,917,800 (99.89%)
		SISA	0	82,200	0	0	0	0	0	0	0	82,200
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	1,393,842,000 1,383,037,926 (99.22%)	104,414,000 103,615,000 (99.23%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,498,256,000 1,486,652,926 (99.23%)
		SISA	0	10,804,074	799,000	0	0	0	0	0	0	11,603,074



DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
T.A. 2024**

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Banyaknya kabupaten/kota yang nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba masuk dalam kategori tinggi.	Menggunakan alat ukur yang disebut dengan <i>Anti Drugs Scale (ADS)</i> yang meliputi tiga dimensi, yaitu: <i>Self Regulation</i> , <i>Assertiveness</i> , dan <i>Reaching Out</i> .	Data kuesioner dari para responden (Remaja) yang sudah mendapatkan intervensi.
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Banyaknya kabupaten/kota yang nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba masuk dalam kategori tinggi.	Menggunakan alat ukur yang disebut dengan <i>Anti Drugs Scale (ADS)</i> yang meliputi tiga dimensi, yaitu: <i>Self Regulation</i> , <i>Assertiveness</i> , dan <i>Reaching Out</i> .	Data kuesioner dari para responden (Remaja) yang sudah mendapatkan intervensi.
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	Banyaknya kabupaten/kota di DIY yang telah diintervensi program pemberdayaan masyarakat baik oleh BNNP atau BNN Kabupaten/Kota di Wilayah DIY, yang memiliki angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat dalam upaya P4GN yang diukur dalam bentuk Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) berkategori mandiri.	Diukur menggunakan aspek manusia, aspek metode, aspek anggaran, aspek system, aspek sarana dan prasarana dan kegiatan P4GN. Metode pengolahan data, Nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipasi) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang".	1. Hasil Pengukuran IKP Tahun 2024 2. Data kuesioner dari para responden (masyarakat dan lingkungan pendidikan) yang sudah mendapatkan intervensi.
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Banyaknya penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup setelah mengikuti layanan rehabilitasi berkelanjutan.	Peningkatan kualitas hidup klien diukur dengan instrumen WHOQoL (World Health Organization Quality of Life)-BREF yang mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil skor WHOQoL saat penerimaan awal rehabilitasi dengan akhir rehabilitasi.	Instrumen WHOQoL yang diisi klien pada saat awal penerimaan dan akhir layanan rehabilitasi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Banyaknya anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.	Mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.	Data petugas yang telah menerima peningkatan kompetensi/ bimtek terkait layanan IBM.
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi Standar Nasional Indonesia	Banyaknya lembaga rehabilitasi, baik milik BNN, instansi pemerintah maupun komponen masyarakat, yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sesuai persyaratan yang tertera dalam SNI 8807:2022 Tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA .	Pengukuran dilakukan dengan instrumen SNI 8807:2022 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA .	Instrumen SNI 8807:2022 yang diisi oleh petugas saat monitoring dan evaluasi lembaga rehabilitasi milik BNN dan mitra BNN.
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional.	Banyaknya Unit masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya.	Menggunakan form pembinaan, asistensi dan evaluasi perkembangan unit IBM.	Hasil pembinaan dan evaluasi perkembangan unit IBM.
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerimaan layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN.	Ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap layanan rehabilitasi.	Survei kepada klien dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada Permenpan Nomor 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.	Data pengisian kuisisioner yang diisi oleh klien yang telah memperoleh layanan rehabilitasi.
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang p-21.	Banyaknya berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.	Mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari BNNP DIY dan BNNK di wilayah DIY.	Berkas P-21 BNNP dan Berkas P-21 BNN Kabupaten/Kota.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan.	Angka yang menunjukkan kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi : tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.	mendata kejadian tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas dilingkungan Rumah Tahanan BNNP DIY.	Data tahanan di rutan BNNP DIY.
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Angka yang menunjukkan kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika.	Membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan saat dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II)	Data Barang bukti di Rutan BNNP DIY.
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	Capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.	Diambil dari Aplikasi SMART Kemenkeu. Hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN.	Data Realisasi anggaran dan Capaian Realisasi output.
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Banyaknya BNN Kabupaten/Kota yang Capaian atas penggunaan anggaran tertuang dalam dokumen anggaran dan menimbulkan NKA yang memenuhi target yang telah ditetapkan.	Menghitung jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi yang Hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN memenuhi target. Diambil dari Aplikasi SMART Kemenkeu.	Capaian Realisasi anggaran, dan Capaian Realisasi output,
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Hasil indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Penilaian IKPA diambil dari 3 aspek antara lain aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil. Data diambil dari aplikasi OM-SPAN secara bulanan.	Capaian realisasi anggaran dan capaian output kegiatan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Banyaknya BNN Kabupaten/Kota yang hasil indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Menghitung jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi yang hasil evaluasi pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) memenuhi target nilai IKPA.	Capaian realisasi anggaran dan capaian output kegiatan satker BNNK.
16	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian Internal.	Hasil penilaian Tim Internal dengan menggunakan instrumen penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah.	Pengukurannya dilakukan menggunakan instrumen WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah.	Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Menyetujui,
Kepala BNNP

Daerah Istimewa Yogyakarta



Andi Fairan
Andi Fairan, S.I.K, M.S.M.